

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota**

Oleh:

**S U C I A T I
L4D005063**



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

S U C I A T I
L4D005063

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 27 November 2006

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 27 November 2006

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Ir. Hadi Wahyono, MA

Ir. Holi Bina Wijaya, MUM

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, November 2006

SUCIATI
NIM L4D005063

Seandainya semua pohon-pohonan di bumi dijadikan pena dan lautan menjadi tintanya, sesudah kering ditambah lagi dengan tujuh lautan, semuanya akan kering, namun tak akan habis-habisnya Kalam Allah dituliskan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana (Luqman:27).

*Tesis ini kupersembahkan untuk:
Ibu dan Bapak
Adik-adikku
Keponakan-keponakanku*

ABSTRAK

Pendekatan baru dalam penataan ruang menuntut pemerintah berperan dalam menggali dan mengembangkan visi secara bersama antara Pemerintah dan kelompok masyarakat di daerah dalam merumuskan wajah ruang di masa depan, standar kualitas ruang, dan aktivitas yang diinginkan atau dilarang pada suatu kawasan yang direncanakan. Proses penyusunan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati Tahun 2005–2014 telah dilaksanakan pada tahun 2004 yang lalu. Pada proses penyusunan tersebut untuk pertama kalinya telah dilaksanakan dengan menyertakan metode partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan seminar rancangan rencana bersama masyarakat. Meskipun begitu, masih juga dijumpai permasalahan penyimpangan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analisis kualitatif dan kuantitatif. Data terutama diperoleh dari responden dengan teknik *purposive sampling*, didasarkan dari kuesioner dan hasil wawancara sebagai data primer, disamping itu juga dilengkapi dengan data sekunder.

Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati pada prakteknya ternyata terdapat beberapa perbedaan dengan normatifnya. Bentuk partisipasi masyarakat didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/ saran/ usul dan sumbangan informasi/ data. Tingkat partisipasi masyarakat menurut tipologi Arnstein masuk dalam kategori *Consultation* (konsultasi), yang merupakan tangga keempat dari delapan tangga partisipasi masyarakat dari Arnstein atau termasuk dalam derajad tokenisme/ penghargaan. Bentuk partisipasi dipengaruhi oleh faktor penghasilan dan peran konsultan, sedangkan tingkat partisipasi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, penghasilan, dan peran konsultan. Peran stakeholder masih didominasi oleh peran pemerintah, sedang peran swasta dan masyarakat relatif kecil. Karena adanya ketidaksesuaian proses partisipasi tersebut mengakibatkan rencana tata ruang belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan pembangunan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa metode partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, baru merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, karena tuntutan desentralisasi dalam otonomi daerah yang menghendaki pemerintah berperan bersama stakeholder lain dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan tujuan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai dengan partisipasi itu sendiri belum dapat terwujud. Jadi agar tujuan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat tercapai dan rencana tata ruang yang dihasilkan dapat digunakan secara penuh sebagai acuan dalam pembangunan, maka perlu diterapkan prinsip transparansi pada setiap tahap dan diadakan perbaikan pada proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, sebagaimana konsep ideal yang berlaku secara normatif.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Penyusunan Rencana Tata Ruang

ABSTRACT

A new approach in the spatial planning demands government to actively looking and developing joint vision between Government and local community groups – in formulating urban face in the future, space quality standard and also expected and prohibited activity in planned area. The urban spatial planning of Pati in the year of 2005-2014 has conducted in 2004. This planning process, for the first time, has been carried out with community participation method by embracing the community aspiration and held a seminar to design and plan together with community. However, it still has some deviation in the spatial plan usage. Based on this process, this research was aimed to conduct the study of community participation form and level and also it's influencing factors in the Pati urban spatial planning.

This research pressure was on the field research and the method used in this study was descriptive analysis both qualitative and quantitative. The data particularly obtained from respondent by purposive sampling technique, based on the questionnaire and interview as primary data, and completed with secondary data.

The research study shows that in practice, the policy of Pati urban spatial planning different from it's normative form. The community participation form was dominated by input/ suggestion/ ideas and information/ data contribution. The community participation level according to Arnstein is in the Consultation level, which is the fourth level from the eight participation ladder from Arnstein, or used to called tokenism/ appreciation degree. The form of participation is influenced by income factor and consultant roles, while the participation level is influenced by education, income factor and consultant roles. The stakeholder roles is still dominated by government roles, while for private sector and community roles themselves is still low. Because of the inappropriate participation process, the urban plan can be fully used as a reference of development for government, private sector and community.

Therefore, can be concluded that the community participation method in the Pati urban spatial planning is an obligation should be carried out by government, because of the decentralization demand in the local autonomous era that requires the government to share the development planning with other stakeholders. As for the community empowerment objective itself can be realized yet. Therefore, in order to achieve the development program involving the community participation and to use the urban spatial plan completely as the development reference, there needs to applied the transparency principle in every phase and to improve the government policy implementation process, as ideal concept going into effect normatively.

Keywords: Community Participation, Spatial Planning

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Tesis ini berjudul: "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati"

Pengambilan topik ini didasari pemikiran bahwa di era otonomi daerah, perencanaan program pembangunan termasuk didalamnya perencanaan tata ruang menghendaki adanya partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, diharapkan akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat (*sense of belonging*) terhadap program pemanfaatan ruang yang sejalan dengan terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam program penataan ruang tersebut.

Dengan selesainya Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA selaku Ketua Program Studi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di MTPWK.
2. Ir. Holi Bina Wijaya, MUM selaku Mentor yang telah menyediakan waktu, memberikan bimbingan dan arahan.
3. Ir. Hadi Wahyono, MA selaku Co Mentor yang telah menyediakan waktu memberikan bimbingan dan arahan.
4. Ir. Nani Yulastuti, MSP selaku Dosen Pembahas Tesis, yang telah memberikan masukan yang sangat berarti bagi penyempurnaan Tesis.
5. Ir. Sunarti, MT selaku Dosen Penguji Tesis, yang telah memberikan masukan yang sangat berarti bagi penyempurnaan Tesis.
6. Para dosen pengampu yang telah memberikan ilmu-ilmunya tentang pembangunan wilayah dan kota.
7. Pihak BAPPENAS, atas beasiswa pendidikan untuk program Magister di Universitas Diponegoro.
8. Seluruh karyawan Program MTPWK Universitas Diponegoro.
9. Seluruh rekan MTPWK Angkatan XXVIII (BAPPENAS II) yang tidak pernah terlupakan atas seluruh rasa persahabatan selama ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu sejak penelitian hingga selesainya Tesis ini.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri bagi saran-saran agar Tesis ini menjadi lebih baik dan terutama agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, November 2006
Penulis,

Suciati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Sasaran Penelitian	9
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	10
1.4.1. Ruang Lingkup Substansial	10
1.4.2. Ruang Lingkup Spasial	11
1.5. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Pendekatan dan Metoda Penelitian	16
1.6.1. Pendekatan Penelitian	16
1.6.2. Metoda Penelitian	16
1.6.3. Kebutuhan Data	17
1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	19
1.6.4.1. Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.4.2. Teknik Pengolahan Data	20
1.6.5. Teknik Penyajian Data	21
1.6.6. Teknik Sampling	22
1.6.7. Teknik Analisis	24
1.7. Sistematika Penulisan	30

BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

2.1. Partisipasi Masyarakat	31
2.1.1. Pengertian Partisipasi	31
2.1.2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat	33
2.1.3. Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat	36

2.1.4.	Tipe-Tipe Partisipasi Masyarakat.....	38
2.1.5.	Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	40
2.1.6.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	41
2.2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	44
2.3.	Tata Ruang	51
2.3.1.	Pengertian Tata Ruang	51
2.3.2.	Perencanaan Tata Ruang	52
2.3.3.	Penataan Ruang Kawasan Perkotaan	57
2.4.	Ringkasan Teori	60

BAB III KONDISI UMUM DAN PERENCANAAN TATA RUANG KOTA DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

3.1.	Gambaran Umum Kabupaten Pati	63
3.2.	Gambaran Umum Kecamatan Pati	64
3.2.1.	Geografis	64
3.2.2.	Pemerintahan	64
3.2.3.	Penduduk	65
3.2.4.	Topografi	67
3.2.5.	Kelerengan	68
3.2.6.	Pola Pemanfaatan Lahan	68
3.3.	Tata Ruang Kota Pati	71
3.3.1.	Perencanaan Tata Ruang	71
3.3.2.	Kegiatan Penataan Ruang Kota Pati	71
3.4.	Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	73
3.4.1.	Tujuan Penataan Ruang Kota Pati	73
3.4.2.	Konstelasi Kota Pati	74
3.4.3.	Kedudukan Kota Pati	75
3.4.4.	Pengaruh Kebijakan Sektoral dan Regional	76
3.4.5.	Konsep Pengembangan Tata Ruang Kota Pati	77
3.4.5.1.	Konsep Pengembangan Kota	78
3.4.5.2.	Konsep Struktur Tata Ruang Kota	79
3.4.5.3.	Konsep Pola Pemanfaatan Lahan	79
3.4.6.	Strategi Pengembangan Tata Ruang Kota Pati	80
3.4.6.1.	Kawasan Lindung	80
3.4.6.2.	Kawasan Budidaya	81
3.4.6.3.	Struktur Tata Ruang	81
3.4.6.4.	Hirarki Pusat Pelayanan	82
3.4.6.5.	Sistem Sarana dan Prasarana	83
3.4.7.	Pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK)	83
3.5.	Proses Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	85
3.6.	Permasalahan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	91

BAB IV ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

4.1. Analisis Kebijakan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	95
4.2. Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat	100
4.2.1. Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat I	101
4.2.2. Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II	102
4.2.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Seminar Rancangan Rencana	104
4.2.4. Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Seluruh Tahap	105
4.3. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat	108
4.3.1. Analisis Tingkat Kehadiran dalam Rapat/Pertemuan	108
4.3.2. Analisis Keaktifan Mengemukakan Masukan/Saran/Usul	111
4.3.3. Analisis Keterlibatan dalam Menetapkan Konsep Rencana	114
4.3.4. Analisis Keterlibatan dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Rancangan Rencana	116
4.3.5. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Keseluruhan ...	119
4.4. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	123
4.4.1. Analisis Faktor-Faktor Internal	123
4.4.2. Analisis Faktor-Faktor Eksternal	127
4.4.3. Analisis Hubungan Antara Faktor-Faktor dengan Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat	132
4.4.3.1. Hubungan Antara Faktor-Faktor dengan Bentuk Partisipasi	133
4.4.3.2. Hubungan Antara Faktor-Faktor dengan Tingkat Partisipasi	136
4.5. Analisis Peran Stakeholder dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	140
4.6. Analisis Tingkat Partisipasi Terhadap Hasil Pembangunan.....	148
4.7. Analisis Komprehensif Partisipasi Masyarakat	152

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan	167
5.2. Rekomendasi	169

DAFTAR PUSTAKA	171
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	176
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Analisis Pendekatan Penelitian	17
Tabel I.2.	Tabel Kebutuhan Data	18
Tabel I.3.	Data Jumlah Responden Penduduk	23
Tabel II.1.	Skala Analisis Partisipasi Masyarakat	49
Tabel II.2.	Rumusan Kajian Literatur Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.....	61
Tabel III.1.	Jumlah Penduduk Tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Pati Tahun 2004	65
Tabel III.2.	Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Kecamatan Pati Tahun 2004	66
Tabel III.3.	Penggunaan Lahan di Kecamatan Pati Tahun 2004	69
Tabel III.4.	Pelaku-Pelaku yang Berperan dalam Proses Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	90
Tabel IV.1.	Perbandingan Proses Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RUTRK Pati antara Permendagri dan Dalam Prakteknya	96
Tabel IV.2.	Distribusi Frekuensi Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat I	101
Tabel IV.3.	Distribusi Frekuensi Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II	103
Tabel IV.4.	Distribusi Frekuensi Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Seminar Rancangan Rencana	105
Tabel IV.5.	Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	106
Tabel IV.6.	Tingkat Kehadiran dalam Rapat/Pertemuan pada Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	109
Tabel IV.7.	Tingkat Keaktifan Mengemukakan Masukan/Saran/Usul pada Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	112
Tabel IV.8.	Tingkat Keterlibatan dalam Menetapkan Konsep Rencana pada Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati.....	115
Tabel IV.9.	Tingkat Keterlibatan Memberikan Persetujuan terhadap Rancangan Rencana pada Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati.....	117
Tabel IV.10	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	120
Tabel IV.11.	Distribusi Frekuensi Faktor-Faktor Internal	123
Tabel IV.12.	Distribusi Frekuensi Faktor-Faktor Eksternal.....	128
Tabel IV.13.	Hasil Perhitungan Chi Square (χ^2) dan Contingency Coefficient (CC) Bentuk Partisipasi.....	133
Tabel IV.14.	Hasil Perhitungan Chi Square (χ^2) dan Contingency Coefficient (CC) Tingkat Partisipasi.....	137
Tabel IV.15.	Bagan Peran Stakeholder Tiap Tahapan Proses Perencanaan.....	142
Tabel IV.16	Skala Analisis Partisipasi Masyarakat.....	164

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1.	Peta Kedudukan Kota Pati dalam Wilayah Kabupaten Pati	12
Gambar	1.2.	Peta Administrasi Kota Pati	13
Gambar	1.3.	Kerangka Pemikiran	15
Gambar	1.4.	Kerangka Analisis Penelitian	29
Gambar	2.1	Delapan Tangga Tingkat Partisipasi Masyarakat	44
Gambar	3.1	Diagram Batang Jumlah Penduduk Kecamatan Pati Tahun 2004	67
Gambar	3.2	Diagram Luas Wilayah Kecamatan Pati Berdasarkan Ketinggian	67
Gambar	3.3	Diagram Luas Wilayah Kecamatan Pati Berdasarkan Kelerengan	68
Gambar	3.4	Peta Rencana Tata Guna Lahan	93
Gambar	3.5	Peta Bagian Wilayah Kota (BWK)	94
Gambar	4.1	Diagram Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat I	102
Gambar	4.2	Diagram Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II	103
Gambar	4.3	Diagram Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Seminar Rancangan Rencana	105
Gambar	4.4	Diagram Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Seluruh Tahap.....	106
Gambar	4.5	Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	136
Gambar	4.6	Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati	140
Gambar	4.7	Diagram Hubungan Antara Kebijakan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang dengan Bentuk, Tingkat, Faktor Pengaruh, Peran Stakeholder dan Hasil Pembangunan	165

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	Kuesioner dan Pedoman Wawancara	176
LAMPIRAN B	Tabulasi Data Hasil Kuesioner	184
LAMPIRAN C	Foto-Foto Kegiatan Penelitian	189
LAMPIRAN D	Hasil Perhitungan SPSS Distribusi Frekuensi.....	192

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu kota merupakan suatu bidang kajian yang sangat menarik, karena kompleksitas permasalahan yang dimilikinya. Dua faktor utama dikenal sebagai determinan sifat dinamika kehidupan kota yang sangat tinggi yaitu faktor kependudukan dan faktor kegiatan penduduk. Bertambahnya kegiatan penduduk di kota yang dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk maupun tuntutan kehidupan masyarakat, telah mengakibatkan meningkatnya volume dan frekuensi kegiatan penduduk. Konsekuensi keruangannya sangat jelas yaitu meningkatnya tuntutan akan ruang untuk mengakomodasikan sarana atau struktur fisik yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut (Yunus, 2005:55-57).

Menurut Sujarto dalam Soegijoko et.al (2005:2), meningkatnya pertambahan penduduk perkotaan yang disebabkan urbanisasi akan mempunyai dampak pada perubahan demografis perkotaan, perubahan sosial ekonomis kota, perubahan sosial budaya kota dan perubahan fisiografis kota. Dan perubahan yang terjadi, berimplikasi terhadap perubahan pada struktur ruang yang mewadahi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan perubahan spasial dan tuntutan permintaan akan ruang untuk mewadahnya (Rukmana, 2005:12).

Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa percepatan perkembangan fisik kawasan mengarah pada fungsi dasar kota yang tercermin pada kehidupan ekonomi dan sosio politik, pada sifat-sifat fisik, dan tata ruangnya, dengan kata lain

terjadi pergeseran fungsi ruang (Branch, 1996:78).

Ada tiga faktor utama yang menentukan perkembangan dan pertumbuhan kota yaitu (Sujarto, 1989:33):

1. Faktor manusia, yang meliputi perkembangan tenaga kerja, status sosial, perkembangan kemampuan dan teknologi.
2. Faktor kegiatan manusia, yang meliputi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota dan hubungan kegiatan regional yang lebih luas.
3. Faktor pergerakan antar pusat kegiatan manusia yang satu dengan yang lain yang merupakan perkembangan yang disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk dan perkembangan fungsi kegiatan yang memacu pola hubungan antar pusat-pusat kegiatan.

Ketiga faktor tersebut akan terwujud pada perubahan tuntutan kebutuhan ruang.

Rencana tata ruang merupakan instrumen penting bagi pemerintah, sehingga penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan pengesahan oleh lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Rencana tata ruang secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten. Senada dengan pendapat Wiranto (2001:3), bahwa pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, agar dapat dihindari masalah: (1) ketidakseimbangan laju pertumbuhan antar daerah; (2) ketidakefisienan pemanfaatan sumberdaya alam dan kemerosotan kualitas lingkungan hidup; (3) ketidaktertiban penggunaan tanah; (4) ketidakefisienan kegiatan ekonomi-sosial; dan (5) ketidakharmonisan interaksi sosial ekonomi antar pelaku dalam pemanfaatan ruang.

Dalam era otonomi sekarang ini diperlukan perubahan pola pikir pendekatan penataan ruang. Pola pikir pendekatan penataan ruang yang memandang masyarakat sebagai obyek peraturan yang homogen, perlu diubah dengan memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dengan keanekaragaman perilaku. Pendekatan baru dalam penataan ruang ini menuntut pemerintah berperan dalam menggali dan mengembangkan visi secara bersama antara Pemerintah dan kelompok masyarakat di daerah dalam merumuskan wajah ruang di masa depan, standar kualitas ruang, dan aktivitas yang diinginkan atau dilarang pada suatu kawasan yang direncanakan (Haeruman, 2004:2).

Beberapa issue strategik yang patut diperhatikan dalam kaitannya pelibatan masyarakat dalam penataan ruang adalah (www.kimpraswil.go.id, 2002:4):

1. Kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan.
2. Kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses penataan ruang yang menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan.
3. Masih rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari program penataan ruang yang diselenggarakan sehingga masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya.
4. Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah menjadi kepentingan bersama (*common interest*) akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pemahaman yang tidak sama.
5. Kurang optimalnya kemitraan atau sinergi antara swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

6. Persoalan yang dihadapi dalam hal perencanaan partisipatif saat ini antara lain panjangnya proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengalaman tersebut, bahwa rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses penataan ruang dapat mengakibatkan dampak negatif sebagai berikut: (1) rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program pembangunan kota yang disusun, akibatnya keberlanjutan (*sustainability*) dari program yang dilaksanakan tidak terwujud; (2) program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya; (3) munculnya biaya transaksi (*transaction cost*) yang sangat mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dari program pembangunan sehingga seringkali muncul penolakan atas program yang dilaksanakan.

Menurut Santosa dan Heroepoetri (2005:10), dalam konteks penataan ruang ada dua jenis kebutuhan yang mendasari partisipasi masyarakat yaitu kebutuhan fungsi kontrol dan kebutuhan informasi dan data sosial. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah perencanaan tata ruang sebagai hal yang responsif. Sebuah perencanaan yang responsif menurut Mc. Connel (1981) adalah proses pengambilan keputusan tentang perencanaan tata ruang yang tanggap pada preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Untuk mencapai perencanaan yang responsif, maka keterlibatan masyarakat harus dilakukan sejak awal proses perencanaan itu sendiri yaitu sejak tahap identifikasi permasalahan, aspirasi serta kebutuhan sampai dengan tahap pelaksanaan rencana tata ruang.

Dengan adanya proses pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan penataan ruang yang telah dilakukan dan menjadi masukan

bagi proses penataan ruang selanjutnya. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat diharapkan terciptanya kesepakatan dan aturan main di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial disebabkan program penataan ruang yang disusun sesuai dengan aspirasinya. Selain itu juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat (*sense of belonging*) terhadap program pemanfaatan ruang yang sejalan dengan terakomodasinya aspirasi mereka dalam program penataan ruang tersebut, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan yang efisien dan efektif (www.kimpraswil.go.id, 2002:34).

Partisipasi masyarakat dalam sistem penataan ruang diperlukan karena: (1) pada tahap perencanaan, masyarakat paling tahu apa yang mereka butuhkan, dengan demikian mengarahkan pada produk rencana tata ruang yang optimal dan proporsional untuk berbagai kegiatan, sehingga terhindar dari spekulasi dan distribusi alokasi ruang yang berlebihan untuk kegiatan tertentu; (2) pada tahap pemanfaatan, masyarakat akan menjaga pendayagunaan ruang yang sesuai dengan peruntukan dan alokasi serta waktu yang direncanakan, sehingga terhindar dari konflik pemanfaatan ruang; (3) pada tahap pengendalian, masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan serasi serta berguna untuk kelanjutan pembangunan (Ibrahim, 2004:4).

Menempatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan memutuskan alternatif rencana merupakan suatu langkah untuk menjadikan rencana, khususnya dalam hal ini tata ruang, sebagai rencana kepunyaan masyarakat. Sehingga pelanggaran terhadap rencana adalah menentang kesepakatan masyarakat, bukan terbatas menentang keputusan pemerintah daerah (Haeruman, 2004:2).

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5

ayat (1) dan (2), serta Pasal 12 ayat (1) dan (2). Ketentuan tentang pelibatan masyarakat dalam penataan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang di daerah.

Proses penyusunan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati Tahun 2005–2014 telah dilaksanakan pada tahun 2004 yang lalu. Pada proses penyusunan tersebut untuk pertama kalinya telah dilaksanakan dengan menyertakan metode partisipasi masyarakat. Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati yang dahulu bernama Rencana Induk Kota (RIK) Pati pertama kali disusun pada tahun anggaran 1984/1985 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985. Kemudian pada tahun anggaran 1993/1994 dibuat Revisi terhadap Rencana Induk Kota dan terakhir pada tahun 2004 dibuat Revisinya kembali yang sekarang bernama Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati.

Pada saat penyusunan RIK tahun 1984/1985 dan 1993/1994 belum menggunakan metode partisipasi masyarakat, meskipun pada tahun 1993 telah ada Undang-Undang 24 Tahun 1992 akan tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada, karena Peraturan Pemerintah 69 baru terbit tahun 1996 dan Permendagri 9 baru terbit tahun 1998. Maka pada penyusunan revisi RUTRK tahun 2004 untuk pertama kalinya di Kabupaten Pati telah digunakan metode partisipasi masyarakat yaitu dengan cara melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan seminar rancangan rencana bersama masyarakat.

Penjangkaran aspirasi masyarakat dilaksanakan dua kali yaitu bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam penentuan arah pembangunan dan

pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan kota. Dan Seminar rancangan rencana bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam perumusan rencana tata ruang kota dan pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang. Akan tetapi, dari semua kegiatan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat tersebut, belum diketahui bagaimanakah bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat tersebut dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

Berdasarkan hal diatas, maka perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati, sehingga diharapkan akan diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai arahan kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang di Kabupaten Pati pada masa-masa mendatang.

1.2. Perumusan Masalah

Pertambahan penduduk kota yang masih tergolong tinggi karena pertumbuhan alami maupun urbanisasi, membawa konsekuensi spasial yang serius bagi kehidupan kota, yaitu adanya tuntutan akan *space* yang terus menerus pula untuk dimanfaatkan sebagai tempat hunian. Hal ini menyebabkan terjadinya proses densifikasi penduduk, permukiman maupun bangunan non permukiman di kota yang berjalan tidak terkendali (Yunus, 2005:56).

Sebagian besar kebutuhan akan ruang yang tidak dapat dibangun di bagian dalam kota, baik karena kelangkaan lahan maupun karena tingginya harga lahan yang tidak terjangkau, mengalihkan perhatiannya di bagian daerah pinggiran kota.

Salah satu kelemahan yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah adalah tidak dilaksanakannya monitoring yang ketat di bagian dalam kota maupun di daerah pinggiran, sehingga lahan-lahan terbuka yang masih tersisa akan dipergunakan juga ataupun terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya dalam rencana tata ruang.

Kota Pati juga memiliki masalah berkaitan dengan penataan ruang yaitu terjadinya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang karena kepentingan ekonomi, yaitu perkembangan kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya seperti pembangunan kawasan permukiman diluar kawasan yang telah direncanakan dalam tata ruang, bahkan dibangun pada lokasi untuk fungsi peruntukan kawasan industri. Adanya penyimpangan ini mengindikasikan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang kota. Rendahnya partisipasi masyarakat ini, menjadikan aspirasi masyarakat tidak dapat terakomodasi dengan baik, dan akibatnya rasa memiliki masyarakat (*sense of belonging*) terhadap program pemanfaatan ruang tidak terwujud.

Meskipun penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pati beberapa waktu lalu telah disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan seminar rancangan rencana bersama masyarakat, akan tetapi masih juga muncul permasalahan penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang. Untuk mengurangi dan mencegah agar penyimpangan pemanfaatan ruang tidak semakin besar, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang pada masa yang akan datang. Karena dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyusunannya, diharapkan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi sehingga ikut

menentukan arah pengembangan kota dan tumbuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi rencana yang telah ikut disusunnya.

Dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, maka perlu diketahui terlebih dahulu bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat yang telah ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi tersebut, kemudian dicari hubungan antara bentuk dan tingkat partisipasi dengan faktor-faktor tersebut. Atas dasar rumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian yang diangkat adalah: Bagaimanakah bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan kajian bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan diatas, maka yang menjadi sasaran dari studi ini yang harus dilakukan adalah:

1. Identifikasi kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.
2. Melakukan analisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.
3. Melakukan analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

4. Melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan analisis hubungan antara faktor-faktor dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Dengan maksud untuk memperjelas dan memfokuskan permasalahan yang dibahas, penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, dan tidak membahas pada partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang Kota Pati.
2. Kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Mendiskripsikan tentang kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.
3. Bentuk-bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan hubungan antara faktor-faktor dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.
5. Variabel-variabel penelitian yang berkaitan dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat digali dari teori dan studi literatur.

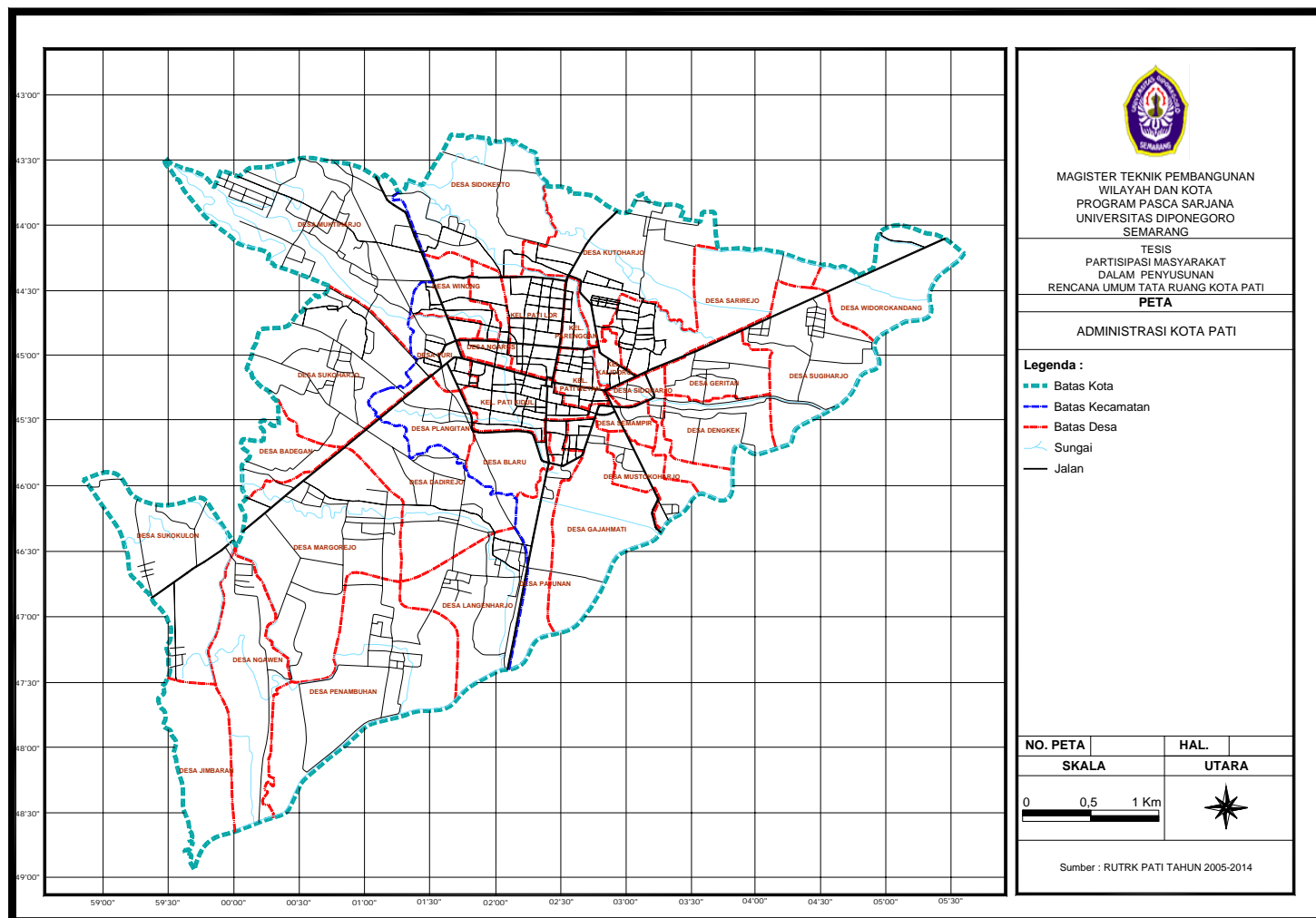
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial yang diambil dalam penelitian ini adalah meliputi desa/kelurahan yang masuk dalam wilayah perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati. Wilayah perencanaan rencana umum tata ruang Kota Pati ini mencakup lokasi beberapa desa/kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pati, dan beberapa desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Margorejo. Adapun lokasi penelitian secara lebih rinci sebagaimana gambar 1.1 dan gambar 1.2.

1.5 Kerangka Pemikiran

Peningkatan pertumbuhan penduduk perkotaan mempunyai dampak pada perubahan demografis perkotaan, perubahan sosial ekonomis kota, perubahan sosial budaya kota dan perubahan fisiografis kota. Bertambahnya kegiatan penduduk di kota yang dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk maupun tuntutan kehidupan masyarakat telah mengakibatkan meningkatnya volume dan frekuensi kegiatan penduduk. Konsekuensi keruangannya sangat jelas yaitu meningkatnya tuntutan akan ruang untuk mengakomodasikan sarana atau struktur fisik yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, hal ini berakibat timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang.

Timbulnya masalah yang berkaitan dengan penataan ruang seperti adanya penyimpangan pemanfaatan ruang yaitu pembangunan kawasan permukiman diluar kawasan yang telah direncanakan dalam tata ruang, bahkan dibangun pada lokasi untuk fungsi peruntukan kawasan industri, menunjukkan bahwa masih kurang terakomodasinya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TESIS
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

PETA

ADMINISTRASI KOTA PATI

Legenda :

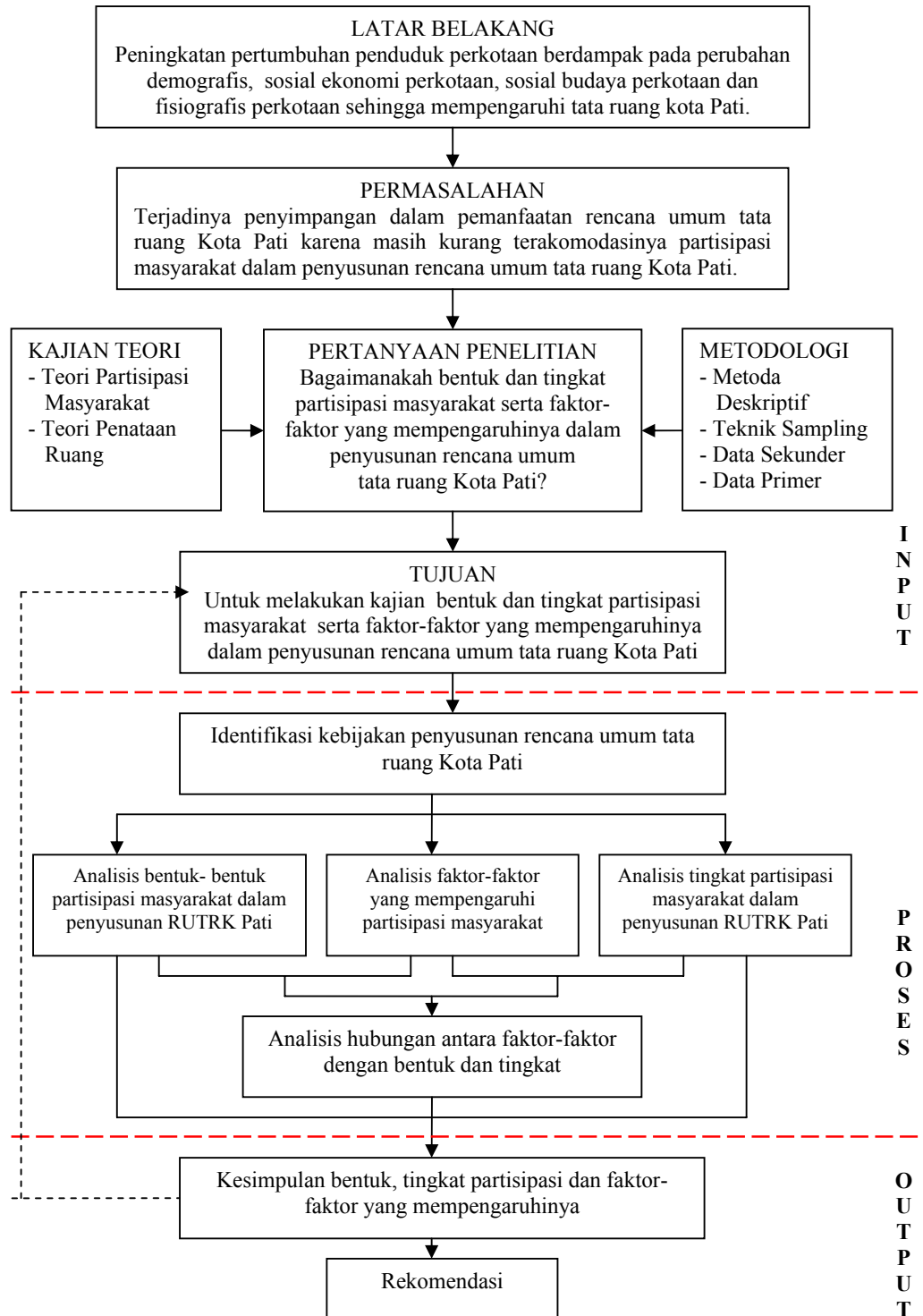
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Jalan

NO. PETA	HAL.
SKALA	UTARA
0 0,5 1 Km	

Sumber : RUTRK PATI TAHUN 2005-2014

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, dengan sasaran antara lain melakukan identifikasi kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati; melakukan analisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati; melakukan analisis seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati; dan melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati; serta untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang ada dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan serta sasaran tersebut diperlukan teori-teori yang mendukung tema tersebut antara lain teori tentang partisipasi masyarakat, dan teori mengenai penataan ruang. Selain itu juga digunakan metodologi diskriptif dengan alat-alat analisis secara kuantitatif dan kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder. Pada akhirnya diperoleh kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Adapun kerangka pemikiran yang mendasari studi ini dapat dilihat pada gambar 1.3. berikut ini.



GAMBAR 1.3.
KERANGKA PEMIKIRAN

Sumber: Hasil analisis, 2006

1.6. Pendekatan dan Metoda Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*), untuk mengetahui permasalahan serta untuk mendapatkan informasi dan data yang ada di lokasi penelitian. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan paradigma *rasionalistik*, yaitu mengedepankan pemikiran terlebih dahulu dalam bentuk konsep atau teori, sebagai landasan untuk menelaah gejala yang terjadi dan melakukan suatu tindakan. Penelitian ini juga akan ditunjang dengan data sekunder dan penelaahan pustaka (*literature study*), terutama pada awal penyusunan kerangka pemikiran dan landasan teori.

1.6.2. Metoda Penelitian

Metoda penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Mendasarkan pada pelaksanaan penelitian, maka metoda penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif analisis kualitatif dan kuantitatif. Metoda deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara aktual dan cermat, menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (Hasan, 2002:22).

Penggunaan metoda deskriptif karena penelitian ini memfokuskan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data atau masukan dari masyarakat sebagai data primer. Deskriptif kuantitatif lebih menitikberatkan pada interpretasi dari data-data kuantitatif yang ada di lapangan. Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu menitikberatkan pada pengungkapan berbagai informasi kualitatif melalui data yang dikumpulkan kemudian dianalisa. Pendekatan penelitian sebagaimana tabel I.1 berikut ini.

TABEL I.1
ANALISIS PENDEKATAN PENELITIAN

No.	Analisis	Metoda	Uraian	Hasil
1.	Kebijakan penataan ruang Kota Pati.	Analisis Deskriptif Kualitatif.	Mengidentifikasi kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.	Kebijakan penataan ruang Kota Pati dalam prakteknya.
2.	Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.	Analisis Deskriptif Kualitatif. Distribusi frekuensi.	Menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.	Prosentase mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.
3.	Tingkat partisipasi masyarakat.	Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif. Distribusi Frekuensi	Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.	Besarnya tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan tipologi Arnstein.
4.	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.	Analisis Deskriptif Kualitatif Distribusi Frekuensi.	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.	Prosentase mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.
5	Hubungan antara faktor-faktor dengan bentuk dan tingkat partisipasi.	Analisis Deskriptif Kuantitatif.	Menganalisis hubungan antara faktor-faktor dengan bentuk dan tingkat, menggunakan analisis tabulasi silang (<i>crosstab</i>).	Ada tidaknya hubungan dan kuat lemahnya hubungan.

Sumber: Hasil analisis, 2006

1.6.3. Kebutuhan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Sugiarto et. al, 2001:16). Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder umumnya digunakan untuk memberikan gambaran

tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut (Sugiarto et. al, 2001: 19). Kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah meliputi:

TABEL I.2
TABEL KEBUTUHAN DATA

No.	Data	Jenis Data	Kebutuhan Data	Variabel	Sumber
1.	Kondisi wilayah Kabupaten Pati dan Kecamatan Pati.	Sekunder	Luas Wilayah Kondisi Geografis Kependudukan Sosial Ekonomi.	-	BPS dan BAPPEDA Kabupaten Pati.
2	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang Kota Pati.	Sekunder	Kebijakan dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.	-	BAPPEDA Kabupaten Pati.
3	Proses penyusunan RUTRK Pati.	Sekunder	Data rekaman proses penyusunan RUTRK Pati.	-	BAPPEDA Kabupaten Pati.
4	Bentuk partisipasi masyarakat.	Primer	Data tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUTRK Pati.	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pendengar. • Sumbangan masukan/saran/Usul. • Sumbangan informasi/data. • Bantuan memperjelas hak atas ruang. • Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana. 	Masyarakat
5	Tingkat partisipasi masyarakat.	Primer	Data tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUTRK Pati.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan. • Keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul. • Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana. • Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana. 	Masyarakat

6	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.	Primer	Data mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUTRK Pati.	Faktor-faktor internal: <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Kelamin • Usia • Tingkat Pendidikan • Tingkat Pendapatan • Mata Pencaharian Faktor-faktor eksternal: <ul style="list-style-type: none"> • Peran Pemerintah • Peran Konsultan Perencana • Peran Pihak Swasta 	Masyarakat
---	---	--------	---	--	------------

Sumber: Hasil analisis, 2006

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.6.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. Untuk mendapatkan data yang representatif dan sejalan dengan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup dan terbuka, dengan pengertian tertutup bahwa jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan. Sedangkan terbuka berarti bahwa responden diminta untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai keinginan mereka, dengan menuliskannya pada tempat yang telah disediakan.
2. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung melalui cara tanya jawab yang dilakukan dengan beberapa nara sumber

yang terpilih. Teknik ini digunakan secara simultan dan sebagai cara utama memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi. Teknik ini digunakan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Beberapa hal yang belum tercakup dalam daftar pertanyaan dapat digali dengan teknik ini.

3. Observasi, yaitu pengumpulan data langsung pada obyek yang akan diteliti, melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder, melalui studi pustaka/literatur dilengkapi dengan data statistik, peta, foto dan gambar-gambar yang relevan dengan tujuan penelitian.

1.6.4.2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu. Pengolahan data meliputi *editing*, *coding*, dan tabulasi. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul, tidak logis atau meragukan. *Coding* adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Sedangkan tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode, sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

Teknik pengolahan data yang dimaksud disini adalah pengolahan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Dalam proses pengolahan data, jawaban responden dari tiap-tiap pertanyaan akan diberi bobot/nilai yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui bentuk, tingkat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dari nilai-nilai yang diperoleh pada setiap pertanyaan, agar dapat dipakai sebagai data yang mudah dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka penyebaran nilai-nilai tersebut perlu diringkas dalam suatu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu penyajian dalam bentuk tabel yang berisi data yang telah digolong-golongkan ke dalam kelas-kelas menurut keurutan tingkatannya beserta jumlah individu yang termasuk dalam masing-masing kelas (Hadi, 2001:225).

Untuk proses analisis pengolahan data, diperlukan program komputer yaitu dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

1.6.5. Teknik Penyajian Data

Data yang sudah diolah, agar mudah dibaca dan dimengerti oleh orang lain, perlu ditampilkan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Penyajian data pada penelitian ini, agar mudah dibaca dan dipahami serta dianalisis akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan atau grafik-grafik. Tabel merupakan kumpulan angka yang disusun sedemikian rupa menurut kategori tertentu sehingga memudahkan pembahasan dan analisa data. Sedangkan grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual yang didasarkan atas nilai-nilai pengamatan aslinya ataupun dari tabel-tabel yang dibuat sebelumnya.

Tabel yang banyak digunakan adalah tabel distribusi frekuensi, yaitu susunan data dalam suatu tabel yang telah diklasifikasikan menurut kelas atau kategori tertentu. Penyajian data dalam bentuk grafik dapat ditampilkan dalam bentuk histogram, poligon, dan grafik lingkaran (*pie chart*).

1.6.6. Teknik Sampling

Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah dengan metode *sampling*. *Sampling* hanya mencatat atau menyelidiki sebagian dari objek, gejala atau peristiwa, tidak seluruhnya. Sebagian individu yang diselidiki itu disebut *sampel* dan metodenya disebut *sampling*, sedang hasil yang diperoleh ialah nilai karakteristik perkiraan (*estimate value*) yaitu taksiran tentang keadaan populasi. Jadi peneliti bermaksud mereduksi objek penelitiannya tetapi ingin mengadakan generalisasi terhadap hasil-hasilnya (Marzuki, 2002:41). Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Sedangkan populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun dan Effendi, 1995:152). Berdasarkan hal tersebut maka yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah penduduk desa/kelurahan dalam wilayah perencanaan tata ruang Kota Pati yang mencakup 22 desa/kelurahan di Kecamatan Pati dan 9 desa di Kecamatan Margorejo.

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel non acak (*non probability sampling*) yaitu *Purposive Sampling* atau sampling pertimbangan/sampling dengan maksud tertentu. Dalam teknik ini, semua anggota atau subjek penelitian tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel atau pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan karena dalam pelaksanaannya digunakan pertimbangan tertentu yang dikenakan ke dalam sub kelompok (Sevilla et. al, 1993:168).

Teknik *purposive sampling* ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk

pengambilan sampel. Teknik ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Narbuko dan Achmadi, 2003:116).

Pertimbangan digunakannya *purposive sampling* ini didasarkan pada tujuan penelitian adalah untuk melakukan kajian/evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, dimana pelaksanaan penyusunannya telah dilakukan pada tahun 2004 lalu dengan melibatkan partisipasi beberapa wakil masyarakat dari wilayah perencanaan. Untuk dapat mengetahui partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat diperoleh dari partisipasi masyarakat yang benar-benar terlibat dalam kegiatan penyusunan.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan sampel pada penelitian ini adalah wakil-wakil masyarakat yang dahulu ikut terlibat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, meliputi para kepala desa/kelurahan dan wakil masyarakat desa/kelurahan dalam wilayah perencanaan di Kecamatan Pati dan beberapa di Kecamatan Margorejo. Jumlah masyarakat yang terlibat pada saat itu sebanyak 54 orang. Jadi besarnya ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 54 orang.

TABEL I.3
DATA JUMLAH RESPONDEN

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Responden		
		Kepala Desa/ Kelurahan	Wakil Masyarakat	Jumlah Total
1	Panjunan	1	1	2
2	Gajahmati	1	1	2
3	Mustokoharjo	1	1	2
4	Semampir	1	1	2
5	Pati Wetan	0	2	2
6	Blaru	1	1	2
7	Pati Kidul	1	3	4
8	Plangitan	1	2	3
9	Puri	1	1	2
10	Winong	1	1	2
11	Ngarus	1	1	2
12	Pati Lor	1	2	3

Lanjutan

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Responden		
		Kepala Desa/ Kelurahan	Wakil Masyarakat	Jumlah Total
13	Parenggan	1	1	2
14	Sidoharjo	1	1	2
15	Kalidoro	1	1	2
16	Sarirejo	1	1	2
17	Geritan	1	1	2
18	Dengkek	1	1	2
19	Sugiharjo	1	1	2
20	Widorokandang	1	1	2
21	Kutoharjo	1	1	2
22	Sidokerto	1	1	2
23	Margorejo	1	2	3
24	Sukoharjo	1	1	2
25	Sukokulon	1	0	1
JUMLAH		24	30	54

Sumber: Hasil analisis, 2006

1.6.7. Teknik Analisis

Tujuan analisis di dalam penelitian adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti (Marzuki, 2002:83). Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda analisis deskriptif kualitatif didukung dengan deskriptif kuantitatif serta metoda tabulasi silang. Dari data kuantitatif yang telah diperoleh berupa skor atau nilai sebagai data primer kemudian dianalisa dan disajikan dalam distribusi frekuensi.

Untuk mencari hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan bentuk dan tingkat partisipasi, dilakukan dengan tabulasi silang dan data dari hasil wawancara pada responden sebagai data kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat partisipasi masyarakat serta sebagai pendukung analisa kuantitatif. Sementara itu, data sekunder dan data dokumentasi disajikan untuk melengkapi dan memberi gambaran terhadap kondisi obyek penelitian.

Analisis terhadap data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner yang merupakan jawaban terbuka, dilakukan melalui 3 kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16-20).

Metoda analisis yang akan digunakan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.
Pada tahap ini akan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan hasil survei sekunder dan kajian literatur sebagai bahan utama bagi proses analisis.
- Metoda analisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.
Pada tahap ini akan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil data dari masyarakat, maka dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi, dapat diketahui prosentase bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Variabel bentuk-bentuk partisipasi masyarakat meliputi: Sebagai pendengar; Sumbangan masukan/saran/usul; Sumbangan informasi/data; Bantuan memperjelas hak atas ruang; dan Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana.
- Metoda analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang kota Pati.
Pada tahap ini akan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan metode kuantitatif melalui penjumlahan skor dari variabel. Berdasarkan jumlah skor dari semua variabel,

dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat masuk dalam kategori tipologi Delapan Tangga Partisipasi Arnstein. Besarnya interval skor untuk menentukan kategori tingkat partisipasi masyarakat secara menyeluruh didasarkan pada skor kategori tingkat partisipasi individu dikalikan dengan jumlah sampel.

Penjelasan secara rinci sebagai berikut:

Terdapat 4 kriteria pertanyaan dengan pilihan jawaban masing-masing pertanyaan ada 8 pilihan dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 8. Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4×1) adalah 4, maksimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4×8) adalah 32, maka bila jumlah sampel 54, dapat diketahui skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat (54×4) adalah 216 dan skor maksimum (54×32) adalah 1728.

Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu $(1728-216)/8 = 189$.

Bila digunakan tipologi dari Arnstein, sehingga dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah:

- *Citizen Control*, bila memiliki skor 1539 - 1728
- *Delegated Power*, bila memiliki skor 1350 - 1538
- *Partnership*, bila memiliki skor 1161 - 1349
- *Placation*, bila memiliki skor 972 - 1160
- *Consultation*, bila memiliki skor 783 - 971
- *Informing*, bila memiliki skor 594 - 782
- *Therapy*, bila memiliki skor 405 - 593
- *Manipulation*, bila memiliki skor 216 - 404

- Metoda analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

Pada tahap ini akan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil data dari masyarakat, dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi maka dapat diketahui prosentase dari faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Sementara itu variabel faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan mata pencaharian. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari: peran pemerintah, peran konsultan perencana, dan peran pihak swasta.

- Metoda analisis untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat.

Untuk mengetahui hubungan ini dari hasil survei primer di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan model tabulasi silang. Tabulasi silang adalah prosedur yang digunakan untuk menghitung kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel atau lebih dengan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya.

Data dari tiap variabel dikelompokkan dalam beberapa kategori, dimana dari setiap kategori tersebut diberi skor untuk mempermudah perhitungan. Kemudian variabel-variabel yang akan diidentifikasi hubungannya disusun dalam baris dan kolom. Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien kontigensi (*contingency coefficient*), yaitu koefisien yang digunakan untuk melihat ada atau tidak, kuat atau lemahnya hubungan diantara dua variabel.

Metoda tabulasi silang akan mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda kedalam suatu matriks, hasil tabulasi silang disajikan dalam bentuk suatu tabel dengan variabel-variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris tabel tersebut.

Untuk mengamati dan menganalisa variabel-variabel tersebut dipakai dengan tabel dua dimensi yang merupakan cara yang termudah.

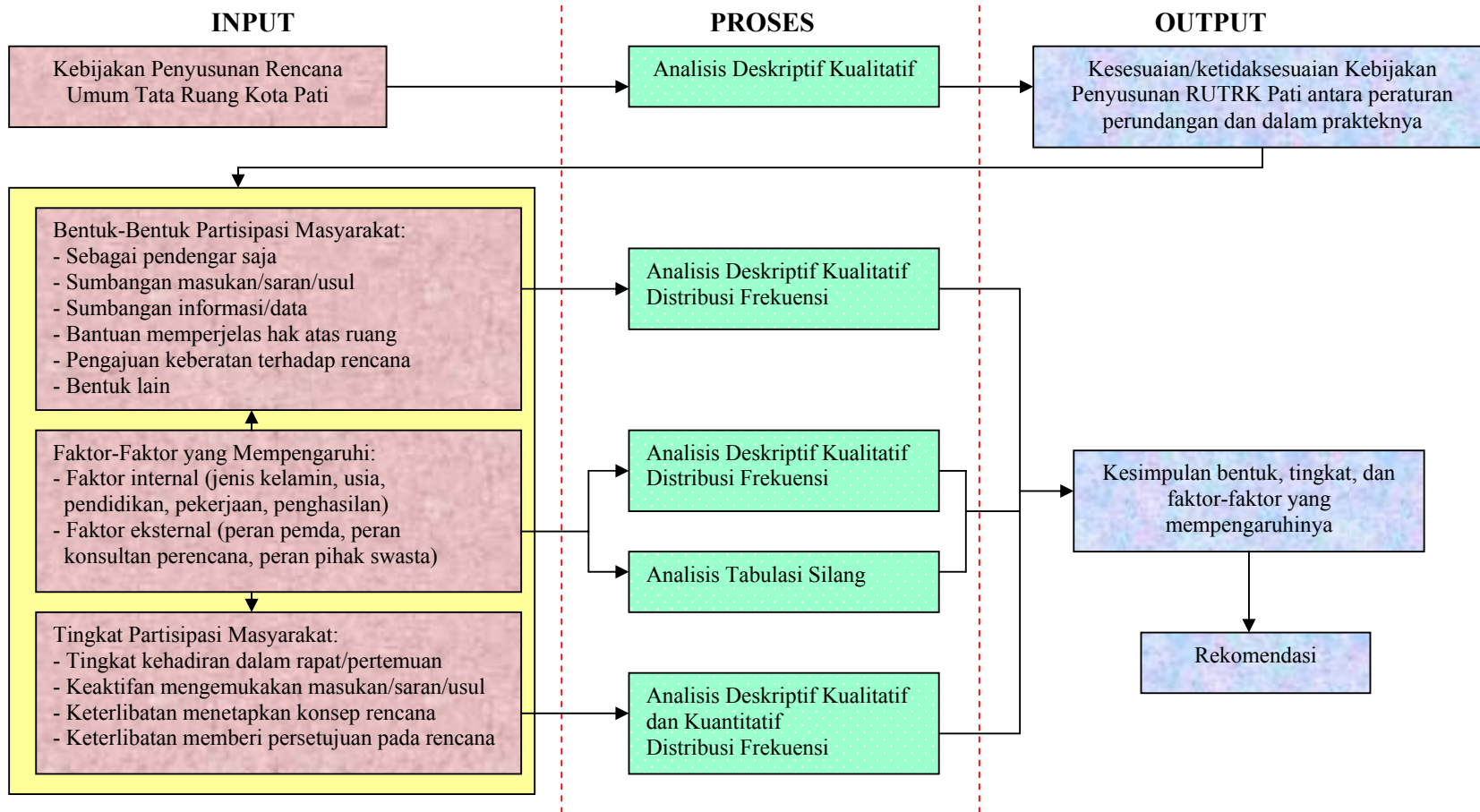
Dengan menggunakan SPSS maka dapat diketahui nilai *Chi Square* (χ^2) dan besarnya *Contingency Coefficient* (CC). Dimana CC berada pada rentang skala antara 0 sampai 1, atau $0 < CC < 1$

Bila $CC = 0$ berarti tidak ada hubungan

Bila $CC = 1$ berarti ada hubungan sempurna

Dalam hal ini semakin mendekati angka 1 maka hubungan yang terjadi semakin kuat dan semakin mendekati angka 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Untuk melihat diagram analisis selengkapnya disajikan dalam gambar 1.4 berikut ini.



Sumber: Hasil analisis, 2006

GAMBAR 1.4
KERANGKA ANALISIS PENELITIAN

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, dengan uraian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, pendekatan dan metoda penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Berisi teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah, diuraikan mengenai teori yang akan mendukung penelitian, sehingga dari teori yang dikemukakan, pertanyaan penelitian yang diangkat dapat terjawab walaupun masih bersifat teoritis.

BAB III KONDISI UMUM DAN KONDISI TATA RUANG KOTA DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

Meliputi gambaran umum wilayah Kabupaten Pati dan Kecamatan Pati serta kondisi tata ruang Kota Pati.

BAB IV ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

Berisi analisis kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, bentuk partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan hubungan antara faktor-faktor dengan bentuk dan tingkat partisipasi.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

2.1. Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Terdapat banyak definisi mengenai partisipasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya (Allport dalam Sastropetro, 1988:12).
- Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Davis dalam Sastropetro, 1988:13).
- Partisipasi masyarakat berarti menyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima tanggung jawab dan aktifitas tertentu. Dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang dari pemerintah dan masyarakat dalam aktivitas tertentu (Ramos dan Roman dalam Yeung dan Mc.Gee, 1986:97).
- Partisipasi masyarakat adalah berbagai kegiatan orang seorang, kelompok atau badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak di penyelenggaraan

penataan ruang (UU 24/1992).

- Partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan (Soetrisno, 1995:207)
- Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai subyek dan obyek pembangunan; keterlibatan dalam tahap pembangunan ini dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya (Kamus Tata Ruang, 1998:79).
- Menurut FAO dalam Mikkelsen (2003:64)
 - Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
 - Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
 - Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
 - Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
 - Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.

- Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam penataan ruang adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam suatu proses kegiatan penataan ruang, dimulai dari proses penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.2 Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999:71).

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul

anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep *man-centred development* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi (Kartasasmita, 1996:145).

Menurut Siahaan (2002:4), partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, *planning* dan keuntungan lainnya, yaitu:

- Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan.
- Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan *participatory* dibanding demokrasi perwakilan (*representative democracy*) sebagai hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik juga akan membantu dewan (*counsellors*) dan para pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai permintaan-permintaan

dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.

- Dari segi *planning*, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan *public interest* dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal perencanaan.
- Keuntungan lain dan *public participation* adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas kota dan menggantikan perilaku *they/we* menjadi perilaku *us*.

Sementara itu menurut Sanoff (2000:9), tujuan utama partisipasi adalah: (1) untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan; (2) untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana; dan (3) untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum. Dengan partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati.

Partisipasi mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta. Partisipasi memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsur kesetaraan dan kedaulatan dari para pelaku partisipasi. Sedangkan peran serta bisa diartikan sebagai pelengkap dan tidak harus kesetaraan.

Menurut Abe (2005:91), suatu perencanaan yang berbasis prakarsa masyarakat adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan membawa dampak penting yaitu: (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, dan

memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat; (2) memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; (3) meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Schubeller (1996:3) menyatakan, bahwa partisipasi tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dan menurutnya ada 4 pendekatan strategi partisipasi yaitu:

1. *Community –Based Strategies*

Merupakan bentuk paling dasar dari pembangunan partisipatif.

2. *Area-Based Strategies*

Merupakan bentuk umum dari program-program pemerintah.

3. *Functionally-Based Strategies*

Merupakan struktur fungsional dari sistem infrastruktur sebagai kerangka referensi.

4. *Process-Based Strategies*

Dimana memerlukan seluruh proses manajemen infrastruktur sebagai kerangka referensi.

2.1.3 Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat

Carter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1989) dalam Santosa dan Heroepoetri (2005:2) merinci fungsi dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat sebagai suatu Kebijakan
2. Partisipasi Masyarakat sebagai Strategi
3. Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Komunikasi
4. Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa
5. Partisipasi Masyarakat sebagai Terapi

Lebih lanjut Santosa dan Heroepoetri (2005:5) juga merangkum manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik (Mill, 1990). Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

2. Meningkatkan proses belajar

Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berpartisipasi lebih jauh.

3. Mengeliminir perasaan terasing

Karena turut aktifnya berpartisipasi dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena dengan berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.

4. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

5. Menciptakan kesadaran politik

John Stuart Mill (1963) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat

lokal, dimana pendidikan nyata dari partisipasi terjadi, seseorang akan belajar demokrasi. Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktek pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar bagaimana mempraktekkannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.

6. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Menurut Verba dan Nie (1972) bahwa melalui partisipasi masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.

7. Menjadi sumber dari informasi yang berguna

Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu akan menjadi pakar yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.

8. Merupakan komitmen sistem demokrasi

Program partisipasi masyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat kedalam proses pembuatan keputusan (Devitt, 1974).

2.1.4 Tipe-Tipe Partisipasi Masyarakat

Dusseldorp dalam Slamet (1993:10-21), membuat klasifikasi tipe partisipasi yaitu:

1. Penggolongan berdasarkan derajat kesukarelaan, terdiri dari partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa.

2. Penggolongan berdasarkan pada cara keterlibatan, terdiri dari partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.
3. Penggolongan berdasarkan pada keterlibatan di dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan terencana, terdiri dari partisipasi lengkap dan partisipasi sebagian.
4. Penggolongan berdasarkan pada tingkatan organisasi, terdiri dari partisipasi yang terorganisasi dan partisipasi yang tidak terorganisasi.
5. Penggolongan berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan, terdiri dari partisipasi intensif dan partisipasi ekstensif.
6. Penggolongan berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan, terdiri dari partisipasi tak terbatas dan partisipasi terbatas.
7. Penggolongan berdasarkan pada efektivitas, terdiri dari partisipasi efektif dan partisipasi tidak efektif.
8. Penggolongan berdasarkan pada siapa yang terlibat

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dibedakan sebagai berikut:

- a. Anggota masyarakat setempat
 - Penduduk setempat
 - Pemimpin setempat
- b. Pegawai pemerintah
 - Penduduk dalam masyarakat
 - Bukan penduduk
- c. Orang-orang luar
 - Penduduk dalam masyarakat
 - Bukan penduduk
- d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih

9. Penggolongan berdasarkan gaya partisipasi

Dibedakan menjadi tiga model praktek organisasi masyarakat yaitu:

- a. Pembangunan lokalitas
- b. Perencanaan sosial
- c. Aksi sosial

2.1.5 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988:16), bentuk-bentuk partisipasi meliputi: (1) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa; (2) sumbangan spontan berupa uang dan barang; (3) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari pihak ketiga; (4) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat; (5) sumbangan dalam bentuk kerja; (6) aksi massa; (7) mengadakan pembangunan di kalangan keluarga; dan (8) membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom. Adapun jenis-jenis partisipasinya meliputi: (1) pikiran; (2) tenaga; (3) pikiran dan tenaga; (4) keahlian; (5) barang; dan (6) uang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 pasal 15 menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dapat berbentuk:

- a. Pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;

- c. Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau;
- g. Bantuan tenaga ahli.

Dari uraian bentuk-bentuk partisipasi masyarakat diatas, maka dapat diklasifikasikan lebih lanjut variabel bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati meliputi sebagai berikut:

- Sebagai pendengar
- Pemberian sumbangan masukan/saran/usul
- Pemberian sumbangan informasi/data
- Pemberian bantuan memperjelas hak atas ruang
- Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana

2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi masyarakat

Menurut Slamet (1993:97,137-143), faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis, yaitu:

1. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam

pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarno et. al (1992) dalam Yulianti (2000:34), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak ikut berpartisipasi.

2. Usia

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan Soedarno et. al (1992) dalam Yulianti (2000:34). Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi (Slamet, 1994:142). Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan.

3. Tingkat Pendidikan

Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan. Litwin (1986) dalam Yulianti (2000:34) mengatakan bahwa, salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor

pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Barros (1993) dalam Yulianti (2000:34), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju, 1999:77-78).

5. Mata Pencarian

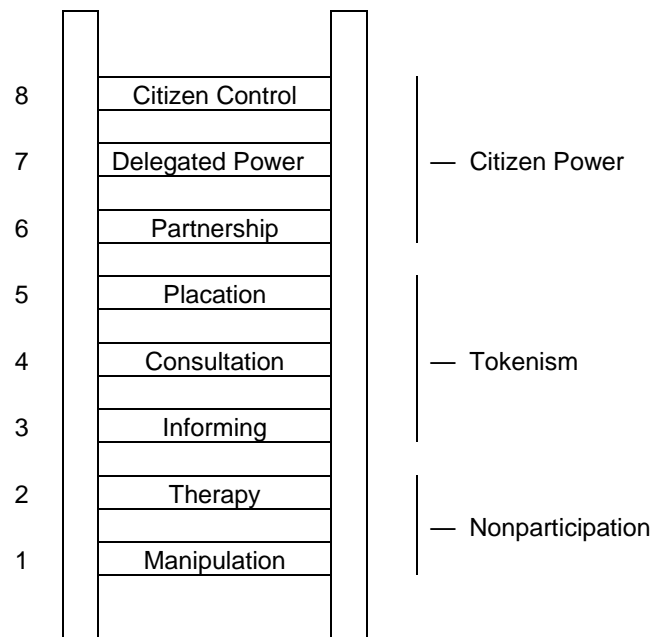
Mata pencarian ini akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencarian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

Sementara itu faktor-faktor eksternal dapat dikatakan sebagai petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program (Sunarti, 2003:79). Adapun faktor-faktor eksternal dalam

penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati ini adalah: Pemerintah, Konsultan Perencana, dan Swasta (Pengembang, LSM).

2.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Sherry Arnstein (1969) pada makalahnya yang termuat di *Journal of the American Institute of Planners* dengan judul “A Ladder of Citizen Participation”, bahwa terdapat 8 tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, sebagaimana gambar 2.1 berikut yaitu:



Sumber: Arnstein (1969)

GAMBAR 2.1
DELAPAN TANGGA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

1. *Manipulation* (manipulasi)

Tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah, yang memposisikan

masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. *Theraphy* (terapi/penyembuhan)

Dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.

3. *Informing* (informasi)

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

4. *Consultation* (konsultasi)

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide

masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan dengar pendapat dengan masyarakat.

5. *Placation* (penentruman/perujukan)

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

6. *Partnership* (kerjasama)

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

7. *Delegated Power* (pelimpahan kekuasaan)

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

8. *Citizen Control* (kontrol masyarakat)

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.

Pada tingkat 1 dan 2 disimpulkan sebagai tingkat yang bukan partisipasi atau *non participation*. Tingkat 3, 4, dan 5 disebut tingkatan penghargaan/tokenisme atau *Degree of Tokenism*. Dan tingkat 6, 7, 8 disebut tingkatan kekuatan masyarakat atau *Degree of Citizen Power*.

Sedangkan menurut Goethert (1998) dalam Imparato dan Ruster (2003:22-23) membagi 5 tingkat partisipasi yaitu:

1. *None*, artinya outsider semata-mata bertanggung jawab pada semua pihak, dengan tanpa keterlibatan masyarakat.
2. *Information or Indirect*, sama dengan tidak ada partisipasi tetapi informasi merupakan sesuatu yang spesifik.
3. *Consultation*, outsider mendasarkan atas informasi dengan tidak langsung diperoleh dari masyarakat.
4. *Shared Control*, masyarakat dan outsider berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan.
5. *Full Control*, masyarakat mendominasi dan outsider membantu ketika diperlukan.

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur tingkat partisipasi individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama-sama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan oleh Chapin (dalam Slamet, 1993:82-83), yaitu:

- a. Keanggotaan dalam organisasi
- b. Kehadiran di dalam pertemuan
- c. Sumbangan-sumbangan
- d. Keanggotaan di dalam kepengurusan
- e. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan

Sementara Goldhamer (dalam Slamet, 1993:84) mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan lima variabel yaitu:

- a. Jumlah asosiasi yang dimasuki
- b. Frekuensi kehadiran
- c. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan
- d. Lamanya menjadi anggota
- e. Tipe asosiasi yang dimasuki

Berdasarkan skala partisipasi individu tersebut, maka dapat diklasifikasikan skala yang digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati adalah:

- Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan
- Keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul
- Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana
- Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana

Menurut Moughtin (1992:17), sebagai salah satu cara untuk memahami dan mengevaluasi suatu partisipasi masyarakat serta untuk mengukur tingkat partisipasi

suatu kelompok dapat dilakukan dengan Skala Analisis Partisipasi Masyarakat (*Analytical Scale of Participation*), yaitu merupakan gabungan dari beberapa skala pengukuran yang mengindikasikan cara-cara menganalisis proses partisipasi masyarakat. Skala pengukuran tersebut adalah teknik partisipasi, tingkat partisipasi, sistem politik, unit spasial, dan bentuk perencanaan, sebagaimana tabel II.1 berikut ini.

TABEL II.1
SKALA ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT

TEKNIK PARTISIPASI	TINGKAT PARTISIPASI		PENGAMBILAN KEPUTUSAN		UNIT SPASIAL	BENTUK PERENCANAAN	
Administrasi Masyarakat	Kontrol Masyarakat	Derajad Kekuasaan Masyarakat	Anarki		Ruangan	Bukan Rencana	Bukan Rancangan Orientasi Pada Sumbu Geometris Formal-Informal Rancangan Khusus.
Kemandirian Pembangunan	Pelimpahan Kekuasaan		Demo-krasi Partisi-patif	Peme-rintah-an Demo-krasi	Rumah		
Perencanaan dan Perancangan oleh Masyarakat	Kemitraan				Jalan		
Manifesto Politik	Penentraman	Lingkungan			Rencana Inkremental		
Pertemuan Masyarakat	Konsultasi	Derajad Penghargaan	Demo-krasi Perwa-kilan	Kawasan	Pengamatan Sekilas yang Bercampur		
Penyelidikan Keadaan Masyarakat				Kota Kecil			
Permohonan Perencanaan							
Pameran/ Pertunjukkan				Informasi			
Pemberitaan Pers					Rencana Struktur		
Survei Perencanaan	Terapi	Bukan Partisipasi	Pemerintahan Totaliter		Kota Besar		
Studi Pengguna	Manipulasi				Wilayah	Rencana	
Studi Antropologi					Negara	Induk	

Sumber: Moughtin (1992:17)

1. Teknik Partisipasi: cara-cara atau bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan, terdiri dari 12 tangga, yang terendah adalah studi antropologis, lalu studi pengguna, survei perencanaan, pemberitaan pers, pameran/pertunjukan,

permohonan perencanaan, penyelidikan keadaan masyarakat, pertemuan masyarakat, manifesto politik, perencanaan dan perancangan oleh masyarakat, kemandirian pembangunan, dan administrasi masyarakat. Semakin tinggi dianggap semakin aktif tingkat partisipasinya.

2. Tingkat Partisipasi: yaitu tingkat partisipasi dalam Tangga Partisipasi dari Sherry Arnstein, terdiri dari 8 tangga, yang terendah adalah manipulasi, kemudian terapi, informasi, konsultasi, penentruman/perujukan, kerjasama/kemitraan, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol masyarakat.
3. Sistem Politik: terdiri dari 4 tingkatan dari pemerintahan yang totaliter, lalu demokrasi perwakilan, demokrasi partisipatif, dan anarki. Dari sudut pandang partisipasi, sistem politik yang sesuai berada pada tingkat pertengahan, dimana meningkatnya demokrasi adalah sebagai salah satu pentingnya partisipasi masyarakat. Sistem politik yang ideal untuk partisipasi masyarakat adalah demokrasi partisipatif dan demokrasi perwakilan, karena masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya lebih leluasa.
4. Unit Spasial (keruangan): semakin menurun/rendah tingkatannya semakin banyak jumlah individu yang tercakup, berarti semakin beragam pula keinginan masyarakat yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Hirarki yang dimaksud ada 9 mulai dari: ruang, rumah, jalan, lingkungan, kawasan, kota kecil, kota besar, wilayah, dan negara.
5. Bentuk Perencanaan: ada 6 bentuk yaitu tanpa rencana, rencana tindak, rencana inkremental, pengamatan sekilas, rencana struktur, dan rencana induk.

Partisipasi masyarakat yang baik dan cukup berarti menurut Moughtin (1992:18) dapat dilihat dalam lingkup-lingkup tertentu saja.

Dari kelima skala tersebut, skala yang memegang posisi sangat menentukan bagi skala lainnya adalah skala tingkat partisipasi. Skala yang merupakan tangga partisipasi dari Sherry Arnstein ini, dapat digunakan untuk menganalisis besarnya kekuasaan yang telah diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu pada penelitian ini yang akan dijadikan pedoman untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat adalah didasarkan pada 8 Tangga Partisipasi Masyarakat dari Sherry Arnstein.

2.3. Tata Ruang

2.3.1 Pengertian Tata Ruang

Definisi-definisi yang terkait dengan tata ruang:

- Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (UU 24/1992 pasal 1).
- Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak (UU 24/1992 pasal 1).
- Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU 24/1992 pasal 1).
- Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang (UU 24/1992 pasal 1).
- Rencana tata ruang adalah rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang di kemudian hari; rencana tersebut berdimensi tiga, dan berdimensi empat jika unsur waktu dipandang sebagai dimensi keempat; rencana tata ruang disebut berorientasi kepada kecenderungan karena memperhatikan

kecenderungan perkembangan pada waktu yang lalu, masa kini dan waktu yang akan datang (Kamus Tata Ruang, 1998:91).

- Tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggara kehidupan. Tata ruang pada hakikatnya merupakan lingkungan fisik yang mempunyai hubungan organisatoris/fungsional antara berbagai macam objek dan manusia, yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu (Rapoport dalam Kartasasmita, 1996:427).

2.3.2 Perencanaan Tata Ruang

Tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Bentuk tata ruang pada dasarnya dapat berupa alokasi letak, luas, dan atribut lain (misalnya jenis dan intensitas kegiatan) yang direncanakan dapat dicapai pada akhir periode rencana. Selain bentuk tersebut, tata ruang juga dapat berupa suatu prosedur belaka (tanpa menunjuk alokasi letak, luas, dan atribut lain) yang harus dipenuhi oleh para pelaku pengguna ruang di wilayah rencana. Namun tata ruang dapat pula terdiri dari gabungan kedua bentuk diatas, yaitu terdapat alokasi ruang dan juga terdapat prosedur (Haeruman, 2004).

Di dalam tata ruang tercakup distribusi tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Konsep tata ruang menurut Foley dalam Kartasasmita (1996:427), tidak hanya menyangkut suatu wawasan yang disebut sebagai wawasan spasial, tetapi menyangkut pula aspek-aspek non spasial atau aspaspial. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat ditentukan dan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor non fisik seperti organisasi

fungsional, pola sosial budaya, dan nilai kehidupan komunitas (Wheaton dan Porteous dalam Kartasasmita, 1996:427).

Pada kebanyakan perencanaan kota dan lingkungan, masyarakat acapkali dilihat sekadar sebagai konsumen yang pasif. Memang mereka diberi aktivitas untuk kehidupan, kerja, rekreasi, belanja dan bermukim, akan tetapi kurang diberi peluang untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dan perencanaannya (Budihardjo, 2005:8). Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai makhluk yang berakal dan berbudaya, manusia membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan terhadap habitat dan lingkungannya. Rasa tersebut merupakan faktor mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian mempertahankan atau melestarikan.

Pendekatan dengan partisipasi penduduk dalam perencanaan kota, memungkinkan keseimbangan antara kepentingan administrasi dari pemerintah setempat dan integrasi penduduk setempat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal (Jayadinata, 1986:201). Dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat 2 macam partisipasi penduduk yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horisontal. Partisipasi vertikal adalah interaksi dengan cara dari bawah ke atas (*bottom up*), sedang partisipasi horisontal adalah interaksi penduduk dengan berbagai kelompok lain.

Langkah awal penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang. Rencana tata ruang diperlukan untuk mewujudkan tata ruang yang memungkinkan semua kepentingan manusia dapat terpenuhi secara optimal. Rencana tata ruang, oleh sebab itu, merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan, bahkan merupakan persyaratan untuk dilaksanakannya pembangunan, baik bagi daerah-daerah yang sudah tinggi intensitas kegiatannya maupun bagi daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan berkembang.

Menurut Budihardjo dan Sujarto (2005:208), perencanaan tata ruang kota selama ini masih saja cenderung terlalu berorientasi pada pencapaian tujuan ideal berjangka panjang, yang sering meleset akibat banyaknya ketidakpastian. Di sisi lain terdapat jenis-jenis perencanaan yang disusun dengan landasan pemikiran pemecahan masalah secara *ad hoc* yang berjangka pendek, kurang berwawasan luas. Seyogyanya pendekatan yang diambil mencakup keduanya.

Selanjutnya dijelaskan beberapa usulan atau rekomendasi untuk peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang agar dapat berkelanjutan:

1. Agar pengelolaan dan tata ruang kota tidak lagi sekadar dilihat sebagai *management of growth* atau *management of changes* melainkan lebih sebagai *management of conflicts*.
2. Mekanisme *development control* yang ketat agar ditegakkan, lengkap dengan sanksi (dis-insentif) buat yang melanggar dan bonus (insentif) bagi mereka yang taat pada peraturan.
3. Penataan ruang kota secara total, menyeluruh dan terpadu dengan model-model *participatory planning* dan *over the board planning* atau perencanaan lintas sektoral sudah dilakukan secara konsekuen dan berkesinambungan.
4. Kepekaan sosio-kultural para penentu kebijakan dan profesional khususnya di bidang tata ruang kota dan lingkungan hidup seyogyanya lebih ditingkatkan melalui forum-forum baik secara formal maupun informal.
5. Dalam setiap perencanaan tata ruang kota dan pengelolaan lingkungan hidup agar lebih diperhatikan kekayaan khasanah lingkungan alam.
6. Peran serta penduduk dan kemitraan dengan pihak swasta agar lebih digalakkan.

7. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pada kepentingan rakyat agar dijabarkan dalam rencana dan tindakan nyata.

Perencanaan tata ruang dapat mempengaruhi proses pembangunan melalui 3 alat utama yaitu (Cadman dan Crowe, 1991:143):

1. Rencana pembangunan, yang menyediakan pengendalian keputusan melalui keputusan strategis dimana pemerintah mengadopsi rencana tata ruang untuk mengatur guna lahan dan perubahan lingkungan.
2. Kontrol pembangunan, yang menyediakan mekanisme administratif bagi perencana untuk mewujudkan rencana pembangunan setelah mengadopsi rencana tata ruang. Kontrol pembangunan ini berlaku pula bagi pemilik lahan, pengembang dan investor.
3. Promosi pembangunan, merupakan cara yang paling mudah mengetahui interaksi antara perencanaan tata ruang dengan proses pembangunan. Dalam konteks pemerintahan, maka dengan adanya rencana tata ruang, pemerintah menginginkan adanya pembangunan dan investasi di daerahnya dengan cara mempromosikan dan memasarkan lokasi, membuat lahan yang siap bangun dan menyediakan bantuan dana serta subsidi.

Pola pikir secara terpadu dalam penataan kota diperlukan, tidak saja dalam pengertian komprehensif terhadap unsur-unsur pembangunan kota namun juga mengandung pengertian terhadap pendekatan sistem yang tak terpisahkan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian (*development cycle*) dalam setiap tahap penataan kota. Artinya pada tahap perencanaan, harus berfikir tentang bagaimana mencapai rencana yang disusun (pemanfaatan), sekaligus bagaimana dapat konsisten terhadap rencana yang dirumuskan (pengendalian). Sebaliknya pada tahap

pengendalian, harus melihat ijin pelaksanaan pembangunan (pemanfaatan) dan sekaligus mengacu pada rencana yang dibuat (Pasaribu dan Suprpto, 2004:9).

Selain itu, rencana tata ruang hendaknya (Kiprah, 2001:22):

1. *Quickly yielding*, rencana tata ruang mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan daerah, menghasilkan langkah-langkah serta tahapan-tahapan dan waktu pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu tertentu.
2. *Political friendly*, demokratisasi dan transparansi sudah menjadi kebutuhan dalam seluruh rangkaian proses penyusunannya. Pengetahuan-pengetahuan rencana tata ruang mulai dari rembug desa hingga penetapan oleh DPRD sangat menentukan kewibawaan rencana tata ruang.
3. *User friendly*, mudah dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Sosialisasi perlu dilakukan terus menerus, sehingga masyarakat mudah memahami rencana dan perkembangan yang terjadi.
4. *Market friendly*, rencana tata ruang membuka peluang kepentingan dunia usaha dan rencana penanaman investasi dengan memperhatikan rencana tata guna tanah yang sesuai dengan peruntukannya.
5. *Legal friendly*, mempunyai kepastian hukum dan masyarakat dapat memperoleh kemudahan-kemudahan untuk melakukan investasinya.

Lebih lanjut, suatu rencana tata ruang akan berhasil bila memenuhi kriteria/unsur-unsur sebagai berikut:

- Disusun berdasarkan orientasi pasar.
- Rencana tata ruang memiliki peluang bagi aktor atau stakeholder mengikuti dan mengisi tata ruang tersebut.

- Mempunyai batasan-batasan yang jelas terutama menyangkut kewenangan masing-masing aktor dan stakeholder agar mempunyai kepastian hukum yang jelas.
- Disusun untuk mengurangi dampak psikologis yang berkembang di dalam masyarakat dan mengakomodasikan berbagai kepentingan pelaku pembangunan, baik kelompok minoritas (misalnya pengembang, kontraktor) maupun mayoritas (masyarakat).
- Mempunyai informasi yang jelas mengenai tahapan pelaksanaan pembangunan dan kapan rencana tersebut dilaksanakan.
- Memiliki konsep pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi yang pasti, masyarakat mengetahui alokasi pembangunan dan pengembangan, sehingga diperoleh informasi daerah/kawasan yang dapat dikembangkan dan dipertahankan.
- Disusun untuk membangun kebersamaan, memperoleh kesepakatan dengan menunjukkan pula kelemahan dan kelebihan rencana tata ruang serta dampak yang akan ditimbulkannya, baik positif maupun negatif.

2.3.3 Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Menurut Undang-Undang 24 Tahun 1992, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. Dengan melihat pembagian di atas, maka RUTRK Pati dapat dikategorikan masuk dalam tata ruang kawasan perkotaan.

Rencana tata ruang diperlukan mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten sampai ke tingkat kawasan, sesuai dengan kebutuhannya. Pada tingkat nasional, ada RTRW Nasional yang merupakan penjabaran secara keruangan arah pembangunan nasional jangka panjang dan merupakan acuan dalam penyusunan program-program pembangunan nasional jangka menengah dan jangka pendek. RTRW Provinsi merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Sedangkan RTRW Kabupaten/Kota, merupakan penjabaran RTRW provinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya pada kawasan-kawasan di bawah wilayah kabupaten/kota serta kawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya, diperlukan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.

Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan. Penanganan penataan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten, diakomodasikan perencanaannya dalam RTRW Kabupaten yang bersifat umum. Rencana tata ruang kawasan perkotaan dengan jenis kedalaman rencana umum adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan

dibudidayakan serta diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kota/rencana umum tata ruang kawasan perkotaan adalah: (1) menjaga konsistensi perkembangan kota/kawasan perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi dalam jangka panjang; (2) menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya; (3) menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.

Adapun muatan rencana tata ruang wilayah kota/rencana umum tata ruang kawasan perkotaan, meliputi:

1. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.
2. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan, meliputi:
 - a. Struktur pemanfaatan ruang yang meliputi distribusi penduduk, sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusat-pusat pelayanan permukiman perkotaan termasuk pusat pelayanan koleksi dan distribusi; sistem prasarana transportasi; sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk pengairan.
 - b. Pola pemanfaatan ruang yang meliputi kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan jasa (perniagaan, pemerintahan, transportasi, pariwisata,dll), kawasan perindustrian.
3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan mencakup upaya:
 - a. Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya.
 - b. Pengelolaan kawasan fungsional perkotaan, dan kawasan tertentu.

- c. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan dalam jangka waktu perencanaan, termasuk kawasan tertentu.
 - d. Penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya dengan memperhatikan keterpaduan sumberdaya alam dengan sumberdaya buatan.
 - e. Pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusat-pusat pelayanan permukiman perkotaan; sistem prasarana transportasi; sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengairan.
4. Pedoman pengendalian pembangunan wilayah kota/kawasan perkotaan, meliputi:
- a. Pedoman perijinan pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota/kawasan perkotaan bagi kegiatan pembangunan di wilayah kota/kawasan perkotaan (pedoman pemberian ijin lokasi).
 - b. Pedoman pemberian kompensasi, serta pemberian insentif dan pengenaan dis-insentif di wilayah kota/kawasan perkotaan.
 - c. Pedoman pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi) dan penertiban (termasuk pengenaan sanksi) pemanfaatan ruang di wilayah kota/kawasan perkotaan.

2.4. Ringkasan Teori

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat ringkasannya yang mendasari sebagai variabel penelitian, sebagaimana tabel II.2 berikut:

TABEL II.2
RUMUSAN KAJIAN LITERATUR PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

No	Pendapat	Teori	Variabel
A	Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat		
1	Keith Davis (1988)	<p>Bentuk-bentuk partisipasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. - Sumbangan spontan berupa uang dan barang. - Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari dermawan, pihak ketiga. - Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat. - Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. - Aksi massa - Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri. - Membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom. 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi - Sumbangan uang dan barang. - Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari. - Sumbangan dalam bentuk kerja. - Aksi massa - Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga. - Membangun proyek masyarakat.
2	PP 69/1996	<p>Bahwa peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai. - Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan. - Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang. - Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang. - Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang - Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau - Bantuan tenaga ahli 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian masukan - Pengidentifikasian potensi dan masalah - Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat. - Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana - Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan - Bantuan tenaga ahli
B	Faktor-Faktor Internal dan Eksternal		
3	Y. Slamet (1993)	<p>Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian.</p>	<p>Faktor-faktor internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis kelamin - Usia - Tingkat pendidikan - Tingkat pendapatan - Mata pencaharian.
4	Sunarti (2003)	<p>Faktor-faktor eksternal adalah stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program.</p>	

C	Tingkat Partisipasi Masyarakat		
5	Sherry Arnstein (1969)	<p>Bahwa terdapat 8 tangga tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manipulation (manipulasi) - Theraphy (terapi/penyembuhan) - Informing (informasi) - Consultation (konsultasi) - Placation (penentruman/perujukan) - Partnership (kerjasama) - Delegated Power (pelimpahan kekuasaan) - Citizen Control (kontrol masyarakat) 	<p>8 tangga tingkat partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manipulation - Theraphy - Informing - Consultation - Placation - Partnership - Delegated Power - Citizen Control
6	Chapin (1993)	<p>Skala partisipasi dapat diperoleh dari penilaian terhadap kriteria tingkat partisipasi sosial yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan dalam organisasi - Kehadiran di dalam pertemuan - Sumbangan-sumbangan - Keanggotaan di dalam kepengurusan - Kedudukan anggota di dalam kepengurusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan dalam organisasi - Kehadiran di dalam pertemuan - Sumbangan-sumbangan - Keanggotaan di dalam kepengurusan - Kedudukan anggota di dalam kepengurusan
7	Goldhamer (1993)	<p>Untuk mengukur partisipasi dengan menggunakan lima variabel yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah asosiasi yang dimasuki - Frekuensi kehadiran - Jumlah asosiasi dimana memangku Jabatan - Lamanya menjadi anggota - Tipe asosiasi yang dimasuki 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah asosiasi yang dimasuki - Frekuensi kehadiran - Jumlah asosiasi dimana memangku jabatan - Lamanya menjadi anggota - Tipe asosiasi yang dimasuki
8	Moughtin (1992)	<p>Untuk memahami dan mengevaluasi suatu partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan Skala Analisis Partisipasi masyarakat, yaitu gabungan dari beberapa skala pengukuran meliputi teknik partisipasi, tingkat partisipasi, sistem politik, unit spasial, dan bentuk perencanaan.</p>	<p>Skala Analisis Partisipasi masyarakat, yaitu gabungan dari beberapa skala pengukuran meliputi teknik partisipasi, tingkat partisipasi, sistem politik, unit spasial, dan bentuk perencanaan.</p>

Sumber: Hasil analisis, 2006

BAB III

KONDISI UMUM DAN PERENCANAAN TATA RUANG KOTA DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, terletak diantara $110^{\circ}, 50'$ - $111^{\circ}, 15'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}, 25'$ – $7^{\circ}, 00'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : dibatasi wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah barat : dibatasi wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- Sebelah selatan : dibatasi wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- Sebelah timur : dibatasi wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 150.368 Ha yang terdiri dari 58.739 Ha lahan sawah dan 91.629 Ha lahan bukan sawah. Kabupaten Pati terdiri atas 21 kecamatan, 400 desa dan 5 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Pati pada akhir tahun 2004 sebesar 1.218.267 orang terdiri dari penduduk laki-laki 600.700 orang dan penduduk perempuan 617.567 orang. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pati mempunyai penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebanyak 101.752 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 150.368 Ha atau 1.503,68 km², maka secara umum Kabupaten Pati mempunyai kepadatan penduduk 810 jiwa per km². Dari jumlah penduduk tersebut yang masuk dalam usia produktif (usia 15 – 64 tahun) adalah 824.563 orang, sedangkan yang

masuk dalam usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) adalah 393.704 orang.

3.2. Gambaran Umum Kecamatan Pati

3.2.1 Geografis

Kecamatan Pati merupakan satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, berada di tengah-tengah Ibukota Kabupaten Pati dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : dibatasi wilayah Kecamatan Wedarijaksa

Sebelah barat : dibatasi wilayah Kecamatan Margorejo

Sebelah selatan : dibatasi wilayah Kecamatan Gabus

Sebelah timur : dibatasi wilayah Kecamatan Juwana

Kecamatan Pati mempunyai luas wilayah 4.249 Ha terdiri dari lahan sawah seluas 2.588 Ha (60,90 %) dan lahan bukan sawah 1.661 Ha (39,10 %). Wilayahnya memiliki jenis tanah Red Yellow Mediteran, Latosol, Aluvial dan Hidromer. Termasuk tipe iklim Oldeman yaitu D2 dengan ketinggian wilayah terendah 5 m dan tertinggi 23 m dengan rata-rata 14 m dari permukaan laut. Jumlah curah hujan di Kecamatan Pati selama tahun 2004 sebanyak 1.329 mm dengan 77 hari hujan, sedangkan temperatur terendah 24⁰ C dan tertinggi 39⁰ C.

3.2.2. Pemerintahan

Kecamatan Pati terdiri atas 24 desa dan 5 kelurahan, 66 dukuh, 98 RW dan 555 RT. Menurut klasifikasinya semua desa/kelurahan sudah menjadi desa/kelurahan swasembada.

3.2.3. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Pati pada akhir tahun 2004 sebanyak 101.752 orang terdiri dari penduduk laki-laki 49.554 orang dan penduduk perempuan 52.198 orang. Jadi sex rasionya sebesar 94,93 %. Dengan luas wilayah sebesar 4.249 Ha atau 42,49 km² maka kepadatannya mencapai 2.395 jiwa/km². Banyaknya rumah tangga di Kecamatan Pati adalah 27.217 dan jumlah jiwa rata-rata tiap rumah tangga adalah 4 jiwa. Sebagaimana tabel III.1. dan III.2. berikut.

TABEL III.1
JUMLAH PENDUDUK TIAP DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN PATI TAHUN 2004

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah (jiwa)		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Panjunan	1611	1738	3349
2	Gajahmati	984	1036	2020
3	Mustokoharjo	678	689	1367
4	Semampir	676	717	1393
5	Pati Wetan	1579	1743	3322
6	Blaru	1502	1558	3060
7	Pati Kidul	3400	3699	7099
8	Plangitan	1504	1709	3213
9	Puri	2766	3002	5768
10	Winong	3255	3385	6640
11	Ngarus	882	742	1624
12	Pati Lor	3439	3885	7324
13	Parenggan	1036	1147	2183
14	Sidoharjo	1245	1268	2513
15	Kalidoro	972	1072	2044
16	Sarirejo	2305	2397	4702
17	Geritan	716	758	1474
18	Dengkek	1166	1181	2347
19	Sugiharjo	1175	1235	2410
20	Widorokandang	843	845	1688
21	Payang	1381	1526	2907

Lanjutan

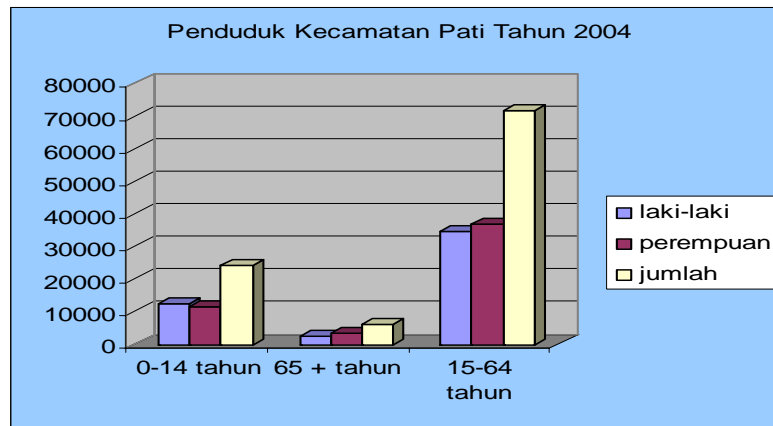
22	Kutoharjo	4772	4827	9599
23	Sidokerto	2392	2384	4776
24	Mulyoharjo	1747	1739	3486
25	Tambaharjo	2613	2757	5370
26	Tambahsari	698	706	1404
27	Ngepungrojo	1961	2115	4076
28	Purworejo	1553	1615	3168
29	Sinoman	703	723	1426
	JUMLAH	49554	52198	101752

Sumber: Kecamatan Pati dalam Angka, 2004

TABEL III.2
PENDUDUK USIA PRODUKTIF DAN TIDAK PRODUKTIF
KECAMATAN PATI TAHUN 2004

No.	Jenis Usia	Jumlah (orang)		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
A.	Usia Tidak Produktif			
1.	0-14 tahun	12.410	11.744	24.154
2.	65 + tahun	2.530	3.579	6.109
	Jumlah A	14.940	15.323	30.263
B.	Usia Produktif			
1.	15-64 tahun	34.614	36.875	71.489
	Jumlah B	34.614	36.875	71.489
	Jumlah A + B	49.554	52.198	101.752

Sumber: Kecamatan Pati dalam Angka, 2004

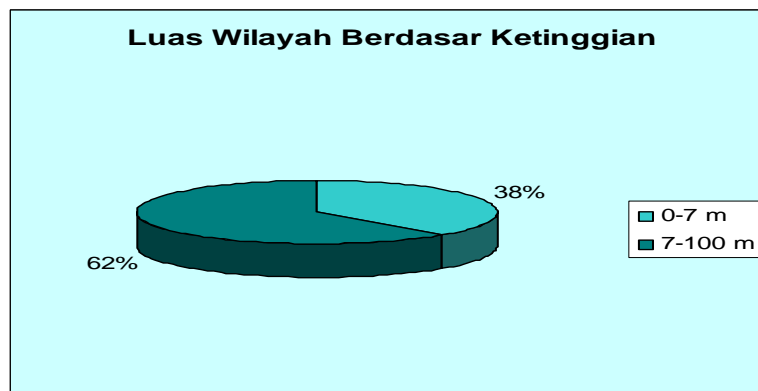


Sumber: Kecamatan Pati dalam Angka, 2004

GAMBAR 3.1
DIAGRAM BATANG JUMLAH PENDUDUK
KECAMATAN PATI TAHUN 2004

3.2.4. Topografi

Kecamatan Pati memiliki struktur ketinggian yang bervariasi yaitu berkisar 0-100 m. Berdasarkan kemiringan yang dimiliki maka dapat diketahui bahwa kontur kota ini termasuk kepada daerah datar yang pada saat ini banyak dimanfaatkan sebagai daerah pertanian dan permukiman. Adapun luas wilayah Kecamatan Pati berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut, memiliki ketinggian 0-7 m seluas 1600 Ha (37,66%) dan ketinggian 7-100 m seluas 2649 Ha (62,34%).

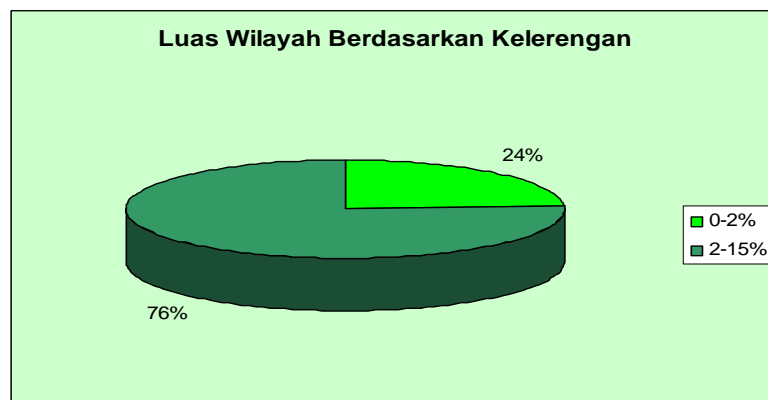


Sumber: Kecamatan Pati dalam Angka, 2004

GAMBAR 3.2
DIAGRAM LUAS WILAYAH BERDASARKAN KETINGGIAN

3.2.5. Kelerengan

Wilayah Kecamatan Pati memiliki kontur landai yaitu berkisar 0-2% dan 2-15 %. Wilayah Kecamatan Pati yang memiliki kemiringan berkisar 0-2% adalah 1025 Ha (24,12%). Sedangkan yang memiliki kemiringan berkisar 2-15% berjumlah 3224 Ha (75,88%). Melihat lahan di Kecamatan Pati yang sebagian besar merupakan wilayah dengan morfologi datar (0-2% dan 2-15%), maka lahan tersebut dapat difungsikan sebagai kawasan terbangun (permukiman, perdagangan, perkantoran, dan lain-lain), karena dengan kondisi tersebut memiliki daya dukung tanah terhadap bangunan. Hal ini didasarkan pada tingkat erosi tanah pada kemiringan tersebut kecil.



Sumber: Kecamatan Pati dalam Angka, 2004

GAMBAR 3.3
DIAGRAM LUAS WILAYAH KECAMATAN PATI
BERDASARKAN KELERENGAN

3.2.6. Pola Pemanfaatan Lahan

Penggunaan lahan di Kecamatan Pati didominasi peruntukan sebagai lahan basah atau lahan sawah yaitu seluas 2.587,665 Ha (60,90%); sedangkan penggunaan

sebagai lahan kering (bukan lahan sawah) seluas 1.661,635 Ha (39,10%).

Penggunaan lahan sawah di Kecamatan Pati didominasi oleh penggunaan sebagai sawah irigasi teknis seluas 1.152,752 Ha yang diikuti oleh lahan sawah irigasi semi teknis seluas 772,854 Ha dan sawah irigasi sederhana adalah 522,059 Ha serta tadah hujan seluas 140,000 Ha. Sedangkan penggunaan lahan kering didominasi oleh peruntukan sebagai lahan bangunan dan pekarangan seluas 1.421,041 Ha; kemudian diikuti peruntukan sebagai lahan tegal/kebun seluas 87,453 Ha dan tambak/kolam seluas 19,742 Ha, serta tanah lainnya seluas 133,399 Ha.

TABEL III.3
PENGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN PATI TAHUN 2004

Uraian			Kecamatan Pati	
			Luas (ha)	Prosentase
I.	TANAH SAWAH		2.587,665	60,90
	1	Irigasi Teknis	1.152,752	27,13
	2	Irigasi 1/2 Teknis	772,854	18,20
	3	Irigasi sederhana	522,059	12,28
	4	Tadah Hujan	140	3,29
	5	Lainnya	-	-
II.	TANAH BUKAN SAWAH		1.661,635	39,10
	1	Bangunan/Halaman	1.421,041	33,44
	2	Tegal/Kebun	87,453	2,06
	3	Tambak,Kolam	19,742	0,46
	4	Hutan Negara	-	-
	5	Perkebunan	-	-
	6	Lainnya	133,399	3,14
Jumlah			4.249,30	100,00

Sumber: Kecamatan Pati dalam Angka, 2004

Secara keseluruhan pola pemanfaatan lahan di kecamatan Pati masih didominasi oleh aktivitas pertanian. Hal ini dapat dilihat dari besarnya proporsi lahan pertanian terutama sawah irigasi teknis. Kawasan pertanian khususnya sawah irigasi teknis merupakan salah satu hambatan tersendiri dalam pengembangan kawasan perkotaan.

Sementara itu pemanfaatan lahan untuk kegiatan permukiman dan komersial masih terpusat pada daerah pusat kota. Kegiatan perdagangan dan jasa masih memusat pada beberapa ruas jalan utama dan simpul-simpul jalan di Kota Pati. Pola pemanfaatan lahan ini tentunya kurang optimal dalam menopang pertumbuhan Kota Pati. Penyebaran aktivitas perdagangan dan jasa juga mulai berkembang menuju daerah pinggiran kota. Namun perkembangan yang terjadi masih secara linier mengikuti jalan regional yang ada di Kota Pati.

Dalam pengembangan kota Pati lebih lanjut perlu dipertimbangkan kebutuhan untuk menarik aktivitas perkotaan ke daerah yang belum maju. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru atau dengan memindahkan aktivitas-aktivitas yang ada didalam kota. Aktivitas perkotaan yang mungkin dipindahkan antara lain adalah aktivitas industri, perdagangan dan jasa, serta terminal. Dengan memanfaatkan rencana Jalan Lingkar Pati, aktivitas-aktivitas perkotaan yang lebih membutuhkan akses ke jalan regional dapat dikembangkan mendekati jalan lingkar Kota Pati.

Namun dalam pengembangan pusat pertumbuhan baru ini perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Mengingat luasnya lahan sawah irigasi teknis yang masih produktif diperlukan pembatasan konversi lahan pertanian di Kota Pati. Untuk mencegah terjadinya

konversi yang tidak terkendali, maka perlu diadakan perencanaan dan pengawasan dalam hal pemanfaatan lahan.

3.3. Tata Ruang Kota Pati

3.3.1. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana tata ruang ditinjau kembali dan atau disempurnakan sesuai dengan jenis perencanaannya secara berkala. Namun peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak yang dimiliki orang.

Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; (2) aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang.

Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

3.3.2. Kegiatan Penataan Ruang Kota Pati

Kegiatan penataan ruang di Kota Pati dimulai pada tahun 1984/1985 yang dikenal dengan nama Rencana Induk Kota (RIK) Pati, dan telah disahkan dengan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985. Rencana Induk Kota disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Istilah Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) mulai dikenal pada tahun 1985 dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tugas-Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. Dalam SKB tersebut antara lain dinyatakan, bahwa tugas dan tanggung jawab bidang administrasi perencanaan kota berada pada Departemen Dalam Negeri, sedangkan tugas dan tanggung jawab bidang tata ruang (teknik planologi) dalam perencanaan kota berada pada Departemen Pekerjaan Umum.

Menyusuli SKB tersebut, Menteri Pekerjaan Umum kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota. Demikian pula Menteri Dalam Negeri, berdasarkan SKB tersebut mengganti Permendagri 4 tahun 1980 dengan Permendagri 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Setelah berlaku selama sekitar 10 (sepuluh) tahun, RIK Pati kemudian diadakan revisi pada tahun 1993/1994. Meskipun pada saat itu telah terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, akan tetapi ternyata pelibatan masyarakat dalam penyusunan revisi RIK Pati belum dilaksanakan, karena Peraturan Pemerintah nomor 69 yang mengatur tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang baru terbit pada tahun 1996 dan Permendagri 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah baru terbit pada tahun 1998.

Terakhir kali RIK Pati diadakan revisi pada tahun 2004, yang sebutannya menjadi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pati. Pada saat pelaksanaan revisi tahun 2004 tersebut, telah digunakan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota. Pada saat itu juga menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Kimpraswil Nomor: 327/KPTS/M/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, Lampiran VI Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

Dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta instansi terkait di daerah. Untuk itu diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Keputusan Mendagri ini kemudian ditindaklanjuti di Daerah dengan Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pati dengan Keputusan Bupati Pati Nomor: 050/729/2004 tanggal 17 September 2004. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Pati Nomor: 050/2/2005 tanggal 6 September 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pati.

3.4. Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati

3.4.1. Tujuan Penataan Ruang Kota Pati

Tujuan penataan ruang Kota Pati adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan.
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

- Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

3.4.2 Konstelasi Kota Pati

Fungsi dan peranan Kota Pati dalam skala regional dapat diketahui dari analisis regional, baik dalam lingkup Provinsi maupun lingkup wilayah Kabupaten Pati. Kegunaan analisis skala regional ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan yang dapat dilayani oleh Kota Pati untuk pelayanan skala regional, dan sejauh mana pengaruh Kota Pati terhadap daerah belakangnya.

Kota Pati dalam wilayah Kabupaten Pati berperan sebagai Ibukota Kabupaten. Peranan ini mengandung makna yang sangat penting, yaitu : Kota Pati menjadi pusat pemerintahan wilayah Kabupaten Pati, artinya Kota Pati menjadi pusat pelayanan masyarakat bagi kepentingan-kepentingan yang berskala kabupaten. Sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, maka kebijakan pengembangan kota Pati harus mencerminkan fungsinya.

Sebagaimana layaknya kota-kota di Indonesia pada umumnya, bahwa kota-kota pusat pemerintahan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Peranan ekonomi Kota Pati dalam lingkup regional adalah di tetapkannya Kota Pati sebagai kawasan pertumbuhan cepat Juwana-Pati. Kawasan pertumbuhan cepat Juwana-Pati berfungsi sebagai koridor perkotaan di pantai utara bagian timur yang bertumpu pada

sektor industri, perikanan, dan pertanian. Dalam RTRWP Jawa Tengah, Kota Pati juga termasuk dalam kawasan kerjasama strategis Wanarakuti (Juwana-Jepara-Kudus-Pati) dengan kota-kota utama pada kawasan ini adalah Kota Kudus, Pati dan Jepara. Untuk mendukung kegiatan ekonomi berupa arus barang dan jasa maka kapasitas dan jenis sarana dan prasarana yang ada saat ini hendaknya terus ditambah dan diperbaiki sistem pelayanannya. Kota Pati termasuk kota dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi wilayah sekitarnya.

3.4.3 Kedudukan Kota Pati

Kedudukan Kota Pati terletak pada posisi yang cukup strategis dalam pengembangan perwilayahan Kabupaten Pati maupun Provinsi Jawa Tengah. Posisi strategis ini antara lain meliputi:

- Kota Pati terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Pati. Kondisi ini sangat mendukung peranan kota Pati sebagai pusat pelayanan, pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi wilayah.
- Secara geografis terletak berdekatan dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Kota ini merupakan pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, sosial dan budaya bagi wilayah-wilayah di Jawa Tengah. Terutama bagi sebagian penduduk di daerah pantura Jawa Tengah bagian timur, tentu akan melalui jalur pada Kota Pati jika menuju ke Kota Semarang. Oleh karena itu banyak terdapat peluang terutama di bidang perdagangan, jasa, pariwisata, atau kegiatan lain.
- Jalur regional Semarang – Surabaya menunjang peranan Kota Pati sebagai sub transit regional.

3.4.4 Pengaruh Kebijakan Sektoral dan Regional

Kawasan perkotaan Pati sebagai bagian dari wilayah nasional, pembangunannya sangat dipengaruhi daerah disekitarnya. Hubungan dan keterkaitan pembangunan antar wilayah tersebut diatur dalam kebijakan nasional hingga daerah. Sehingga pembangunan di Wilayah Kota Pati sangat dipengaruhi beberapa kebijakan mulai dari Kebijakan Pembangunan Nasional sampai Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Keberadaan arahan kebijakan pembangunan nasional dalam pengembangan wilayah dan daerah ditegaskan dengan skenario ruang nasional yang diarahkan pada skenario pemerataan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi, sosial budaya, penduduk dan pusat-pusat kegiatan. Dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan ini perlu diupayakan penyebaran kegiatan ekonomi diseluruh nasional sesuai dengan potensi dari masing-masing wilayah. Setiap daerah dalam wilayah nasional memiliki potensi tertentu yang harus mampu dikembangkan oleh daerah itu sendiri sehingga potensi tersebut dapat menjadi modal dalam mengembangkan wilayah. Hal ini harus didorong dengan peningkatan investasi. Investasi pembangunan daerah ini harus diarahkan pada kawasan-kawasan tertentu yang memiliki potensi besar namun secara umum masih dianggap kawasan yang relatif tertinggal.

Selain itu juga pengembangan prasarana wilayah khususnya jalan darat yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa terutama Semarang – Surabaya juga akan mempengaruhi perkembangan Kota Pati karena jalur strategis tersebut itu melintasi dan melalui wilayah Kota Pati. Keberadaan jalur ini menjadi salah satu urat nadi pergerakan barang, jasa dan manusia di pulau Jawa sehingga arus pergerakan

yang melalui Kota Pati ini menjadi potensi pengembangan kawasan kota khususnya untuk perhubungan, perdagangan dan jasa serta pariwisata dapat dioptimalkan dengan dukungan potensi jalur strategis tersebut.

Pada hakekatnya, arah pembangunan Kota Pati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan regional, sehingga pelaksanaannya harus merupakan penerapan serta pelengkap dari pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu pembangunan Kota Pati diarahkan pada pembangunan prasarana perhubungan, pengembangan ekonomi lokal dan pemerataan aktifitas atau kegiatan ke arah pinggiran kota.

Sementara itu masalah pembangunan yang ditemui di Kota Pati meliputi struktur kegiatan kota, perkembangan kawasan terbangun, percampuran pergerakan lokal-regional, perparkiran, ruang publik, konversi lahan, dan perkembangan kegiatan industri.

3.4.5 Konsep Pengembangan Tata Ruang Kota Pati

Pola jaringan jalan kota Pati berbentuk radial konsentrik (pola jalan melingkar dengan beberapa jari-jari yang bertemu di kawasan pusat kota). Jalan radial saat ini dimanfaatkan sebagai jalur regional sedangkan jari-jarinya sebagian berfungsi sebagai jalan dalam kota dan sebagian berfungsi sebagai penghubung antara Kota Pati dengan daerah disekitarnya.

Berdasarkan bentuk kawasan terbangun, bentuk Kota Pati mengarah pada bentuk *fragmented cities*, artinya:

- Areal perkotaan tumbuh terpisah (*enclaves*) dengan kota induknya akibat lahan pertanian.

- Kenampakan kawasan baru di kelilingi areal pertanian, namun terhubung dengan kota induknya.

Perkembangan kota dengan bentuk diatas yang perlu diperhatikan adalah pola interkoneksi antar kawasan perkotaan yang tersebar. Antar kawasan harus dihubungkan jaringan jalan yang mampu berfungsi sebagai penghubung antar kegiatan ekonomi yang ada di masing-masing kawasan.

Sementara itu pembuatan jalan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang tersebar dapat menyebabkan tumbuhnya kawasan terbangun disepanjang koridor jalan. Tumbuhnya koridor kawasan terbangun ini harus dicermati dengan hati-hati supaya perkembangannya tidak menyebabkan pembebanan yang terlalu besar ruas-ruas jalan interkoneksi.

Dari uraian diatas maka selanjutnya konsep penataan ruang Kota Pati adalah:

3.4.5.1 Konsep Pengembangan Kota

Melihat potensi kondisi eksisting dan pentingnya keterkaitan pengembangan wilayah kota Pati dengan daerah sekitarnya, maka untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Pati, konsep pengembangan kotanya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan wilayah kota Pati menjadi wilayah pengembangan kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, kegiatan industri, kegiatan pertanian, dan pendidikan.
- b. Mengembangkan pusat pelayanan perkotaan yang mampu mendorong kegiatan dalam rangka otonomi daerah dan peran dalam mendukung keterkaitan desa-kota.

- c. Mengurangi konflik ruang antar kegiatan fungsional dengan selalu memperhatikan kelestarian sumber daya.
- d. Mengembangkan pusat pelayanan strategis terutama kawasan sekunder untuk penguatan pusat-pusat Bagian Wilayah Kota (BWK).

Konsep diatas dapat digunakan sebagai dasar untuk mendukung upaya penyebaran, perkembangan dan pertumbuhan sebaran lokasi strategis dan lingkungan terbangun di Kota Pati tanpa meninggalkan karakteristik Kota Pati.

3.4.5.2 Konsep Struktur Tata Ruang Kota

Konsep struktur ruang kota dengan memanfaatkan jalur arteri primer sebagai jalur utama. Jalan arteri primer sebagai jalur yang menghubungkan Kota Semarang-Surabaya. Untuk mengembangkan ke wilayah-wilayah Kota Pati yang belum berkembang maka perlu pengembangan jaringan jalan yang menjangkau wilayah tersebut.

Bentuk jaringan yang dikembangkan berbentuk radial konsentrik dengan tujuan ada penyebaran kegiatan yang lebih merata kearah pinggiran kota. Untuk memberikan jalur alternatif regional dan mengurangi kesemrawutan pergerakan di pusat kota maka dibuat jalur lingkaran. Jalan kolektor primer sebagai penghubung Kota Pati dengan kota-kota disekitarnya antara lain jalan menuju Jepara, Tayu, dan Purwodadi.

3.4.5.3 Konsep Pola Pemanfaatan Lahan

Secara umum pola pemanfaatan lahan di Kota Pati bersifat mengelompok

pada wilayah dengan karakteristik yang sama (kawasan campuran tetapi ada fungsi yang dominan). Adapun pola pemanfaatan lahan yang akan diterapkan adalah pola intensifikasi lahan yaitu mengintensifkan pemanfaatan lahan yang dapat dikembangkan untuk kawasan terbangun, dengan tetap menjaga kelestarian lahan-lahan yang difungsikan sebagai kawasan lindung dan kawasan pertanian beririgasi teknis.

3.4.6 Strategi Pengembangan Tata Ruang Kota Pati

3.4.6.1 Kawasan Lindung

Secara umum strategi pengembangan kawasan berfungsi lindung adalah pemulihan, pemeliharaan dan pengkayaan. Pemulihan adalah upaya untuk memulihkan lahan-lahan lindung yang rusak atau dikembalikan fungsi lindungnya. Cakupan kawasan lindung untuk fungsi perlindungan di wilayah bawahannya, perlindungan setempat, perlindungan rawan bencana harus jelas dalam alokasi dan fungsinya. Kawasan lindung yang terbentuk di wilayah kota merupakan satu kesatuan alam yang sudah terbentuk dengan sendirinya sehingga tidak mengenal batas-batas administrasi dan mengikuti alur kawasan lindung. Kawasan Lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam. Di kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya.

Secara ruang kawasan lindung meliputi kawasan air, tanah dan udara sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mengisi dalam proses pelestarian lingkungan/alam. Untuk pengembangan kawasan lindung harus memperhatikan keterkaitan lingkungan air, tanah dan udara.

3.4.6.2 Kawasan Budidaya

Berdasarkan pada rencana pengembangan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, Kota Pati ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah dan pusat pemerintahan kabupaten. Kawasan Budidaya merupakan kawasan yang dikembangkan secara intensif untuk kegiatan budidaya (pengembangan sumber daya alam). Secara umum pengembangan tersebut berorientasi pada optimalisasi sumber daya dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara regional dan lokal harus mempunyai sinergi dan seimbang, baik secara pengembangan kawasan yaitu dengan penentuan pusat-pusat pelayanan kawasan. Pengembangan ini harus memperhatikan potensi-potensi yang ada sebagai aset dan sumber pengembangan wilayah-wilayah baru. Sehingga diharapkan pengembangan wilayah tidak hanya memperhatikan keterkaitan antar wilayah/daerah tetapi juga memperhatikan harmonisasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan.

Konsep tersebut secara umum dapat digambarkan sebagai upaya menyeimbangkan antara pengembangan ruang kawasan dengan kegiatan-kegiatan lokal dan pengembangan wilayah yang bersifat perkotaan dan perdesaan sebagai optimalisasi penggalan sumberdaya serta optimalisasi pemanfaatan, di samping unsur pengendalian dan pengawasan yang didukung oleh sistem perencanaan yang terpadu.

3.4.6.3 Struktur Tata Ruang

Strategi pengembangan struktur ruang diupayakan dapat dilakukan untuk dapat mendukung pola keterkaitan antar ruang berupa kegiatan dan pusat-pusat

kegiatan yang akan dikembangkan. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan:

- Struktur ruang yang terbentuk
- Ketersediaan dan rencana jaringan prasarana
- Kegiatan potensial setiap kawasan

Selanjutnya strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah kota Pati secara lebih spesifik dimaksudkan untuk mengarahkan sistem pusat-pusat permukiman sesuai dengan hirarki dan fungsinya dalam konteks pengembangan wilayah kota yang terintegrasi dengan memacu pengembangan pusat-pusat kegiatan kota. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah kota secara umum adalah dengan peningkatan aktifitas dimana peningkatan aktifitas dapat dilihat sebagai peningkatan sarana dan prasarana wilayah kota yang tersedia untuk mendukung aktifitas utama ekonomi.

3.4.6.4 Hirarki Pusat Pelayanan

Hirarki pusat-pusat pelayanan dimaksudkan untuk dapat menentukan suatu sistem jenjang pelayanan yang dikaitkan dengan pusat pelayanan dengan daerah pelayanan. Strategi pengembangan pusat pelayanan diarahkan untuk lebih memantapkan dan memperjelas hirarki berdasarkan kondisi nyata kawasan-kawasan dan tetap memperhatikan tata jenjang pelayanan yang lebih tinggi tingkatannya dengan tujuan pemerataan pusat-pusat pelayanan yang efektif dan efisien.

Hirarki pusat-pusat pelayanan di Kota Pati diharapkan dapat mewujudkan pengembangan wilayah secara merata. Peningkatan peran pusat pelayanan yang

dikembangkan, dapat dilakukan dengan melalui penyediaan sarana dan prasarana kota yang dibutuhkan sesuai dengan peran fungsi kotanya, disamping juga memberikan sarana-prasarana khusus sebagai penarik aktifitas.

3.4.6.5 Sistem Sarana dan Prasarana

Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana diarahkan untuk dapat mewujudkan pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah kota sesuai dengan potensi dan kendalanya serta pemenuhan pelayanan kebutuhan yang efektif dan efisien, Pemerataan pertumbuhan ini dapat dicapai dengan peningkatan sistem jaringan transportasi yang dapat menghubungkan antara wilayah yang relatif maju dengan kawasan yang akan dikembangkan.

Sistem jaringan lain yang juga perlu ditingkatkan yaitu untuk mendukung sistem informasi dan alur energi yang seimbang guna mendukung kawasan-kawasan potensial untuk pengembangan sektor-sektor unggulan dan strategis yang mungkin dapat dikembangkan.

3.4.7 Pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK)

Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Kota Pati, daya tarik menarik antar kawasan dan pertimbangan perkembangan Kota Pati untuk waktu yang akan datang, maka wilayah Kota Pati dibagi menjadi 4 Bagian Wilayah Kota (BWK). Adapun fungsi dan kelurahan/desa yang masuk kedalam masing-masing BWK adalah:

1. **BWK Pusat Kota:** wilayahnya meliputi Kelurahan Pati Wetan, Kelurahan Pati Kidul, Desa Plangitan, Desa Puri, Desa Winong, Desa Ngarus, Kelurahan Pati

Lor, Kelurahan Parenggan, dan Kelurahan Kalidoro.

Fungsi utama yang mendukung/ yang dikembangkan di BWK Pusat Kota meliputi:

- Kantor pelayanan pemerintahan skala kabupaten
- Perdagangan dan jasa skala pelayanan regional.
- Pendidikan skala pelayanan regional
- Permukiman Perkotaan

2. **BWK I:** wilayahnya meliputi Desa Sidokerto, Desa Sukoharjo, Desa Muktiharjo dan sebagian Desa Badegan.

Fungsi utama yang mendukung/ yang dikembangkan di BWK I meliputi:

- Fasilitas olah raga dan rekreasi skala kabupaten
- Fasilitas sosial dan ekonomi skala pelayanan BWK
- Pengembangan permukiman perkotaan
- Pertanian perkotaan

3. **BWK II:** wilayahnya meliputi Desa Gajahmati, Desa Mustokoharjo, Desa Semampir, Desa Sidoharjo, Desa Sarirejo, Desa Geritan, Desa Dengkek, Desa Sugiharjo, Desa Widoro Kandang, dan Desa Kutoharjo.

Fungsi utama yang mendukung/ yang dikembangkan di BWK II meliputi:

- Fasilitas kesehatan skala regional
- Kawasan militer.
- Industri
- Fasilitas sosial dan ekonomi skala pelayanan BWK

- Pengembangan permukiman perkotaan
 - Pertanian perkotaan
4. **BWK III:** wilayahnya meliputi Desa Panjunan, Desa Blaru, Desa Sukokulon, Desa Jimbaran, Desa Ngawen, Desa Margorejo, Desa Penambuhan, Desa Langenharjo, dan Desa Dadirejo.

Fungsi utama yang mendukung/yang dikembangkan di BWK III meliputi:

- Fasilitas Transportasi skala pelayanan regional
- Industri.
- Fasilitas sosial dan ekonomi skala pelayanan BWK
- Pengembangan permukiman perkotaan
- Pertanian perkotaan

3.5 Proses Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati

Tahap I: Persiapan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melalui BAPPEDA mengumumkan kepada masyarakat akan diadakannya rencana penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati melalui papan pengumuman, lewat forum pertemuan, lewat surat selebaran pengumuman ke desa/kelurahan yang masuk dalam wilayah perencanaan, dan surat pemberitahuan kepada Camat Pati dan Dinas/Instansi se-Kabupaten Pati.
2. BAPPEDA membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati, yang melibatkan Dinas/Instansi terkait dan bekerjasama dengan

konsultan perencanaan.

Tahap II: Penyusunan Rencana

3. Pekerjaan penyusunan Laporan Pendahuluan oleh konsultan perencanaan.
Kegiatan ini meliputi observasi lapangan, penentuan metodologi, penyusunan rencana kerja, dan survei awal untuk pemahaman kondisi wilayah.
4. Pembahasan Laporan Pendahuluan oleh Tim Teknis bersama pihak konsultan dan dinas teknis tingkat provinsi. Selanjutnya diadakan revisi terhadap Laporan Pendahuluan oleh konsultan setelah mendapatkan masukan/saran dari Tim Teknis.
5. Kegiatan survei data melalui survei data instansional dan survei lapangan oleh konsultan.
 - Survei data instansional, berupa pengumpulan dan atau perekaman data dari instansi-instansi. Hasilnya adalah uraian fakta dan informasi baik dalam bentuk data angka atau peta mengenai keadaan regional dan kota keseluruhan.
 - Survei lapangan, untuk menguji kebenaran fakta informasi yang diperoleh dari survei instansional dan untuk mengetahui keadaan lapangan yang sebenarnya. Hasilnya adalah berupa peta-peta. Untuk lingkup regional, data yang perlu dipetakan adalah letak instalasi vital, pusat-pusat permukiman dan potensi lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota. Untuk lingkup lokal, data yang perlu dipetakan antara lain penggunaan/pemanfaatan tanah, kondisi bangunan/lingkungan, kondisi jalan dan sanitasi.
6. Penjaringan Aspirasi Masyarakat I
Merupakan suatu kegiatan dengan melibatkan banyak pihak (masyarakat,

swasta, dan instansi), untuk mendapatkan masukan/saran/usul. Dari pihak masyarakat diwakili oleh kepala desa/kelurahan dan wakil masyarakat dari tiap desa/kelurahan di wilayah perencanaan. Tujuannya adalah untuk menentukan arah pengembangan wilayah dan identifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan. Dalam hal ini penyampaian masukan publik dapat secara lisan, maupun tertulis pada saat forum pertemuan. Pemberian masukan berupa data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA.

- Dalam penentuan arah pengembangan, diperlukan peninjauan terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan.
- Dalam melakukan identifikasi potensi dan masalah pembangunan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: perkembangan sosial kependudukan, prospek pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, daya dukung prasarana dan fasilitas perkotaan.

7. Pekerjaan penyusunan Kompilasi dan Analisa Data (Laporan Antara) oleh konsultan.

Penyusunan Laporan Kompilasi dan Analisa Data (Laporan Antara) ini dilakukan oleh konsultan setelah melaksanakan survei sekunder dan primer serta setelah memperoleh masukan/saran/usulan/data/informasi dari masyarakat pada saat Penjaringan Aspirasi Masyarakat I.

8. Pembahasan Laporan Kompilasi dan Analisa Data (Laporan Antara) oleh Tim Teknis bersama pihak konsultan dan dinas teknis tingkat provinsi. Selanjutnya diadakan revisi terhadap Laporan Kompilasi dan Analisa Data (Laporan Antara) oleh konsultan setelah mendapatkan masukan/saran dari Tim Teknis.

9. Penjaringan Aspirasi Masyarakat II

Merupakan suatu kegiatan dengan melibatkan banyak pihak (masyarakat, swasta, dan instansi), untuk mendapatkan masukan/saran/usul. Dari pihak masyarakat diwakili oleh kepala desa/kelurahan dan wakil masyarakat dari tiap desa/kelurahan di wilayah perencanaan. Tujuannya adalah untuk menentukan arah pengembangan wilayah dan identifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan. Dalam hal ini penyampaian masukan publik dapat secara lisan maupun tertulis pada saat forum pertemuan. Pemberian masukan berupa data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA.

10. Pekerjaan penyusunan Draft Rencana oleh konsultan.

Dalam perumusan rencana tata ruang, mencakup kegiatan: perumusan tujuan pembangunan kawasan perkotaan, perkiraan kebutuhan pengembangan dan perumusan rencana tata ruang. Perumusan rencana merupakan pengejawantahan dari tujuan pengembangan serta perkiraan kebutuhan pengembangan. Dengan demikian rencana umum ini akan merupakan pedoman bagi hasil pencapaian tujuan pengembangan yang telah berhasil diformulasikan. Rencana umum ini merupakan acuan pengembangan kawasan perkotaan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman bagi perencanaan tata ruang kota, khususnya bagi perumusan visi pengembangan kota.

Pokok-pokok pekerjaan penyusunan Draft Rencana ini antara lain:

- Menyusun rancangan Draft Rencana untuk disajikan dan dibahas dalam forum seminar, dengan maksud memperoleh masukan untuk perbaikan dan mendengar serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

- Merumuskan kebijakan dasar rencana kota.
- Merumuskan kebijakan operasional dalam bentuk rencana-rencana fisik kota, antara lain rencana penggunaan tanah, rencana indikasi unit pelayanan kota, rencana fasilitas pelayanan dan prasarana, rencana pentahapan dan pengelolaan pembangunan.

Pekerjaan penyusunan Draft Rencana oleh konsultan dilaksanakan dengan memperhatikan masukan/saran/usul/data/informasi dari masyarakat pada saat Penjaringan Aspirasi Masyarakat II.

11. Pembahasan Laporan Draft Rencana oleh Tim Teknis bersama pihak konsultan dan dinas teknis tingkat provinsi. Selanjutnya diadakan revisi terhadap Laporan Draft Rencana oleh konsultan setelah mendapatkan masukan/saran dari Tim Teknis.
12. Seminar/semiloka Rancangan Rencana
Merupakan suatu kegiatan dengan melibatkan banyak pihak (masyarakat, Dinas/Instansi, LSM, swasta dan Dinas teknis tingkat Provinsi), untuk mendapatkan masukan/saran/usul. Dari pihak masyarakat diwakili oleh kepala desa/kelurahan dan wakil masyarakat dari tiap desa/kelurahan di wilayah perencanaan. Tujuannya adalah untuk pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang dan pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang.
13. Pengumuman/Sosialisasi Rancangan Rencana kepada masyarakat lewat forum pertemuan dan papan pengumuman.
 - Terhadap rancangan rencana, masyarakat dapat berpartisipasi berbentuk pengajuan keberatan. Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas dan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

serta dilaksanakan sesuai peraturan. Pengajuan dapat diajukan secara tertulis maupun lisan disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA.

- Kompilasi saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan dari masyarakat terhadap Rancangan Rencana baik secara lisan, tulisan maupun lewat forum pertemuan.

14. Penyempurnaan Rancangan Rencana oleh Tim Teknis bekerjasama dengan Pihak Konsultan. Dengan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat dan hasil pembahasan dalam forum seminar/lokakarya, maka dilaksanakan perumusan perencanaan tata ruang kota menjadi dokumen Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pati.

Tahap III: Penetapan Rencana

15. Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pati.
16. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah, Dokumen RUTRK dan berita acara kepada DPRD Kabupaten Pati.

TABEL III.4
PELAKU-PELAKU YANG BERPERAN DALAM PROSES PENYUSUNAN
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

NO	KEGIATAN	PELAKU		
		PEMERINTAH	MASYARAKAT	KONSULTAN
A	Tahap I: Persiapan			
1	Pengumuman	√	-	-
2	Pembentukan Tim Teknis	√	-	-
B	Tahap II: Penyusunan Rencana			
3	Penyusunan Laporan Pendahuluan	-	-	√

Lanjutan

4	Pembahasan Laporan Pendahuluan	√	-	√
5	Survei instansional dan lapangan	-	√	√
6	Penjaringan Aspirasi Masyarakat I	√	√	√
7	Penyusunan Laporan Kompilasi dan Analisa Data (Laporan Antara)	-	-	√
8	Pembahasan Laporan Kompilasi dan Analisa Data (Laporan Antara)	√	-	√
9	Penjaringan Aspirasi Masyarakat II	√	√	√
10	Penyusunan Draft Rencana	-	-	√
11	Pembahasan Laporan Draft Rencana	√	-	√
12	Seminar/Lokakarya Rancangan Rencana	√	√	√
13	Sosialisasi Rancangan Rencana	√	√	√
14	Penyempurnaan rancangan rencana menjadi Rencana	√	-	√
C	Tahap III: Penetapan Rencana			
15	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah	√	-	-
16	Penyampaian Rancangan Perda dan Rencana	√	-	-

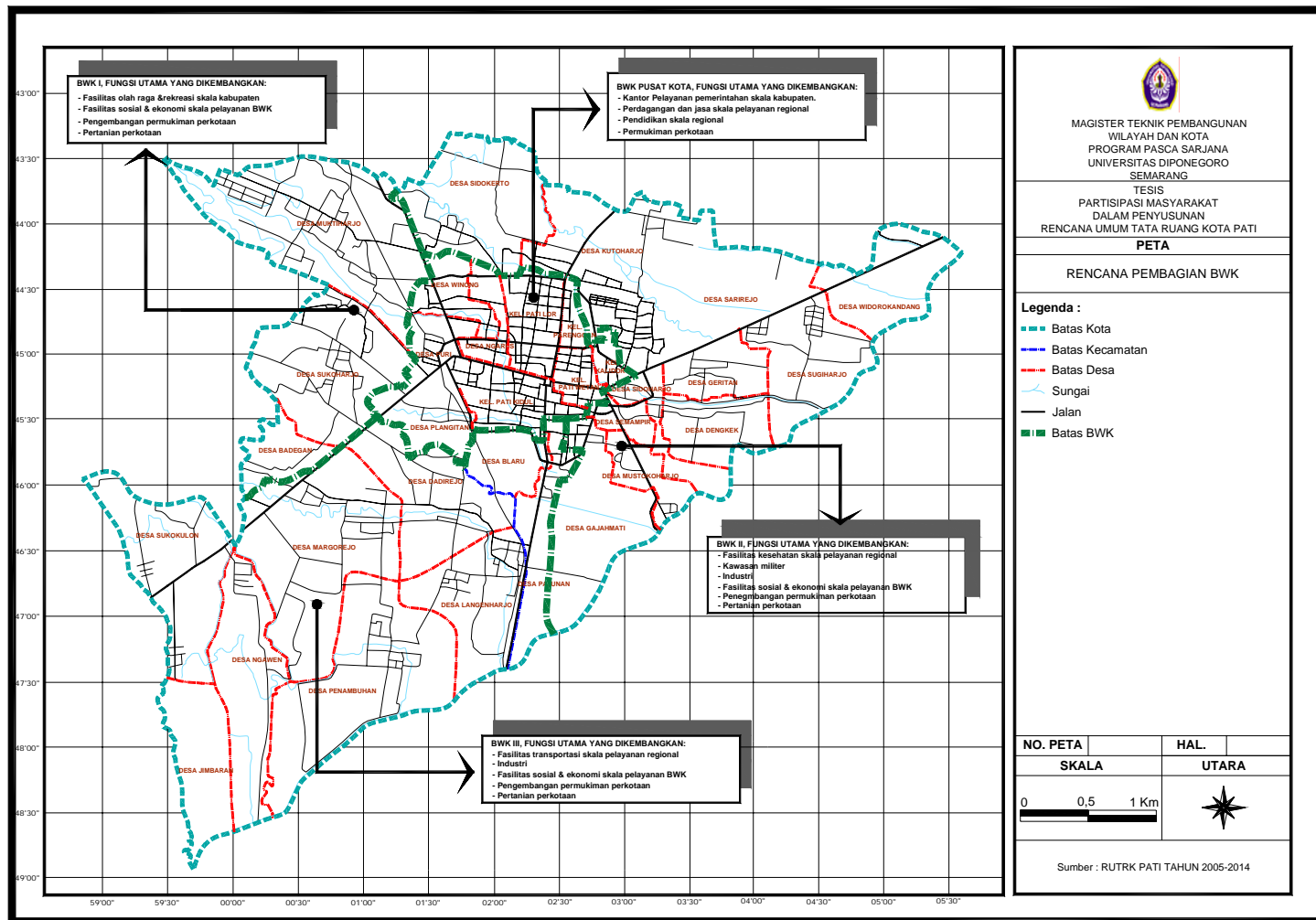
Sumber: Hasil analisis, 2006

3.6 Permasalahan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati

- Pengumuman penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati kepada masyarakat luas, belum dilaksanakan melalui media cetak yang terbit dan atau beredar pada wilayah perencanaan dan juga belum dilaksanakan melalui media elektronik yang berada dan atau siaran mencakup wilayah perencanaan, melainkan baru sebatas pada forum-forum pertemuan dan selebaran pengumuman kepada desa/kelurahan di wilayah perencanaan, serta lewat surat pemberitahuan kepada camat dan dinas/instansi se Kabupaten Pati. Akibatnya pengumuman ini tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat di wilayah perencanaan. Demikian pula pada pengumuman/sosialisasi Rancangan Rencana

Umum Tata Ruang Kota Pati.

- Oleh karena metode partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Pati, dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan terbatas pada kepala desa/kelurahan dan perwakilan masyarakat tiap desa/kelurahan dalam wilayah perencanaan saja.
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati 2005-2014 sampai dengan sekarang belum juga dibahas dan ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Pati sebagai Peraturan Daerah.
- Masyarakat belum memiliki suatu lembaga atau forum resmi yang independen dan berbadan hukum, dalam melakukan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati.



BAB IV

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

Pada bab ini diuraikan analisis tentang kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, serta faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

4.1 Analisis Kebijakan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kebijakan partisipasi masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, dalam rangka proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Dalam kajian ini indikator yang digunakan adalah dengan membandingkan proses penyusunan rencana tata ruang antara peraturan perundangan dan dalam praktek yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan cara membandingkan proses tersebut, harapannya akan dapat diketahui apakah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sudah sesuai peraturan perundangan atau belum.

Peraturan perundangan yang akan dijadikan acuan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 1996. Perbandingan dimaksud sebagaimana tabel IV.1 berikut ini.

TABEL IV.1
PERBANDINGAN PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RUTRK PATI
ANTARA PERMENDAGRI DAN DALAM PRAKTEK

No.	Kegiatan Penyusunan		Keterangan Perbedaan
	Permendagri 9/1998	Dalam Praktek	
I	Tahap Persiapan		
1	<p>Pengumuman rencana penyusunan Rencana Tata Ruang kepada masyarakat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Media cetak yang terbit dan atau beredar pada wilayah setempat. • Media elektronik yang berada dan atau siaran mencakup wilayah yang bersangkutan. • Forum pertemuan sampai tingkat desa/kelurahan untuk penyusunan atau penyempurnaan RDTR Kawasan. <p>Pengumuman dilaksanakan paling sedikit selama 7 (tujuh) hari.</p>	<p>Pengumuman rencana penyusunan Rencana Tata Ruang kepada masyarakat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat pemberitahuan dan pengumuman kepada desa/kelurahan di wilayah perencanaan. • Surat pemberitahuan kepada Camat Pati dan Dinas/Instansi se-Kabupaten Pati. • Forum pertemuan sampai tingkat kecamatan. <p>Pengumuman dilaksanakan paling sedikit selama 7 (tujuh) hari.</p>	<p>➤ Pengumuman tidak dilakukan melalui media cetak (surat kabar, majalah) maupun media elektronik (radio, tv, internet).</p> <p>➤ Pengumuman lewat forum pertemuan belum sampai ke forum tingkat desa/kelurahan.</p>
II	Tahap Penentuan Arah Pengembangan dan Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan		
1	<p>Dalam penentuan arah pengembangan termasuk identifikasi potensi dan masalah pembangunan, partisipasi masyarakat dapat berbentuk pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang. Penyampaian masukan secara lisan, tertulis, dan atau lewat forum pertemuan. Pemberian masukan tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda dan tembusan dapat disampaikan kepada Ketua DPRD. Jangka waktu pemberian masukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan.</p>	<p>Penjaringan Aspirasi Masyarakat I merupakan forum pertemuan untuk mendapatkan masukan masyarakat dalam penentuan arah pengembangan dan pengidentifikasin potensi dan masalah pembangunan. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan ini menyampaikan masukan lewat forum pertemuan tersebut secara lisan maupun tertulis. Forum pertemuan ini dilaksanakan selama 1 hari saja (1 kali), jadi jangka waktu pemberian masukan dari masyarakat yang ikut terlibat juga berlangsung pada satu hari itu juga.</p>	<p>➤ Pemberian masukan dari masyarakat hanya dilakukan pada 1 hari saat terjadinya forum pertemuan saja, dan tidak ada masukan dari masyarakat diluar saat forum pertemuan.</p> <p>➤ Partisipasi masyarakat yang terjadi karena inisiatif dari Pemerintah (masyarakat yang dilibatkan karena mendapat undangan).</p>

Lanjutan

		<p>Penjaringan Aspirasi Masyarakat II merupakan forum pertemuan untuk mendapatkan masukan masyarakat dalam penentuan arah pengembangan dan pengidentifikasin potensi dan masalah pembangunan.</p> <p>Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan ini menyampaikan masukan lewat forum pertemuan tersebut secara lisan maupun tertulis.</p> <p>Forum pertemuan ini dilaksanakan selama 1 hari (1 kali), jadi jangka waktu pemberian masukan masyarakat yang ikut terlibat juga berlangsung pada satu hari itu juga.</p>	<p>➤ Pemberian masukan dari masyarakat hanya dilakukan pada 1 hari saat terjadinya forum pertemuan saja, dan tidak ada masukan dari masyarakat diluar saat forum pertemuan.</p> <p>➤ Partisipasi masyarakat yang terjadi karena inisiatif dari Pemerintah (masyarakat yang dilibatkan karena mendapat undangan).</p>
III	Tahap Perumusan Perencanaan		
1	<p>Dalam perumusan perencanaan tata ruang, partisipasi masyarakat dapat berbentuk pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang dan pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang.</p> <p>Pemberian masukan dilaksanakan dalam lokakarya dan atau sarasehan yang melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat yang dibantu TKPRD dan Instansi terkait lainnya.</p>	<p>Seminar/semiloka merupakan forum pertemuan dalam rangka perumusan perencanaan tata ruang dan penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang.</p> <p>Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan ini menyampaikan masukan lewat forum pertemuan tersebut secara lisan maupun tertulis.</p> <p>Forum pertemuan ini dilaksanakan selama 1 hari (1 kali), jadi jangka waktu pemberian masukan masyarakat yang ikut terlibat juga berlangsung pada satu hari itu juga.</p>	<p>➤ Pemberian masukan dari masyarakat hanya dilakukan pada 1 hari saat terjadinya forum pertemuan saja, dan tidak ada masukan dari masyarakat diluar saat forum pertemuan.</p> <p>➤ Partisipasi masyarakat yang terjadi karena inisiatif dari Pemerintah (masyarakat yang dilibatkan karena mendapat undangan).</p>

2	<p>Pengumuman rancangan rencana tata ruang.</p> <p>Dengan memperhatikan masukan pada saat seminar, rancangan rencana tata ruang lalu diumumkan kepada masyarakat paling tidak selama 7 (tujuh) hari melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Media cetak yang terbit dan atau beredar pada wilayah setempat. • Media elektronik yang berada dan atau siaran mencakup wilayah yang bersangkutan. • Forum pertemuan <p>Partisipasi masyarakat dapat berbentuk pengajuan keberatan disertai alasan yang jelas dan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberatan diajukan kepada Bupati melalui Bappeda secara lisan maupun tertulis selambat-lambatnya 30 hari setelah diumumkan.</p>	<p>Pengumuman rancangan rencana Tata Ruang kepada masyarakat, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan di wilayah perencanaan. • Surat pemberitahuan kepada Camat Pati dan Dinas/Instansi se-Kabupaten Pati. • Forum pertemuan.. <p>Pengumuman dilaksanakan paling sedikit selama 7 (tujuh) hari.</p>	<p>➤ Pengumuman tidak dilakukan melalui media cetak (surat kabar, majalah) maupun media elektronik (radio, tv, internet).</p> <p>➤ Pengumuman lewat forum pertemuan belum sampai ke forum pertemuan tingkat desa/kelurahan.</p>
IV	Tahap Penetapan Rencana		
1	<p>Setelah diadakan penyempurnaan rancangan rencana, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RUTRK. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah beserta Dokumen RUTRK kepada DPRD Kabupaten untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.</p>	<p>Setelah diadakan penyempurnaan rancangan rencana, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RUTRK. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah beserta Dokumen RUTRK kepada DPRD Kabupaten untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.</p>	<p>➤ Rancangan Peraturan Daerah tentang RUTRK Pati sampai dengan sekarang belum pernah dibahas dan disahkan oleh DPRD, karena masih menunggu jadwal sidang.</p>

Sumber: Hasil analisis, 2006

Dari hasil tabel analisis diatas, terlihat adanya beberapa perbedaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati antara Permendagri dengan prakteknya, yaitu pertama bahwa partisipasi masyarakat yang terjadi dikarenakan inisiatif dari Pemerintah bukan atas dasar inisiatif masyarakat sendiri, terbukti dari masyarakat yang terlibat karena mendapat undangan dari pemerintah. Metode partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati ini adalah yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Pati, dimana pada penyusunan rencana tata ruang sebelumnya, belum pernah digunakan

metode partisipasi masyarakat. Oleh karena baru pertama kalinya, maka masyarakat yang berpartisipasi sifatnya masih atas inisiatif pemerintah dan juga masih terbatas jumlahnya, yaitu terbatas pada kepala desa/kelurahan dan wakil masyarakat desa/kelurahan yang diundang. Partisipasi yang demikian ini menurut Dusseldorp (dalam Slamet, 1993:11) digolongkan berdasarkan derajat kesukarelaan adalah dikategorikan dalam partisipasi bebas sub kategori partisipasi terbujuk. Partisipasi terbujuk yaitu bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam aktivitas kelompok tertentu.

Perbedaan kedua adalah bahwa pengumuman rencana penyusunan Rencana Tata Ruang dan pengumuman Rancangan Rencana Tata Ruang belum dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik, maka pengumuman tersebut tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam wilayah perencanaan, akibatnya tidak seluruh masyarakat mengetahui adanya rencana penyusunan dan adanya rancangan rencana tata ruang tersebut, walaupun surat pemberitahuan atau pengumumannya telah dikirimkan sampai ke desa/kelurahan wilayah perencanaan. Meskipun demikian hanya sedikit sekali masyarakat yang mengetahui adanya pengumuman tersebut, karena kebetulan membacanya di kantor desa.

Perbedaan ketiga, bahwa pada tahap penentuan arah pengembangan dan identifikasi potensi dan masalah yang dikenal dengan nama penjaringan aspirasi masyarakat I dan II, hanya dilakukan masing-masing 1 kali pertemuan dan seminar rancangan rencana juga dilakukan 1 kali. Pada forum pertemuan tersebut hanya diikuti oleh wakil masyarakat tertentu yang mendapatkan undangan, akibatnya masukan saran juga hanya didapatkan dari masyarakat yang terlibat, dan jangka waktunya hanya pada saat pertemuan tersebut berlangsung. Partisipasi masyarakat

yang diwakili oleh wakil masyarakat ini sebagaimana menurut penggolongan Dusseldorp (dalam Slamet, 1993:17-18) berdasarkan pada siapa yang terlibat, bahwa salah satu penggolongan orang-orang yang dapat berpartisipasi adalah dari wakil-wakil masyarakat yang terpilih.

Kesimpulannya bahwa ditemui beberapa perbedaan dalam proses partisipasi masyarakat pada penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, antara normatif (Peraturan Menteri Dalam Negeri) dan dalam praktek senyatanya. Perbedaan terletak pada media yang digunakan untuk pemberian informasi, jangka waktu pemberian masukan/saran/pendapat dari masyarakat, dan pada sifat pelibatan masyarakat.

4.2 Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pada sub bab ini dibahas mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, yang meliputi tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat I, tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II, dan tahap Seminar Rancangan Rencana. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, sehingga dengan dikenalnya bentuk partisipasi tersebut dapat diketahui nilai dari partisipasi. Menurut Derick (dalam Bryant dan White, 1987:280) nilai partisipasi tidak hanya terletak pada ada tidaknya partisipasi itu. Hal yang terpenting adalah menentukan jenis partisipasi yang tepat untuk persoalan tertentu. Dalam hal ini ditekankan pentingnya mengenali klasifikasi atau tipe dan bentuk partisipasi masyarakat.

4.2.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat I

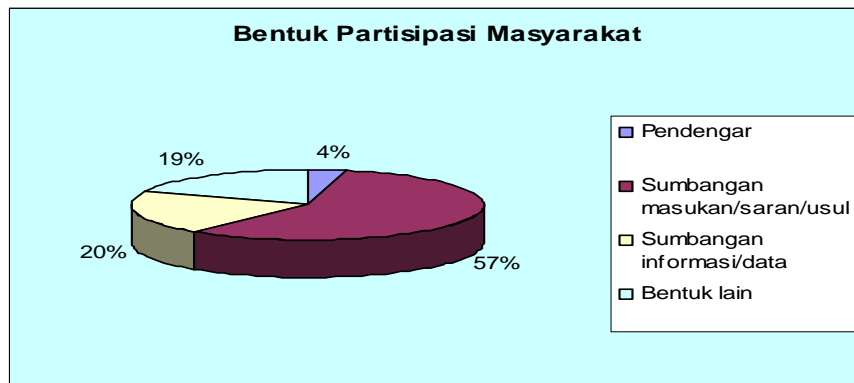
Suatu kegiatan partisipasi dapat diidentifikasi dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi pada tahap penjaringan aspirasi masyarakat I dapat berupa sebagai pendengar, sumbangan masukan/saran/usul, sumbangan informasi/data, bantuan memperjelas hak atas ruang, dan bentuk lainnya yaitu gabungan dari bentuk-bentuk yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, pada tahap ini sebagian besar berupa sumbangan masukan/saran/usul sebanyak 31 orang (57,4%). Kemudian diikuti sumbangan informasi/data sebanyak 11 orang (20,5%), lalu bentuk lain sebanyak 10 orang (18,5%), dan sebagai pendengar sebanyak 2 orang (3,7%), serta tidak ada yang berbentuk bantuan memperjelas hak atas ruang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bentuk lain adalah berupa disamping memberikan sumbangan masukan/saran/usul juga memberikan sumbangan informasi/data. Sebagaimana terlihat dalam Tabel IV.2 dan Gambar 4.1 di bawah ini:

TABEL IV.2
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT I

No.	Bentuk Partisipasi	Frekuensi	%
1	Pendengar	2	3,7
2	Sumbangan masukan/saran/usul	31	57,4
3	Sumbangan informasi/data	11	20,4
4	Bantuan memperjelas hak atas ruang	-	-
5	Bentuk lain	10	18,5
	Jumlah	54	100

Sumber: Hasil analisis, 2006



Sumber: Hasil analisis, 2006

GAMBAR 4.1
DIAGRAM BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT I

Kesimpulannya bentuk partisipasi masyarakat pada tahap penjaringan aspirasi masyarakat I didominasi bentuk sumbangan masukan/saran/usul dan bentuk sumbangan informasi/data.

4.2.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II

Sebagaimana tahap penjaringan aspirasi masyarakat I, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada tahap ini meliputi sebagai pendengar, sumbangan masukan/saran/usul, sumbangan informasi/data, bantuan memperjelas hak atas ruang, dan bentuk lainnya yaitu gabungan dari bentuk-bentuk yang telah disebutkan diatas.

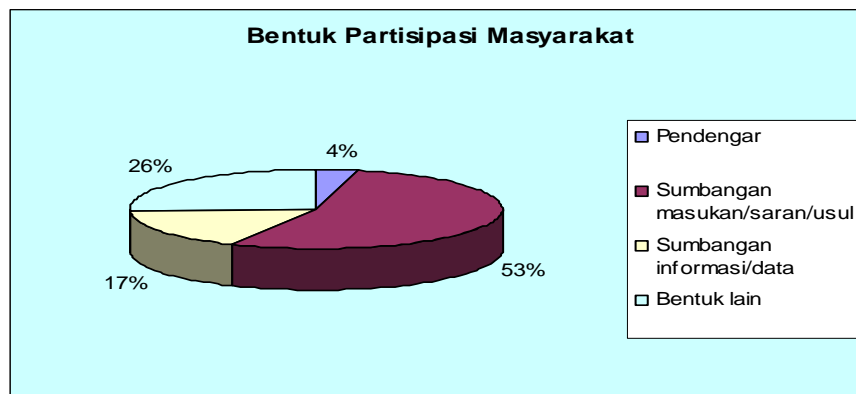
Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi dapat diketahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, pada tahap ini sebagian besar berupa sumbangan masukan/saran/usul sebanyak 29 orang (53,7%). Kemudian diikuti bentuk lain sebanyak 14 orang (25,9%), sumbangan informasi/data sebanyak 9 orang (16,7%), dan sebagai pendengar

sebanyak 2 orang (3,7%), serta tidak ada yang berbentuk bantuan memperjelas hak atas ruang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bentuk lain adalah berupa disamping memberikan sumbangan masukan/saran/usul juga memberikan sumbangan informasi/data. Sebagaimana terlihat dalam Tabel IV.3 dan Gambar 4.2 di bawah ini:

TABEL IV.3
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT II

No.	Bentuk Partisipasi	Frekuensi	%
1	Pendengar	2	3,7
2	Sumbangan masukan/saran/usul	29	53,7
3	Sumbangan informasi/data	9	16,7
4	Bantuan memperjelas hak atas ruang	-	-
5	Bentuk lain	14	25,9
	Jumlah	54	100

Sumber: Hasil Analisis, 2006



Sumber: Hasil analisis, 2006

GAMBAR 4.2
DIAGRAM BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT II

Kesimpulannya bentuk partisipasi masyarakat pada tahap penjaringan aspirasi masyarakat II didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/saran/usul dan

bentuk lain yaitu merupakan gabungan antara sumbangan masukan/saran/usul dan sumbangan informasi/data.

4.2.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Seminar Rancangan Rencana

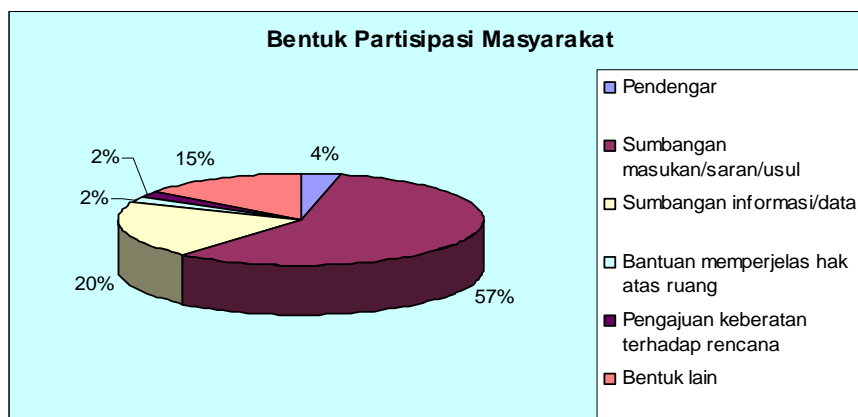
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada tahap Seminar Rancangan Rencana terdiri dari sebagai pendengar, sumbangan masukan/saran/usul, sumbangan informasi/data, bantuan memperjelas hak atas ruang, pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana, dan bentuk lainnya yaitu gabungan dari bentuk-bentuk yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi dapat diketahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, pada tahap ini sebagian besar masih berupa sumbangan masukan/saran/usul sebanyak 31 orang (57,4%). Kemudian diikuti sumbangan informasi/data sebanyak 11 orang (20,4%), bentuk lain sebanyak 8 orang (14,8%), sebagai pendengar sebanyak 2 orang (3,7%), dan bantuan memperjelas hak atas ruang sebanyak 1 orang (1,9%), serta pengajuan keberatan terhadap rencana 1 orang (1,9%). Dalam hal ini yang dimaksud dengan bentuk lain adalah berupa disamping memberikan sumbangan masukan/saran/usul juga memberikan sumbangan informasi/data. Perhitungan distribusi frekuensi sebagaimana terlihat dalam Tabel IV.4 dan Gambar 4.3 di bawah ini.

TABEL IV.4
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP SEMINAR RANCANGAN RENCANA

No.	Bentuk Partisipasi	Frekuensi	%
1	Pendengar	2	3,7
2	Sumbangan masukan/saran/usul	31	57,4
3	Sumbangan informasi/data	11	20,3
4	Bantuan memperjelas hak atas ruang	1	1,9
5	Pengajuan keberatan terhadap rencana	1	1,9
6	Bentuk lain	8	14,8
	Jumlah	54	100

Sumber: Hasil analisis, 2006



Sumber: Hasil analisis, 2006

GAMBAR 4.3
DIAGRAM BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP SEMINAR RANCANGAN RENCANA

Kesimpulannya bentuk partisipasi masyarakat pada tahap seminar rancangan rencana didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/saran/usul dan bentuk sumbangan informasi/data.

4.2.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Seluruh Tahap

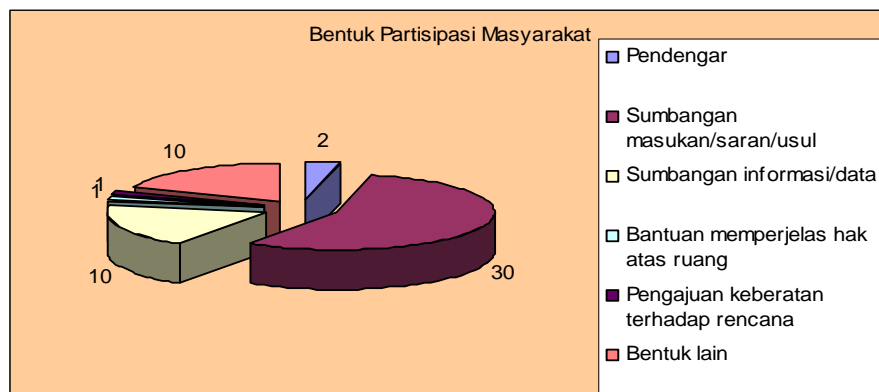
Berdasarkan hasil analisis bentuk partisipasi masyarakat pada tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat I, tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II, dan

tahap Seminar Rancangan Rencana maka dapat dikaji bentuk partisipasi masyarakat secara rata-rata dari ketiga tahap tersebut, sebagaimana tabel IV.5 dan gambar 4.4 berikut.

TABEL IV.5
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

No	Bentuk	Penjaringan Aspirasi I		Penjaringan Aspirasi II		Seminar		Rata-Rata	
		N	%	N	%	N	%	N	%
1	Pendengar	2	3,7	2	3,7	2	3,7	2	3,7
2	Sumbangan Masukan/ Saran/Usul	31	57,4	29	53,7	31	57,4	30	55,5
3	Sumbangan Informasi/ Data	11	20,4	9	16,7	11	20,4	10	18,5
4	Bantuan Memperjelas Hak Atas Ruang	-	-	-	-	1	1,9	1	1,9
5	Pengajuan Keberatan Terhadap Rencana	-	-	-	-	1	1,9	1	1,9
6	Bentuk Lain	10	18,5	14	25,9	8	14,8	10	18,5

Sumber: Hasil analisis, 2006



Sumber: Hasil analisis, 2006

GAMBAR 4.4
DIAGRAM BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA SELURUH TAHAP

Atas dasar tabel IV.5 diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada seluruh tahap pada prinsipnya sama dengan bentuk pada masing-

masing tahap. Bentuk partisipasi paling dominan yaitu bentuk sumbangan masukan/saran/usul, kemudian diikuti bentuk sumbangan informasi/data, dan bentuk lain. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati memberikan kontribusi masukan, dan hanya sebagian kecil saja yang tidak memberikan kontribusi masukan karena hanya sebagai pendengar saja. Ini berarti sudah ada kemauan dan kemampuan masyarakat yang terlibat untuk mengemukakan pendapatnya. Kemauan berpartisipasi berhubungan dengan motivasi untuk mengadakan perubahan, sedangkan kemampuan berpartisipasi berhubungan dengan sumber daya manusia dan kemampuan belajar.

Dengan adanya sumbangan masukan berarti partisipasi telah memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, serta mengembangkan potensi dan prakarsa lokal. Hak dan tindakan masyarakat menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah, tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk penyusunan rencana umum tata ruang kota. Dalam hal ini partisipasi masyarakat digunakan sebagai alat komunikasi, yaitu alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan, agar diwujudkan keputusan yang responsif. Sebuah perencanaan yang responsif menurut Mc Connel (1981) dalam Santosa dan Heroepoetri (2005:13) adalah proses pengambilan keputusan tentang perencanaan tata ruang yang tanggap pada preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan.

Sementara itu dari jawaban responden terhadap pertanyaan terbuka tentang usulan bentuk partisipasi terlihat bahwa selain bentuk-bentuk partisipasi diatas, responden juga mengusulkan adanya bentuk-bentuk lain seperti identifikasi

kebutuhan masyarakat, sumbangan pertimbangan, bekerjasama dalam penyusunan, dan bantuan tenaga ahli dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa selain kontribusi masukan, responden juga berharap adanya bentuk kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam penyusunan rencana tata ruang dan juga adanya bentuk bantuan tenaga ahli dari masyarakat.

Kesimpulannya bahwa terdapat berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, baik pada tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat I, tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II, maupun tahap Seminar Rancangan Rencana. Dan bentuk partisipasi masyarakat pada seluruh tahap pada prinsipnya sama dengan bentuk pada masing-masing tahap, yaitu didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/saran/usul dan bentuk sumbangan informasi/data.

4.3 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat

Pada sub bab ini dibahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, dengan tujuan untuk mengetahui derajat keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang. Derajat keterlibatan masyarakat tersebut diukur dari variabel-variabel tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan, keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul, keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana, dan keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana.

4.3.1 Analisis Tingkat Kehadiran Dalam Rapat/Pertemuan

Untuk mengukur tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein yang

terdiri dari 8 tangga, berturut-turut dari tangga 1 sampai dengan 8 sebagai berikut:

(1) hadir hanya sebagai pendengar saja; (2) hadir dan memberikan masukan tetapi untuk kepentingan pemerintah; (3) hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat; (4) hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah; (5) hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan; (6) hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah; (7) hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana; (8) hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

Tingkat kehadiran masyarakat dalam rapat/pertemuan dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut ini:

TABEL IV.6
TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT/PERTEMUAN
PADA PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

No.	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah dalam Variabel
1	Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan	Hadir sebagai pendengar	2	3,7	1	2	181
		Hadir memberi masukan untuk pemerintah	-	-	2	-	
		Hadir memberi masukan untuk masyarakat	35	64,8	3	105	
		Hadir dan melakukan dialog dengan pemerintah	11	20,4	4	44	
		Hadir memberi beberapa pengaruh	6	11,1	5	30	
		Hadir membagi tanggung jawab perencanaan	-	-	6	-	
		Hadir diberi limpahan kewenangan keputusan	-	-	7	-	
		Hadir memiliki kekuasaan penuh	-	-	8	-	

Sumber: Hasil analisis, 2006

Berdasarkan tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan, sebagian besar responden hadir dalam pertemuan dan mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu sebanyak 35 orang (64,8%), lalu diikuti dengan responden hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah sebanyak 11 orang (20,4%), responden hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan sebanyak 6 orang (11,1%), dan responden hadir hanya sebagai pendengar saja sebanyak 2 orang (3,7%). Tidak ada yang tingkat kehadirannya karena alasan-alasan sebagai berikut, yaitu: memberi masukan untuk kepentingan pemerintah, membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah, diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana, dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel IV.6 diatas, dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Terdapat 1 variabel pertanyaan dengan pilihan jawaban pertanyaan ada 8 pilihan dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 8. Urutan skor tersebut didasarkan pada 8 tangga tingkat partisipasi masyarakat dari Sherry Arnstein. Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (1×1) adalah 1, maksimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (1×8) adalah 8, maka bila jumlah sampel 54, dapat diketahui skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat (54×1) adalah 54 dan skor maksimum (54×8) adalah 432.

Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu $(432-54)/8 = 47,25$. Maka bila digunakan tipologi dari Arnstein, dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah:

- *Citizen Control*, bila memiliki skor 384,82 - 432,00
- *Delegated Power*, bila memiliki skor 337,56 - 384,81

- *Partnership*, bila memiliki skor 290,30 - 337,55
- *Placation*, bila memiliki skor 243,04 - 290,29
- *Consultation*, bila memiliki skor 195,78 - 243,03
- *Informing*, bila memiliki skor 148,52 - 195,77
- *Therapy*, bila memiliki skor 101,26 - 148,51
- *Manipulation*, bila memiliki skor 54,00 - 101,25

Dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 181, maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Informing* (Tangga ketiga dari delapan Tangga Arnstein).

Pada tingkat *informing* (informasi) dapat diartikan bahwa tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan karena adanya:

- Pemberian informasi kepada masyarakat yang ikut dilibatkan dengan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.
- Dalam hal ini, informasi diberikan lewat surat dan lewat forum pertemuan.
- Pada tingkat *Informing* ini termasuk dalam derajad tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan

4.3.2 Analisis Keaktifan Mengemukakan Masukan/Saran/Usul

Untuk mengukur tingkat keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein yang terdiri dari 8 tangga, berturut-turut dari tangga 1 sampai dengan 8

sebagai berikut: (1) tidak memberikan masukan/saran/usul; (2) memberikan masukan tetapi untuk kepentingan pemerintah; (3) memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat; (4) memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah; (5) memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai kebutuhannya; (6) memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah; (7) memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan; (8) memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

Tingkat keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul dapat dilihat pada Tabel IV.7 berikut ini:

TABEL IV.7
TINGKAT KEAKTIFAN MENGEMUKAKAN MASUKAN/SARAN/USUL
PADA PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

No.	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah dalam Variabel
1	Keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul	Tidak memberi masukan	2	3,7	1	2	201
		Masukan untuk kepentingan pemerintah	-	-	2	-	
		Masukan untuk kepentingan masyarakat	27	50,0	3	81	
		Masukan dengan dialog dua arah	12	22,2	4	48	
		Masukan dan usulan diperhatikan	8	14,8	5	40	
		Masukan dan tercapai kesamaan kepentingan	5	9,3	6	30	
		Masukan dan memiliki kewenangan keputusan	-	-	7	-	
		Masukan dan kekuasaan penuh	-	-	8	-	

Sumber: Hasil analisis, 2006

Berdasarkan keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul, sebagian besar responden memberikan masukan karena untuk kepentingan masyarakat,

sebanyak 27 orang (50,0%), kemudian memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah sebanyak 12 orang (22,2%), memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai kebutuhannya sebanyak 8 orang (14,8%), memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah sebanyak 5 orang (9,3%), dan responden tidak memberikan masukan/saran/usul sebanyak 2 orang (3,7%). Tidak ada yang tingkat keaktifannya dalam mengemukakan masukan/saran/usul karena alasan-alasan sebagai berikut, yaitu: memberi masukan untuk kepentingan pemerintah saja, memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana, dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel IV.7 diatas, sebagaimana pada perhitungan sub bab 4.3.1 diatas. Sehingga dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 201, maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Consultation* (Tangga keempat dari delapan Tangga Arnstein).

Pada tingkat *Consultation* (konsultasi) dapat diartikan bahwa tingkat keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul karena:

- Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.
- Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah.
- Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan

ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

- Pada tingkat *Consultation* ini termasuk dalam derajat tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan

4.3.3 Analisis Keterlibatan dalam Menetapkan Konsep Rencana

Untuk mengukur tingkat keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein yang terdiri dari 8 tangga, berturut-turut dari tangga 1 sampai dengan 8 sebagai berikut: (1) tidak ikut menetapkan konsep rencana; (2) ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan pemerintah; (3) ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat; (4) ikut berdiskusi/berdialog aktif dalam menetapkan konsep rencana; (5) ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep; (6) ikut menetapkan konsep dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah; (7) ikut menetapkan konsep dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan; (8) ikut menetapkan konsep dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

Tingkat keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana dapat dilihat pada Tabel IV.8 berikut ini:

TABEL IV.8
TINGKAT KETERLIBATAN DALAM MENETAPKAN KONSEP
PADA PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

No.	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah dalam Variabel
1	Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana	Tidak ikut menetapkan	2	3,7	1	2	196
		Terlibat hanya untuk pemerintah	-	-	2	-	
		Terlibat untuk masyarakat	26	48,1	3	78	
		Terlibat berdiskusi aktif	17	31,5	4	68	
		Terlibat dan memberi pengaruh	6	11,1	5	30	
		Terlibat dan berbagi tanggung jawab	3	5,6	6	18	
		Terlibat dan memiliki kewenangan keputusan	-	-	7	-	
		Terlibat dan memiliki kekuasaan penuh	-	-	8	-	

Sumber: Hasil analisis, 2006

Berdasarkan keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana, sebagian besar responden ikut menetapkan konsep rencana karena untuk kepentingan masyarakat, sebanyak 26 orang (48,1%), kemudian ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana sebanyak 17 orang (31,5%), ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana sebanyak 6 orang (11,1%), ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah sebanyak 3 orang (5,6%), dan responden tidak ikut menetapkan konsep rencana sebanyak 2 orang (3,7%). Tidak ada yang keterlibatannya dalam menetapkan konsep rencana karena alasan-alasan sebagai berikut, yaitu: ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja, ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana, dan ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel IV.8 diatas, sebagaimana pada perhitungan sub bab 4.3.1 diatas. Sehingga dengan

demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 196, maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Consultation* (Tangga keempat dari delapan Tangga Arnstein).

Pada tingkat *Consultation* (konsultasi) dapat diartikan bahwa tingkat keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana terjadi karena:

- Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.
- Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah tersebut.
- Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.
- Pada tingkat *Consultation* ini termasuk dalam derajat tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan

4.3.4 Analisis Keterlibatan dalam Memberikan Persetujuan terhadap Rancangan Rencana

Untuk mengukur tingkat keterlibatan dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga

Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein yang terdiri dari 8 tangga, berturut-turut dari tangga 1 sampai dengan 8 sebagai berikut: (1) tidak memberikan persetujuan; (2) memberikan persetujuan untuk kepentingan pemerintah; (3) memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat; (4) memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah; (5) memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat diperhatikan; (6) memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah; (7) memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan; (8) memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana. Tingkat keterlibatan dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana dapat dilihat pada Tabel IV.9 berikut ini:

TABEL IV.9
TINGKAT KETERLIBATAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN
TERHADAP RANCANGAN RENCANA
PADA PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

No.	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah dalam Variabel
1	Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana	Tidak memberikan persetujuan	-	-	1	-	218
		Persetujuan hanya untuk pemerintah	-	-	2	-	
		Persetujuan untuk masyarakat	20	37,0	3	60	
		Persetujuan karena ada dialog dua arah	17	31,5	4	68	
		Persetujuan karena usulan diperhatikan	12	22,2	5	60	
		Persetujuan karena ada kesamaan kepentingan	5	9,3	6	30	
		Persetujuan karena memiliki kewenangan keputusan	-	-	7	-	
		Persetujuan karena memiliki kekuasaan penuh	-	-	8	-	

Sumber: Hasil analisis, 2006

Berdasarkan keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana, semua responden memberikan persetujuannya dan tidak ada yang tidak memberikan persetujuannya. Sebagian besar responden memberikan persetujuannya karena untuk kepentingan masyarakat sebanyak 20 orang (37,0%), kemudian memberikan persetujuannya karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah sebanyak 17 orang (31,5%), memberikan persetujuannya karena usulan masyarakat diperhatikan sebanyak 12 orang (22,2%), dan memberikan persetujuannya karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah sebanyak 5 orang (9,3%). Tidak ada yang keterlibatannya dalam memberikan persetujuan rancangan rencana karena alasan-alasan sebagai berikut, yaitu: memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja, memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana, dan memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel IV.9 diatas, sebagaimana pada perhitungan sub bab 4.3.1 diatas. Sehingga dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 218, maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Consultation* (Tangga keempat dari delapan Tangga Arnstein).

Pada tingkat *Consultation* (konsultasi) dapat diartikan bahwa tingkat keterlibatan dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana karena:

- Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

- Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah.
- Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.
- Pada tingkat *Consultation* ini termasuk dalam derajat tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan

4.3.5. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Keseluruhan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati dapat diketahui dengan menjumlahkan skor dari tiap variabel sebagaimana diuraikan diatas, yaitu variabel tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan, keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul, keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana, dan keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana. Hasil selengkapnya sebagaimana tabel IV.10 berikut ini.

TABEL IV.10
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

No.	Variabel	Jumlah Skor Variabel	Keterangan Tingkat
1	Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan	181	<i>Informing</i>
2	Keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul	201	<i>Consultation</i>
3	Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana	196	<i>Consultation</i>
4	Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana	218	<i>Consultation</i>
	Jumlah	796	<i>Consultation</i>

Sumber: Hasil analisis, 2006

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel IV.10 diatas, dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Terdapat 4 variabel pertanyaan dengan pilihan jawaban masing-masing pertanyaan ada 8 pilihan dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 8. Urutan skor tersebut didasarkan pada 8 tangga tingkat partisipasi masyarakat dari Sherry Arnstein. Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4×1) adalah 4, maksimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4×8) adalah 32, maka bila jumlah sampel 54, dapat diketahui skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat (54×4) adalah 216 dan skor maksimum (54×32) adalah 1728.

Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu $(1728-216)/8 = 189$. Maka bila digunakan tipologi dari Arnstein, dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah:

- *Citizen Control*, bila memiliki skor 1539 - 1728
- *Delegated Power*, bila memiliki skor 1350 - 1538
- *Partnership*, bila memiliki skor 1161 - 1349

- *Placation*, bila memiliki skor 972 - 1160
- *Consultation*, bila memiliki skor 783 - 971
- *Informing*, bila memiliki skor 594 - 782
- *Therapy*, bila memiliki skor 405 - 593
- *Manipulation*, bila memiliki skor 216 - 404

Dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 796, maka secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Consultation* (Tangga keempat dari delapan Tangga Arnstein).

Pada tingkat *Consultation* (konsultasi) dapat diartikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang kota karena:

- Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.
- Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah tersebut.
- Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.
- Pada tingkat *Consultation* ini termasuk dalam derajat tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan

Sedangkan bila dilihat berdasarkan variabelnya, dari tabel IV.10 diatas maka partisipasi masyarakat yang paling tinggi adalah dalam keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana mencapai jumlah tertinggi (218) dan yang paling rendah adalah tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan dengan jumlah terendah (181).

Sementara itu dari jawaban responden terhadap pertanyaan terbuka tentang usulan tingkat partisipasi masyarakat, sebagian besar responden berharap agar masukan saran dari masyarakat lebih memberi pengaruh pada rencana jadi ada jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Responden juga mengusulkan agar dialog pemerintah dan masyarakat lebih diintensifkan lagi, dengan menambah frekuensi pelibatan atau partisipasi masyarakat yang semula baru tiga kali menjadi empat sampai lima kali, bahkan lebih dari lima kali di tiap proses penyusunan rencana tata ruang. Usulan tingkat partisipasi lainnya yaitu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan keputusan, berbagi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan membuat keputusan pada rencana. Semua usulan masyarakat tersebut menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya lebih tinggi lagi, lebih dari sekedar tingkat *Consultation (Degree of Tokenism)* saja. Untuk itu di masa mendatang pemerintah berkewajiban memfasilitasinya agar dapat mencapai derajat kekuatan masyarakat (*Degree of Citizen Power*).

Kesimpulannya bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati berada pada tingkat keempat dari delapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkat *Consultation* (konsultasi). Pada tingkat *Consultation* ini termasuk dalam derajat tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*.

4.4 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Pada sub bab ini dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, sehingga dapat berpengaruh pada derajat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang.

4.4.1 Analisis Faktor-Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi faktor-faktor yang berasal dari individu responden sendiri, meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Hasil perhitungan distribusi frekuensi selengkapnya sebagaimana tabel IV.11 berikut ini.

TABEL IV.11
DISTRIBUSI FREKUENSI FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

No.	Kriteria	Frekuensi	%
A	Jenis Kelamin		
1	Pria	52	96,3
2	Wanita	2	3,7
B	Usia		
1	20-30 tahun	-	-
2	31-40 tahun	7	13,0
3	41-50 tahun	23	42,6
4	Lebih dari 50 tahun	24	44,4
C	Pendidikan		
1	Sarjana	12	22,2
2	Sarjana Muda/Diploma	8	14,8
3	Lulus SMA/ sederajat	31	57,4
4	Lulus SMP/ sederajat	3	5,6
5	Lulus SD/ sederajat	-	-
D	Pekerjaan		
1	PNS/TNI	3	5,6

Lanjutan

2	Pensiunan	10	18,5
3	Kepala Desa/Kelurahan	24	44,4
4	Pegawai Swasta	3	5,6
5	Wiraswasta	8	14,8
6	Lain-lain	6	11,1
E	Penghasilan		
1	Kurang dari Rp.500.000,-	-	-
2	Rp.500.000,- s/d Rp.799.000,-	3	5,6
3	Rp.800.000,- s/d Rp.1.099.000,-	13	24,1
4	Rp.1.100.000,- s/d Rp.1.400.000,-	19	35,2
5	Lebih dari Rp.1.400.000,-	19	35,2

Sumber: Hasil analisis, 2006

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi pada tabel diatas, faktor jenis kelamin responden yang terlibat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati terdiri dari dominan jenis kelamin pria sebanyak 52 orang (96,3%) dan wanita sebanyak 2 orang (3,7%). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita adalah berbeda. Hal ini disebabkan adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita.

Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarno et. al (1992) dalam Yulianti (2000:34), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya kelompok pria akan lebih banyak ikut berpartisipasi dari pada kelompok wanita.

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi usia responden maka diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki usia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 24 orang (44,4%), kemudian diikuti responden dengan usia 41-50 tahun

sebanyak 23 orang (42,6%), responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 7 orang (13,0%), dan tidak ada responden yang berusia 20-30 tahun. Dari perhitungan diatas terlihat bahwa masyarakat yang berpartisipasi semuanya tergolong dalam usia produktif (15-64 tahun). Dari usia produktif tersebut dominan berusia matang (lebih dari 50 tahun) yaitu 44,4%. Hal ini menunjukkan adanya senioritas dalam berpartisipasi.

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno et. al,1992 dalam Yulianti,2000:34). Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi (Slamet, 1994:142). Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan.

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi pendidikan responden maka diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan tamat SMA atau sederajat yaitu sebanyak 31 orang (57,4%), kemudian diikuti responden dengan pendidikan Sarjana sebanyak 12 orang (22,2%), responden dengan pendidikan Sarjana Muda/Diploma sebanyak 8 orang (14,8%), responden dengan pendidikan tamat SMP atau sederajat sebanyak 3 orang (5,6%), dan tidak ada responden yang berpendidikan tamat SD atau sederajat.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan menengah sampai tinggi (SMA sampai dengan Sarjana). Secara akumulatif jumlahnya mencapai 94,4%, dan

hanya 5,6% yang berpendidikan SMP. Hal ini akan berpengaruh pada bentuk dan tata cara berpartisipasi.

Litwin (1986) dalam Yulianti (2000:34) menyatakan bahwa, salah satu karakteristik partisan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi pekerjaan responden maka diperoleh bahwa semua responden adalah merupakan tokoh masyarakat di desa/kelurahan. Sebagian besar responden memiliki pekerjaan kepala desa/kelurahan yaitu sebanyak 24 orang (44,4%), sedangkan sisanya 55,6% berjenis pekerjaan sebagai pensiunan, wiraswasta, PNS/TNI, pegawai swasta, dan lain-lain. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat penghasilan seseorang. Dapat dikatakan bahwa mata pencaharian/jenis pekerjaan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan.

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi penghasilan responden maka diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden memiliki penghasilan antara Rp.1.100.000,- s/d Rp.1.400.000,- sebanyak 19 orang (35,2%), lalu responden dengan penghasilan lebih dari Rp.1.400.000,- sebanyak 19 orang juga (35,2%).

Dari tabel diatas terlihat bahwa 70,4% responden memiliki penghasilan per bulan yang cukup tinggi yaitu antara Rp. 1.100.000,- sampai dengan lebih dari Rp.1.400.000,- Hal ini juga akan mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan yang mencukupi akan mempengaruhi waktu luang masyarakat karena mereka tidak disibukkan lagi dengan mencari tambahan penghasilan sehingga lebih aktif untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan.

Kesimpulannya bahwa dari analisis faktor internal, sebagian besar responden adalah berjenis kelamin pria, berusia matang (antara 41-50 tahun dan lebih dari 50 tahun), berpendidikan lulus SMA, jenis pekerjaan sebagai tokoh masyarakat, dan berpenghasilan cukup tinggi.

4.4.2 Analisis Faktor-Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program kecuali masyarakat. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian informasi kepada masyarakat, peranan konsultan perencanaan, dan peranan pihak swasta (Pengembang, LSM). Hasil perhitungan distribusi frekuensi selengkapnya sebagaimana tabel IV.12 berikut ini.

TABEL IV.12
DISTRIBUSI FREKUENSI FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

No.	Kriteria	Frekuensi	%
A	Peran Pemerintah dalam Pembinaan		
1	Sangat sering (> 66%)	-	-
2	Cukup sering (34% - 66%)	19	35,2
3	Kurang (1% - 33%)	35	64,8
4	Tidak ada (0%)	-	-
B	Peran Konsultan Perencana		
1	Sangat memperhatikan (> 66%)	25	46,3
2	Cukup memperhatikan (34% - 66%)	27	50,0
3	Kurang memperhatikan (1% - 33%)	2	3,7
4	Tidak memperhatikan (0%)	-	-
C	Peran Swasta		
1	Sangat terlibat (> 66%)	-	-
2	Cukup terlibat (34% - 66%)	7	13,0
3	Kurang terlibat (1% - 33%)	47	87,0
4	Tidak terlibat (0%)	-	-

Sumber: Hasil analisis, 2006

Hasil distribusi frekuensi faktor eksternal berupa peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian informasi kepada masyarakat, yaitu bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa pembinaan dan pemberian informasi oleh pemerintah masih kurang (prosentase pembinaan dan pemberian informasinya hanya 1%-33%), dengan jumlah responden sebanyak 35 orang (64,8%) dan sisanya menyatakan bahwa peran pemerintah sudah cukup (prosentase pembinaan dan pemberian informasinya sebanyak 34%-66%), dengan jumlah responden 19 orang (35,2%). Pembinaan pemerintah dalam penyelenggaraan tata ruang menurut UU 24/1992 meliputi mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan. Sementara pembinaan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati

hanyalah semacam penyuluhan yang dilaksanakan sekali dan bersamaan dengan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat I.

Kurangnya pembinaan ini akan berpengaruh pada partisipasi masyarakat. Karena kurangnya pembinaan dan pemberian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat, akan menjadikan informasi tidak mencapai sasaran dengan baik yaitu seluruh masyarakat dalam wilayah perencanaan, sehingga hanya masyarakat yang ikut dilibatkan saja yang mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan, sedangkan masyarakat yang tidak dilibatkan tidak mengetahuinya. Untuk itu pemerintah harus lebih meningkatkan pembinaan dan pemberian informasi kepada masyarakat dalam setiap proses penyusunan rencana tata ruang, mulai dari pengumuman sampai penetapan rencana. Karena salah satu prasyarat untuk memperoleh partisipasi dalam suatu program pembangunan adalah tersedianya informasi bagi pihak yang berpartisipasi. Pengetahuan dan pemahaman terhadap program tersebut adalah akan memperbesar keikutsertaan masyarakat.

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi dari peranan konsultan perencanaan menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa konsultan perencanaan cukup memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat (prosentase perhatian dan akomodasi aspirasi sekitar 34%-66%), dengan jumlah responden 27 orang (50,0%), sedangkan 25 orang responden (46,3%) menyatakan konsultan perencanaan sangat memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat (prosentase perhatian dan akomodasi aspirasi lebih dari 66%), dan hanya 2 orang responden (3,7%) menyatakan bahwa konsultan perencanaan kurang memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta tidak ada responden yang menyatakan bahwa konsultan perencanaan tidak berperan sama sekali.

Atas dasar tabel diatas dapat dilihat bahwa peran konsultan perencana menurut responden termasuk tinggi. Keadaan ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, sebab dengan diakomodasinya masukan masyarakat akan menambah kepercayaan masyarakat pada hasil yang direncanakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Santosa dan Heroepoetri (2005:5), bahwa salah satu manfaat dari partisipasi masyarakat adalah menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah.

Lebih lanjut dikatakan ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik, serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan. Menurut Burke (2004:214), peran perencana ini mencakup keahlian prosedural dan keahlian berinteraksi. Keahlian prosedural berhubungan dengan fungsi yaitu mengetahui bagaimana melakukan atau melaksanakan seluruh rangkaian fungsi yang dibutuhkan didalam perencanaan. Keahlian berinteraksi mengacu pada kemampuan perencana untuk berhubungan dengan pihak lain dalam melaksanakan suatu proses kerjasama perencanaan.

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi dari peran pihak swasta (Pengembang, LSM) menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa pihak swasta masih kurang terlibat (keterlibatan pihak swasta hanya 1%-33%), dengan jumlah responden 47 orang (87,0%), sedangkan 7 orang responden (13,0%) menyatakan bahwa pihak swasta cukup terlibat (keterlibatan pihak swasta sekitar 34%-66%).

Peran pihak swasta dalam hal ini pengembang dan LSM pada proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati akan ikut menentukan hasil rencana yang dihasilkan. Dari tabel diatas terlihat bahwa menurut responden keterlibatan pihak swasta (pengembang dan LSM) masih kurang terlibat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Hasil ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan seorang pengembang perumahan di Pati, bahwa pihaknya belum pernah diberi informasi atau dilibatkan dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Tetapi hasil wawancara dengan pihak Bappeda, menyatakan bahwa dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati beberapa waktu lalu, walaupun tidak semua pengembang dan LSM dilibatkan tetapi pemerintah sudah mengundang perwakilannya. Alasannya karena metode ini baru pertama kali dilaksanakan di Pati, sehingga hanya beberapa perwakilan saja yang dilibatkan.

Keadaan seperti ini dapat mempengaruhi rencana yang dihasilkan karena kurang mengakomodasi partisipasi dari pihak swasta tersebut. Kurang terlibatnya pihak swasta terutama pengembang dalam hal ini tidak terlepas dari sosialisasi atau pemberian informasi pemerintah kepada pengembang yang dinilai masih sangat kurang. Partisipasi pengembang sebagai salah satu stakeholder yang terkait kebijakan dan mempunyai kepentingan agar kegiatannya berjalan, akan berpengaruh pada keikutsertaannya menjaga penggunaan ruang yang sesuai dengan peruntukan dan alokasi serta waktu yang direncanakan, sehingga terhindar dari konflik pemanfaatan ruang. Sedangkan keterlibatan LSM dalam penyusunan rencana tata ruang berperan sebagai pengawas kebijakan, kelompok yang terkait kebijakan, dan mempunyai kepentingan agar kebijakannya berjalan.

Kesimpulannya dari analisis faktor eksternal bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian

informasi masih kurang, peran konsultan perencana cukup dan sangat memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta peran pihak swasta masih kurang terlibat.

4.4.3 Analisis Hubungan Antara Faktor-Faktor dengan Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor baik internal maupun eksternal dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, dilakukan uji statistik dengan menggunakan tabulasi silang (*crosstab*) dari beberapa variabel yang ada dengan memperhatikan nilai *chi square*. Setelah dilakukan uji *chi square* selanjutnya dilihat nilai hitung *chi square* dibandingkan dengan nilai tabelnya dengan taraf signifikansi 0,05. Dari perbandingan nilai ini menunjukkan ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Jika nilai *chi square* hitung lebih besar dari nilai *chi square* tabel, maka pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus ditolak. Sebaliknya jika nilai *chi square* hitung lebih kecil dari nilai *chi square* tabel, maka pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus diterima. Berdasarkan probabilitas, bila nilai probabilitas (*Asymp.Sig*) < 0,05 maka H_0 ditolak artinya pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus ditolak. Sebaliknya jika nilai probabilitas (*Asymp.Sig*) > 0,05 maka H_0 diterima artinya pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus diterima.

Koefisien kontingensi (*Contingency Coefficient/CC*) menunjukkan kuat dan lemahnya hubungan antara dua variabel yang diuji, dengan nilai koefisien kontingensi berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Bila nilai koefisien kontingensi mendekati 1, maka hubungan antara kedua variabel tersebut sangat kuat dan

sebaliknya jika nilai koefisien kontingensi tersebut semakin mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel tersebut semakin lemah.

4.4.3.1 Hubungan Antara Faktor-Faktor dengan Bentuk Partisipasi

Pada sub bab ini dibahas tentang hubungan antara faktor-faktor baik internal maupun eksternal dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat I, tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II, dan tahap Seminar Rancangan Rencana.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah antara faktor dan bentuk ada hubungannya dan bila ada hubungannya seberapa kuat hubungan tersebut. Hasil perhitungan tabulasi silang (*crosstab*) antara faktor-faktor dengan bentuk-bentuk partisipasi sebagaimana tabel IV.13 berikut ini:

TABEL IV.13
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE (χ^2) DAN CONTINGENCY
COEFFICIENT (CC) BENTUK PARTISIPASI

No	Variabel	Penjaringan Aspirasi I		Penjaringan Aspirasi II		Seminar Rancangan Rencana	
		χ^2	CC	χ^2	CC	χ^2	CC
A	Internal						
1	Jenis Kelamin	1,541	0,167	2,005	0,189	1,376	0,376
2	Usia	4,015	0,263	5,483	0,304	12,331	0,431
3	Pendidikan	13,176	0,443	7,928	0,358	19,112	0,511
4	Pekerjaan	14,852	0,264	14,118	0,455	30,326	0,600
5	Penghasilan	16,849	0,488	21,037	0,529	19,622	0,516
B	Eksternal						
6	Peran Pemda	3,128	0,234	2,318	0,203	3,761	0,255
7	Peran Konsultan	28,681	0,589	21,871	0,537	19,747	0,517
8	Peran Swasta	3,056	0,231	1,216	0,148	3,056	0,231

Sumber: Hasil analisis, 2006

Berdasarkan perhitungan tabulasi silang antara variabel internal dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat I,

tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II, dan tahap Seminar Rancangan Rencana menunjukkan bahwa semua variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak memiliki hubungan yang signifikan, kecuali variabel penghasilan pada tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II.

Antara variabel penghasilan dengan bentuk partisipasi masyarakat pada tahap penjaringan aspirasi masyarakat II keduanya ada hubungan antar variabel dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai *Chi Square* hitung > Nilai *Chi Square* tabel, maka H_0 ditolak berarti ada hubungan antar variabel.
- Nilai koefisien kontingensi variabel penghasilan 0,529 yang mendekati nilai 1 berarti hubungan antara kedua variabel sangat erat.

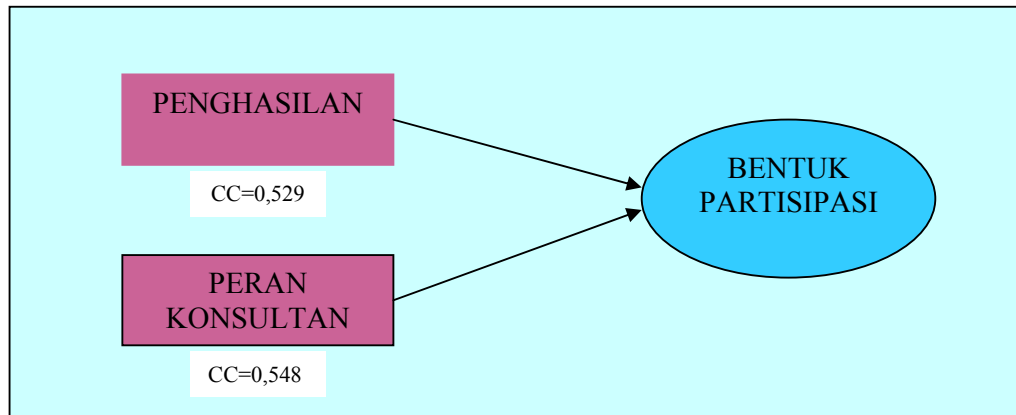
Dari hasil uji tabulasi silang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada tahap penjaringan aspirasi masyarakat II sangat dipengaruhi oleh faktor penghasilan, tetapi variabel internal yang lain tidak mempunyai pengaruh. Sedangkan bentuk partisipasi masyarakat pada tahap penjaringan aspirasi masyarakat I dan tahap seminar rancangan rencana tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal.

Adanya hubungan antara bentuk partisipasi dengan variabel penghasilan, berarti bahwa bentuk partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor penghasilan responden, karena besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan yang mencukupi akan mempengaruhi waktu luang masyarakat karena mereka tidak disibukkan lagi dengan mencari tambahan penghasilan sehingga lebih aktif untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan.

Sementara itu hasil perhitungan tabulasi silang antara faktor eksternal dengan bentuk partisipasi masyarakat pada tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat I, tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II, dan tahap Seminar Rancangan Rencana menunjukkan bahwa hanya variabel peran konsultan yang memiliki hubungan yang signifikan pada semua tahap. Hubungan antara variabel peran konsultan dan bentuk partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai *Chi Square* hitung > Nilai *Chi Square* tabel, maka H_0 ditolak berarti ada hubungan antar variabel.
- Nilai koefisien kontingensi rata-rata 0,548 yang mendekati nilai 1 berarti hubungan antara kedua variabel sangat erat.

Dari hasil uji tabulasi silang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada semua tahap sangat dipengaruhi oleh faktor peran konsultan. Sedang faktor peran pemerintah dan peran swasta tidak memberikan pengaruh pada bentuk partisipasi. Peran konsultan perencana boleh dikatakan sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam rencana kota. Mengingat bahwa penduduk perkotaan bukanlah masyarakat paguyuban yang serba homogen melainkan masyarakat patembayan yang heterogen. Sudah tentu persepsi dan aspirasi serta tuntutan kebutuhan mereka juga berbeda. Guna mengatasi masalah tersebut diperlukan komunikasi antara penentu kebijakan (pemerintah), perencana kota (konsultan) dan masyarakat. Secara lebih jelas hubungan ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini.



Sumber: Hasil analisis, 2006

GAMBAR 4.5
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA BENTUK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA PATI

Kesimpulannya bahwa dari uji tabulasi silang menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati sangat dipengaruhi oleh faktor penghasilan responden dan faktor peran konsultan perencana. Faktor peran konsultan perencana menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dari pada faktor penghasilan, ditunjukkan dengan nilai koefisien kontingensi (*Contingency Coefficient/CC*) yang lebih besar.

4.4.3.2 Hubungan Antara Faktor-Faktor dengan Tingkat Partisipasi

Pada sub bab ini dibahas tentang hubungan antara faktor-faktor baik internal maupun eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui apakah antara faktor dan tingkat ada hubungannya dan bila ada hubungannya seberapa kuat hubungan tersebut. Hasil perhitungan tabulasi silang (*crosstab*) antara faktor-faktor dengan tingkat partisipasi sebagaimana tabel IV.14 berikut ini:

TABEL IV.14
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE (χ^2) DAN CONTINGENCY
COEFFICIENT (CC) TINGKAT PARTISIPASI

No	Variabel	Tingkat Kehadiran dalam rapat		Keaktifan memberikan masukan		Keterlibatan menetapkan konsep		Keterlibatan memberikan persetujuan	
		χ^2	CC	χ^2	CC	χ^2	CC	χ^2	CC
A	Internal								
1	Jenis Kelamin	1,127	0,143	1,298	0,153	0,651	0,109	0,974	0,133
2	Usia	3,517	0,247	4,904	0,289	4,275	0,271	8,376	0,366
3	Pendidikan	10,613	0,405	23,978	0,555	11,524	0,419	14,897	0,465
4	Pekerjaan	9,205	0,382	24,889	0,562	23,538	0,551	15,865	0,477
5	Penghasilan	18,233	0,502	28,038	0,585	13,527	0,448	7,836	0,356
B	Eksternal								
6	Peran Pemda	0,927	0,130	0,869	0,126	3,103	0,233	2,326	0,203
7	Peran Konsultan	23,306	0,549	21,639	0,535	22,721	0,544	16,697	0,486
8	Peran Swasta	1,511	0,165	4,883	0,288	4,751	0,284	1,872	0,183

Sumber: Hasil analisis, 2006

Berdasarkan perhitungan tabulasi silang antara variabel internal dengan variabel tingkat partisipasi masyarakat, menunjukkan bahwa semua variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak memiliki hubungan yang signifikan, kecuali antara variabel penghasilan dengan variabel tingkat kehadiran dalam rapat dan antara variabel pendidikan dan penghasilan dengan keaktifan dalam memberikan masukan/saran/usul, memiliki hubungan yang signifikan.

Adanya hubungan antar variabel ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai *Chi Square* hitung > Nilai *Chi Square* tabel, maka H_0 ditolak berarti ada hubungan antar variabel.
- Nilai koefisien kontingensi variabel penghasilan rata-rata adalah 0,544 dan variabel pendidikan adalah 0,555 yang keduanya mendekati nilai 1 berarti hubungan antara kedua variabel sangat erat.

Dari hasil uji tabulasi silang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat pada variabel tingkat kehadiran dalam rapat sangat dipengaruhi oleh variabel penghasilan. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat pada variabel keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul sangat dipengaruhi oleh variabel pendidikan dan penghasilan.

Adanya hubungan antara tingkat partisipasi dengan variabel pendidikan, berarti bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan responden, karena salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

Adanya hubungan antara tingkat partisipasi dengan variabel penghasilan, berarti bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor penghasilan responden, karena besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan yang mencukupi akan mempengaruhi waktu luang masyarakat karena mereka tidak disibukkan lagi dengan mencari tambahan penghasilan sehingga lebih aktif untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan.

Sementara itu hasil perhitungan tabulasi silang antara faktor eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat pada variabel tingkat kehadiran dalam rapat, keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul, keterlibatan menetapkan konsep rencana, dan keterlibatan memberikan persetujuan pada rancangan rencana,

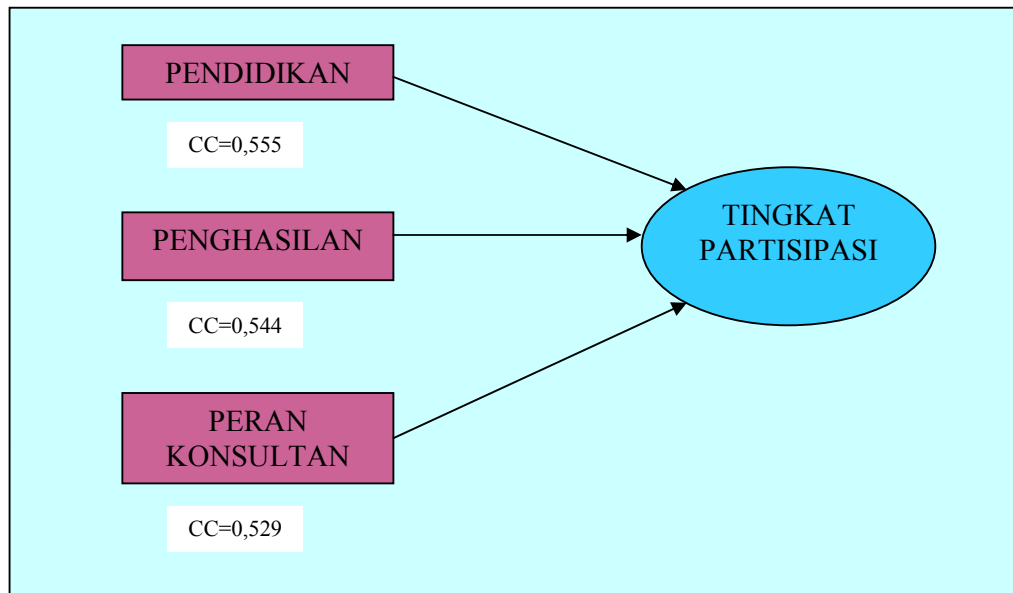
menunjukkan bahwa hanya variabel peran konsultan perencana yang memiliki hubungan yang signifikan pada semua variabel tingkat partisipasi.

Hubungan antara variabel peran konsultan dan tingkat partisipasi masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai *Chi Square* hitung > Nilai *Chi Square* tabel, maka H_0 ditolak berarti ada hubungan antar variabel.
- Nilai koefisien kontingensi rata-rata adalah 0,529 yang mendekati nilai 1 berarti hubungan antara kedua variabel sangat erat.

Dari hasil uji tabulasi silang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada semua variabel sangat dipengaruhi oleh faktor peran konsultan. Sedangkan faktor peran pemerintah dan peran swasta tidak memberikan pengaruh pada tingkat partisipasi.

Adanya hubungan antara tingkat partisipasi dengan variabel peran konsultan, berarti bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh peran konsultan perencana. Peran konsultan perencana boleh dikatakan sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam rencana kota, sebab dengan diakomodasinya masukan masyarakat akan menambah kepercayaan masyarakat pada hasil yang direncanakan. Lebih lanjut ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan. Secara lebih jelas hubungan ini dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut ini.



Sumber: Hasil analisis, 2006

GAMBAR 4.6
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA TINGKAT
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA PATI

Kesimpulannya bahwa dari uji tabulasi silang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan responden, faktor penghasilan responden, dan faktor peran konsultan perencana. Faktor pendidikan responden menunjukkan pengaruh yang paling kuat, kemudian diikuti pengaruh dari faktor penghasilan dan faktor peran konsultan, ditunjukkan dengan nilai koefisien kontingensi (*Contingency Coefficient/CC*) yang lebih besar.

4.5. Analisis Peran Stakeholder dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati

Upaya penataan ruang dalam mendukung pembangunan kota akan efektif dan efisien apabila prosesnya dilakukan secara terpadu dengan seluruh pelaku pembangunan (stakeholder). Faktor penting dalam perencanaan partisipatif adalah

bagaimana memutuskan dan melibatkan stakeholder-stakeholder perencanaan. Hal tersebut sangat terkait dengan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan dan kapasitasnya untuk bekerja bersama dalam kelompok. Secara umum ada tiga kelompok stakeholder yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Keberhasilan perencanaan sangat tergantung pada bagaimana proses perencanaan dijalankan, dengan demikian sangat penting untuk melibatkan stakeholder pembangunan dalam proses pembangunan, dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dan komitmen.

Pada sub bab ini dibahas tentang peran stakeholder dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Dan untuk mengetahui peran stakeholder dalam setiap tahapan proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, dapat dilihat pada bagan berikut ini.

TABEL IV.15
BAGAN TAHAPAN PROSES PERENCANAAN DAN PERAN TIAP STAKEHOLDER
DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

Tahap Persiapan	Tahap Penentuan Arah pengembangan	Tahap Perumusan Rencana	Tahap Penetapan Rencana
<p><i>Kegiatan</i> <i>Pengumuman rencana penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati</i> Pengumuman dilakukan melalui surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan dalam wilayah perencanaan, Camat Pati, Dinas/Instansi Kabupaten Pati dan forum pertemuan di tingkat kecamatan.</p>	<p><i>Kegiatan</i> <i>Penjaringan Aspirasi Masyarakat I dan II</i> Penjaringan Aspirasi Masyarakat dilakukan 2 kali, merupakan forum pertemuan untuk mendapatkan masukan dalam penentuan arah pengembangan dan pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan</p>	<p><i>Kegiatan</i> <i>Seminar/Semiloka dan Pengumuman Rancangan Rencana</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seminar/semiloka adalah forum pertemuan dalam rangka perumusan perencanaan tata ruang dan penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Seminar dilaksanakan 1 kali. ▪ Pengumuman rancangan rencana kepada masyarakat melalui surat pemberitahuan kepada kepala desa/kelurahan dalam wilayah perencanaan, Camat Pati, Dinas/Instansi Kabupaten Pati dan forum pertemuan di tingkat kecamatan. Pengumuman dilaksanakan paling sedikit 7 hari. 	<p><i>Kegiatan</i> <i>Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah dan Dokumen RUTRK</i> Setelah dilakukan penyempurnaan rancangan rencana, Bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah beserta Dokumen RUTRK kepada DPRD Kabupaten untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Rancangan peraturan daerah sampai sekarang belum dibahas/disahkan oleh DPRD</p>
<p><i>Peran Stakeholder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> - Bappeda sebagai penanggung 	<p><i>Peran Stakeholder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> - Bappeda memfasilitasi pelaksanaan forum. 	<p><i>Peran Stakeholder dalam Seminar/Semiloka</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> - Bappeda memfasilitasi 	<p><i>Peran Stakeholder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> - Bappeda sebagai penanggung jawab

<p>Jawab kegiatan berperan memberikan informasi pengumuman kepada masyarakat dan Dinas/Instansi serta Camat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas/Instansi dan Camat Sebagai pihak yang menerima Informasi pengumuman. • Peran Masyarakat dan Swasta: <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan swasta melalui Kepala Desa/Kelurahan sebagai pihak yang diberi informasi pengumuman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas/Instansi sebagai peserta dalam forum pertemuan. • Peran Masyarakat: Kepala Desa/Kelurahan dan perwakilan masyarakat yang diundang sebagai peserta forum pertemuan. • Peran Pihak Swasta: Pihak Swasta (LSM dan Pengembang) yang dilibatkan sebagai peserta forum pertemuan. • Konsultan perencana berperan sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam rencana kota 	<p>pelaksanaan forum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas/Instansi sebagai peserta dalam forum pertemuan. • Peran Masyarakat: Kepala Desa/Kelurahan dan perwakilan masyarakat yang diundang sebagai peserta forum pertemuan. • Peran Pihak Swasta: Pihak Swasta (LSM dan Pengembang) yang dilibatkan sebagai peserta forum pertemuan. • Konsultan perencana berperan sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam rencana kota <p><i>Peran Stakeholder dalam Pengumuman Rancangan Rencana</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> - Bappeda sebagai penanggung Jawab kegiatan berperan memberikan informasi pengumuman kepada masyarakat dan Dinas/Instansi serta Camat. - Dinas/Instansi dan Camat Sebagai pihak yang menerima Informasi pengumuman. 	<p>kegiatan berperan menyiapkan Dokumen RUTRK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Hukum Setda menyiapkan rancangan Peraturan Daerah.
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Peran Masyarakat dan Swasta: <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan swasta melalui Kepala Desa/Kelurahan sebagai pihak yang diberi informasi pengumuman. 	
<p><i>Tingkat Partisipasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat partisipasi adalah <i>informing</i> (informasi). ➤ Pemberian informasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, tidak ada umpan balik dari masyarakat maupun dinas/instansi. 	<p><i>Tingkat Partisipasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat partisipasi adalah <i>Consultation</i> (konsultasi). ➤ Partisipasi masyarakat atas dasar inisiatif pemerintah. ➤ Peserta memberikan masukan/saran/usul/pendapat/pertimbangan kepada pemerintah pada saat pelaksanaan forum. ➤ Terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan peserta. Dan masyarakat memberikan masukan lewat cara dialog dua arah. ➤ Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. 	<p><i>Tingkat Partisipasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat partisipasi adalah <i>Consultation</i> (konsultasi). ➤ Partisipasi masyarakat atas dasar inisiatif pemerintah. ➤ Peserta memberikan masukan/saran/usul/pendapat/pertimbangan kepada pemerintah pada saat pelaksanaan forum. ➤ Terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan peserta. Dan masyarakat memberikan masukan lewat cara dialog dua arah. ➤ Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. 	<p><i>Tingkat Partisipasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak ada partisipasi masyarakat dan swasta.
<p><i>Waktu</i></p> <p>Pengumuman dilaksanakan minimal 7 hari.</p> <p>Pelaksanaan bulan Juli 2004</p>	<p><i>Waktu</i></p> <p>Penjaringan Aspirasi Masyarakat I dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2004.</p> <p>Penjaringan Aspirasi Masyarakat II</p>	<p><i>Waktu</i></p> <p>Seminar/semiloka dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2004.</p> <p>Pengumuman rancangan rencana dilaksanakan pada pertengahan bulan</p>	<p><i>Waktu</i></p> <p>Penyiapan dokumen RUTRK dan rancangan peraturan daerah dilaksanakan pada tahun 2005.</p>

	dilaksanakan pada tanggal 22 September 2004.	Desember 2004.	
--	---	----------------	--

Sumber: Hasil analisis, 2006

- Pada tahap persiapan dengan kegiatan pengumuman rencana penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

Pada tahap ini yang paling berperan adalah pemerintah melalui BAPPEDA, sebagai penanggung jawab kegiatan bertugas memberikan informasi pengumuman kepada masyarakat/swasta, dinas/instansi dan camat. Sedangkan peranan masyarakat dan swasta hanya sebagai pihak penerima pengumuman.

Akan tetapi karena media yang digunakan untuk mengumumkan hanya lewat surat dan forum pertemuan serta tidak melalui media cetak (koran, majalah) dan media elektronik (radio, tv, internet), maka informasi yang disampaikan tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam wilayah perencanaan dan bisa dikatakan sebagai kurang transparan.

Dengan demikian tingkat partisipasinya hanya sampai pada tingkat *informing* (tingkat ketiga dari tangga Arnstein), karena pemberian informasi hanya bersifat satu arah dari pemerintah kepada masyarakat tanpa adanya kesempatan umpan balik.

- Pada tahap penentuan arah pengembangan dengan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat I dan II.

Pada tahap ini peran pemerintah juga masih sangat dominan sedangkan peran masyarakat dan swasta tergolong rendah.

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan forum pertemuan untuk mendapatkan masukan dalam penentuan arah pengembangan dan pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan. Dalam kegiatan ini peserta forum termasuk masyarakat dan swasta yang dilibatkan, memberikan masukannya dalam bentuk saran/usul/pendapat secara lisan maupun tertulis.

Meskipun pada saat forum pertemuan berlangsung telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan peserta termasuk masyarakat dan pihak swasta, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Oleh sebab itu tingkat partisipasinya digolongkan dalam tingkat *consultation* (konsultasi), yang merupakan tangga keempat dari tangga Arnstein.

- Tahap perumusan rencana dengan kegiatan seminar/semiloka dan pengumuman rancangan rencana.

Demikian juga yang terjadi pada saat seminar/semiloka rancangan rencana, pelaksanaan kegiatan/forum pertemuan dan tingkat partisipasinya sama dengan pada tahap penentuan arah pengembangan, yaitu hanya sampai pada tingkat *consultation* (konsultasi).

Pada tahap ini peran pemerintah masih tetap dominan dibandingkan dengan peran masyarakat dan swasta.

- Tahap penetapan rencana dengan kegiatan penyiapan rancangan peraturan daerah dan dokumen RUTRK.

Pada tahap ini peranan pemerintah sangat mendominasi dan tidak ada partisipasi dari masyarakat maupun pihak swasta sama sekali.

Meskipun rancangan peraturan daerah dan dokumen RUTRK telah disiapkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai dengan saat ini ternyata belum pernah dibahas dan ditetapkan oleh DPRD Kabupaten. Belum ditetapkannya peraturan daerah tentang RUTRK Pati oleh legislatif berarti bahwa rencana tata ruang yang dibuat tidak *legal friendly*, sebagaimana menurut Kiprah (2001:22) bahwa suatu rencana tata ruang hendaknya adalah *legal friendly*, yang berarti mempunyai kepastian hukum dan masyarakat dapat memperoleh kemudahan-kemudahan untuk melakukan investasinya. Selain itu rencana tata ruang merupakan

instrumen penting bagi pembangunan sehingga penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan pengesahan oleh lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Akibat belum adanya peraturan daerah, secara legal kurang memiliki kekuatan mengikat, sehingga banyak dijumpai terjadinya penyimpangan.

Pemerintah memiliki peran dominan dalam pembangunan, sebagai pengatur dan menyediakan pelayanan dasar bagi publik. Selain itu dengan otonomi daerah, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah menjadi bertambah besar dalam hal pengelolaan pembangunan di daerah. Meskipun peran pemerintah masih dominan, akan tetapi dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, menghendaki partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah.

Kesimpulannya bahwa peran tiap pelaku pembangunan (stakeholder) dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati masih didominasi oleh peran pemerintah, sedangkan peran masyarakat dan swasta relatif tidak terlalu besar.

4.6. Analisis Tingkat Partisipasi terhadap Hasil Pembangunan

Pada sub bab ini dianalisis tentang hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati terhadap hasil pembangunan, yaitu:

Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati akan berpengaruh terhadap rencana tata ruang yang dihasilkan. Dan rencana tata ruang sebagai hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang memuat tentang kerangka dan prinsip-prinsip untuk memberikan arahan lokasi pembangunan dan infrastruktur. Untuk itu perlu diketahui apakah rencana tata ruang telah dijadikan

sebagai acuan pembangunan oleh pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat dan swasta.

Dengan tingkat partisipasi masyarakat yang hanya mencapai tingkat keempat atau *consultation* ini, masih pada tingkat *tokenism* dan belum mencapai tingkat kekuatan masyarakat, tetapi pada tingkat ini telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Jadi peran pemerintah masih tetap besar. Hal ini akan berpengaruh pada rencana tata ruang yang dihasilkannya dan juga berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan.

Pada kenyataannya dari hasil observasi lapangan menunjukkan masih banyak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta. Hal ini menunjukkan bahwa rencana tata ruang yang ada tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Adanya penyimpangan ini sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, dikarenakan oleh: (1) pemberian informasi oleh pemerintah dianggap masih terlalu sedikit; (2) sifat pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang masih atas dasar inisiatif pemerintah; (3) proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang tidak sepenuhnya mengacu peraturan yang ada; dan (4) kurangnya sosialisasi rencana kepada masyarakat dan swasta.

Sementara itu bagi pemerintah sendiri, ternyata bahwa produk rencana tata ruang yang ada tidak sepenuhnya dipakai sebagai acuan dalam proses penyusunan usulan program pembangunan. Tujuan penyusunan usulan program pembangunan sesuai tata ruang adalah untuk terwujudnya keselarasan antara program

pembangunan dan rencana tata ruang, sehingga pembangunan yang dihasilkan dapat efektif dan efisien.

Tidak digunakannya rencana tata ruang dalam penyusunan usulan pembangunan ini terlihat dari usulan jenis program/kegiatan dan lokasi program/kegiatan yang tidak sesuai dengan arahan dalam rencana tata ruang, menyebabkan program/kegiatan pembangunan tersebut berada di lokasi yang tidak sesuai arahan dalam rencana tata ruang.

Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu: pertama, masih adanya usulan yang tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang menunjukkan bahwa terdapat *informal planning* dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana pendapat Briassoulis (1997:105-117) bahwa dalam kenyataannya *informal planning* ini berjalan beriringan atau tergabung dengan *formal planning* memang selalu terjadi. Dan salah satu karakteristik *informal planning* adalah bahwa perencanaan tersebut tidak dilakukan oleh perencana profesional atau mereka yang memiliki latar belakang dalam bidang perencanaan sehingga rencana yang diusulkan dapat dikatakan tidak memiliki perspektif jangka panjang. *Informal planning* ini terjadi dalam bentuk alokasi untuk usulan yang berasal dari anggota legislatif atau kepala daerah atau program dari pemerintah tingkat atas (provinsi dan pusat) yang kadang-kadang tidak dikonsultasikan lebih dahulu dengan pemerintah daerah. Jadi kepentingan politik masih menjadi prioritas dari program-program tersebut.

Penyebab kedua, berkaitan dengan proses penyusunan usulan program pembangunan, bahwa belum sepenuhnya rencana tata ruang digunakan sebagai acuan karena alasan pengetahuan terhadap keberadaan rencana tata ruang, dan pemahaman terhadap substansi rencana tata ruang. Kenyataannya belum seluruh

instansi mengetahui keberadaan rencana tata ruang menunjukkan kurangnya informasi dan sosialisasi rencana ke seluruh instansi. Sementara itu juga tidak seluruh instansi yang telah mengetahui adanya rencana tata ruang secara langsung akan menggunakannya, karena kurang memahami substansi rencana tata ruang sebab strategi pemanfaatan ruang yang tercantum dalam rencana umum tata ruang Kota Pati, dianggap masih terlalu umum dan kurang detail. Untuk itu di masa mendatang diperlukan rencana yang lebih detail lagi, agar mudah dipahami oleh instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sebagaimana menurut Budihardjo dan Sujarto (2005:208), bahwa perencanaan tata ruang kota selama ini masih saja cenderung terlalu berorientasi pada pencapaian tujuan ideal berjangka panjang, yang sering meleset akibat banyaknya ketidakpastian. Di sisi lain terdapat jenis-jenis perencanaan yang disusun dengan landasan pemikiran pemecahan masalah secara *ad hoc* yang berjangka pendek, kurang berwawasan luas. Seyogyanya pendekatan yang diambil mencakup keduanya.

Hal ini senada dengan pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2003:6), bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Demikian juga halnya dengan rencana tata ruang hendaknya juga dapat dilaksanakan dan dapat diterapkan, sehingga partisipasi dari stakeholder sangat besar peranannya dalam penyusunan rencana tata ruang.

Kesimpulannya bahwa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang hanya sampai pada tingkat konsultasi, akan berpengaruh pada rencana tata ruang yang

dihasilkan. Akibatnya rencana tata ruang yang telah dihasilkan, tidak sepenuhnya dipakai sebagai acuan pembangunan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Terbukti masih adanya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta, serta masih adanya pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah yang tidak sesuai arahan dalam rencana tata ruang.

4.7. Analisis Komprehensif Partisipasi Masyarakat

Pada sub bab ini dibahas tentang rangkuman secara komprehensif partisipasi masyarakat yang meliputi kajian kebijakan, bentuk partisipasi, tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, peran setiap stakeholder, serta kaitan tingkat partisipasi dengan hasil pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kajian partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

Dari hasil analisis pada sub bab terdahulu tentang kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati dapat dibuat kesimpulannya bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam proses partisipasi masyarakat pada penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, antara normatif (Peraturan Menteri Dalam Negeri) dan dalam praktek senyatanya. Perbedaan terletak pada media yang digunakan untuk pemberian informasi, jangka waktu pemberian masukan dari masyarakat, dan sifat pelibatan masyarakat. Proses penyusunan secara normatif menurut Permendagri dianggap sebagai proses partisipasi yang ideal, dan bila ada ketidak sesuaian proses atau ada perbedaan proses partisipasi dalam praktek dengan Permendagri dapat diartikan sebagai proses partisipasinya kurang ideal.

Oleh karena media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tidak secara terbuka lewat media cetak dan elektronik, maka bisa dikatakan bahwa proses yang terjadi kurang transparan. Jadi yang seharusnya memenuhi prinsip *political friendly* (Kiprah, 2001:22) tidak tercapai, sebab suatu rencana tata ruang hendaknya adalah *political friendly* yaitu demokratisasi dan transparansi menjadi kebutuhan dalam seluruh rangkaian proses penyusunannya.

Sementara itu berkaitan dengan konsep *good governance*, transparansi merupakan salah satu prinsip penting yang perlu diterapkan sejak tahap awal pada suatu proses penyusunan rencana tata ruang. Tanpa transparansi, maka prinsip-prinsip *good governance* lainnya akan sulit untuk diterapkan dengan baik. Karena sebagai prasyarat untuk menumbuhkan dan meningkatkan peran serta, maka transparansi proses penyusunan rencana tata ruang akan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam proses tersebut (Zulkaidi dan Sari, 2004:48).

Akibat kurang transparan dan kurang tersosialisasi dengan baik, masyarakat kurang antusias untuk ikut berpartisipasi memberikan masukannya dengan inisiatif sendiri, sehingga yang telah terjadi adalah bahwa partisipasi masyarakat masih atas dasar inisiatif pemerintah. Masih kurang transparannya proses penyusunan rencana tata ruang berkaitan dengan bentuk penyampaian/pengumuman yang mampu mengakomodasi pendapat pihak-pihak terkait dan mengenai variasi media penyampaian informasi/pengumuman yang digunakan. Menurut Zulkaidi dan Sari (2004:54-56), bentuk penyampaian pengumuman seharusnya dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar, rapat koordinasi, wawancara dan kuesioner maupun forum pertemuan, sedangkan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi harus bervariasi dengan frekuensi yang cukup sering dan disampaikan dalam jangka waktu yang cukup lama (7 hari).

Sementara itu berkaitan dengan prinsip demokratisasi sebagaimana menurut Kiprah (2001:22) ternyata bahwa dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati ini belum mencapai prinsip tersebut. Karena partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *man-centered development*, yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan sendiri. Menurut Tjokrowinoto (1999:218), konsep ini memberikan peranan kepada individu, bukan sebagai objek akan tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka. Karenanya paradigma ini memberi tempat yang penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal, menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.

Lebih lanjut disebutkan bahwa konsep ini menekankan pentingnya "pemampuan" (*empowerment*) manusia, kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia. Proses ini menumbuhkan *conscientization* manusia, kesadaran akan kediriannya (*self-hood*), yang memungkinkan mereka untuk secara kritis melihat situasi sosial yang melingkupi eksistensinya (Tjokrowinoto, 1999:29).

Konsep ini kemudian melandasi wawasan pembangunan melalui pendekatan pelibatan masyarakat secara langsung (*community base development*). Namun partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati ini baru dilaksanakan dengan inisiatif pemerintah dan bukan atas inisiatif masyarakat sendiri. Sehingga pemberdayaan yang diharapkan dari hasil pelibatan masyarakat yang demikian masih sangat kecil. Karena secara teoritis konsep pemberdayaan

masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan (Rubins dalam Sumaryadi, 2005:95). Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pertama, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); kedua, penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*); dan ketiga, pemberdayaan yang juga berarti melindungi (Sumaryadi, 2005: 111-112).

Berkaitan dengan teori *conscientization* (keadilan) dimana didalamnya terdapat pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, ternyata tidak ditemui dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Karena yang terjadi adalah ketidak seimbangan dan ketidak setaraan berkaitan dengan dominansi peran pemerintah dibanding peran masyarakat dan swasta. Ketidak setaraan terjadi karena proses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta tidak berjalan baik. Pendekatan ini akan berjalan baik jika inisiatif partisipasi muncul dari kesadaran masyarakat yang telah berdaya dan setara secara kemampuan. Untuk itu proses pendidikan adalah usaha untuk mencapai hal tersebut, salah satunya dengan pemberian informasi dan sosialisasi yang mencukupi.

Karena ada ketidak sesuaian proses atau ada perbedaan proses partisipasi dalam praktek senyatanya dengan Permendagri, keadaan seperti ini setidaknya akan berpengaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat.

Oleh karena proses partisipasi yang demikian tersebut, maka bentuk-bentuk partisipasi yang dihasilkannya didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/saran/usul dan sumbangan informasi/data, dengan prosentase mencapai 74%. Dengan prosentase yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa telah ada kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Kemauan berarti

masyarakat memiliki motivasi untuk terlibat, sedang kemampuan berarti masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi karena memiliki informasi, pengetahuan, ketrampilan, dan rasa kebersamaan. Dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut, masyarakat kemudian berpartisipasi dalam bentuk memberikan informasi, dan menyumbangkan pendapat, serta hadir dalam pertemuan.

Meskipun demikian dari hasil jawaban responden pada pertanyaan terbuka dalam kuesioner tentang usulan bentuk partisipasi masyarakat, cukup banyak juga responden yang mengusulkan bentuk lain, tidak hanya sumbangan masukan/saran/usul atau sumbangan informasi/data saja, seperti misalnya bentuk kerjasama dengan pemerintah dalam penyusunan dan bentuk bantuan tenaga ahli dari masyarakat. Ini menunjukkan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan lebih jauh dalam penyusunan rencana tata ruang pada masa mendatang.

Kebijakan proses partisipasi yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, juga dapat mempengaruhi pada tingkat partisipasi masyarakat. Dari hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat, secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati menurut tipologi Arnstein masuk dalam kategori *Consultation* (konsultasi), yang merupakan tangga keempat dari delapan tangga partisipasi masyarakat Sherry Arnstein.

Pada tingkat ini mulai terlihat adanya saling tukar informasi antara pihak pemerintah dan masyarakat, yang memungkinkan keterlibatan individu dalam suatu program. Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat, dengan cara dilibatkannya wakil masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah. Meskipun telah terjadi dialog dua arah,

akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

Pada tingkat *Consultation* ini termasuk dalam derajat tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Devitt (1974) dalam Santosa dan Heroepoetri (2005:5), bahwa program partisipasi masyarakat membuka kemungkinan meningkatnya akses masyarakat kedalam proses pembuatan keputusan masih belum tercapai atau bisa dikatakan komitmen terhadap sistem demokrasi belum bisa terpenuhi.

Karena adanya ketidak sesuaian proses atau adanya perbedaan proses partisipasi dalam praktek dengan Permendagri, maka menjadikan tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai pada tingkat keempat (*Consultation*). Padahal menurut Arnstein tingkat partisipasi yang paling ideal bila berada pada tingkatan derajat kekuatan masyarakat (*Degree of Citizen Power*), yaitu pada tingkat ke-6 (*Partnership/Kerjasama*), ke-7 (*Delegated Power/Pendelegasian Kekuasaan*), dan ke-8 (*Citizen Control/Kontrol Masyarakat*).

Berkaitan dengan teori Arnstein ini dijelaskan bahwa alasan yang dipakai Arnstein dalam teori Tangga Partisipasi Masyarakat ini yaitu partisipasi masyarakat adalah sebuah istilah pengkategorian untuk kekuasaan masyarakat, yaitu redistribusi kekuasaan untuk memberikan akses kepada masyarakat miskin yang terjadi di Amerika Serikat. Dan ini agak berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Karena keterbatasan sumber daya dan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk

mencukupi seluruh pelayanan dasar kepada publik, dengan demikian masyarakat yang terabaikan bukan hanya masyarakat miskin saja namun juga mayoritas masyarakat. Dengan demikian, perencanaan partisipatif di Indonesia bukan hanya memberdayakan masyarakat miskin saja, namun juga berarti pelibatan pihak-pihak terkait sumber daya dari masyarakat dan sektor swasta dalam upaya mendukung program pembangunan.

Sementara itu dari jawaban responden terhadap pertanyaan terbuka pada kuesioner tentang usulan tingkat partisipasi masyarakat, sebagian besar responden berharap atau mengusulkan usulan-usulan yang menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya lebih tinggi lagi, lebih dari sekedar tingkat *Consultation (Degree of Tokenism)* saja, seperti masukan/saran/usul dari masyarakat agar lebih memberi pengaruh pada rencana, dialog antara pemerintah dan masyarakat lebih diintensifkan, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan keputusan, berbagi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat, dan masyarakat diberi kewenangan membuat keputusan pada rencana.

Dari hasil uji tabulasi silang sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat yang meliputi faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang berpengaruh pada bentuk partisipasi adalah faktor penghasilan. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan yang mencukupi akan mempengaruhi waktu luang masyarakat karena mereka tidak disibukkan lagi dengan mencari tambahan penghasilan sehingga lebih aktif untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan. Dari hasil kuesioner

diperoleh bahwa penghasilan responden sebagian besar berada pada tingkat penghasilan cukup tinggi (70,4%).

Sementara faktor eksternal yang berpengaruh pada bentuk partisipasi masyarakat adalah faktor peran konsultan. Peran konsultan perencana boleh dikatakan sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam rencana kota, sebab dengan diakomodasinya masukan saran pendapat usulan masyarakat akan menambah kepercayaan masyarakat pada hasil yang direncanakan.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat juga meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berpengaruh adalah faktor pendidikan dan faktor penghasilan. Bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan responden, karena salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. Hasil distribusi frekuensi menunjukkan pendidikan responden berupa pendidikan menengah (SMA) sampai tinggi (Sarjana) mencapai 94,4%.

Adanya hubungan antara tingkat partisipasi dengan variabel penghasilan, berarti bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor penghasilan responden, karena besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan yang mencukupi akan mempengaruhi waktu luang masyarakat karena mereka tidak

disibukkan lagi dengan mencari tambahan penghasilan sehingga lebih aktif untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan.

Faktor eksternal yang berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat adalah faktor peran konsultan. Peran konsultan perencana boleh dikatakan sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam rencana kota, sebab dengan diakomodasinya masukan saran pendapat usulan masyarakat akan menambah kepercayaan masyarakat pada hasil yang direncanakan. Sesuai dengan pendapat Conyers (1994:186), bahwa pertama, masyarakat tidak akan berpartisipasi atas kemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi kalau mereka merasa bahwa partisipasi tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir, dan kedua, masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik minat atau aktivitas yang tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan. Senada dengan pendapat Santosa dan Heroepoetri (2005:5) bahwa salah satu manfaat dari partisipasi masyarakat adalah bahwa masyarakat bisa menjadi sumber informasi yang berguna. Masyarakat sekitar dalam keadaan tertentu akan menjadi pakar yang baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengalaman yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.

Sementara itu dari jawaban responden atas pertanyaan terbuka kuesioner tentang persepsi masyarakat terhadap metode partisipasi yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, sebagian besar responden menyatakan masih kurang memadai karena pemberian informasi pemerintah kepada masyarakat dianggap masih kurang

mencukupi, jumlah masyarakat yang terlibat atau dilibatkan baru sedikit dan juga jumlah stakeholder lain yang terlibat atau dilibatkan jumlahnya masih terlalu sedikit.

Dengan melihat persepsi masyarakat terhadap metode partisipasi yang demikian tersebut, maka dari jawaban terbuka kuesioner, masyarakat berharap agar di masa-masa mendatang ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang. Sebagian besar responden berharap agar ada peningkatan penyebaran informasi rencana penyusunan rencana tata ruang melalui media cetak dan elektronik, peningkatan pembinaan pemerintah kepada masyarakat lewat penyuluhan atau sosialisasi, peningkatan jumlah masyarakat dan stakeholder lain yang terlibat dalam partisipasi pada setiap penyusunan rencana tata ruang. Hal ini juga terungkap dari hasil wawancara dengan Dinas, Pengembang dan Konsultan, serta diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bappeda bahwa di masa mendatang, proses pelibatan/partisipasi masyarakat selain akan dilakukan dengan undangan kepada perwakilan masyarakat yang terpilih juga akan dilakukan secara terbuka lewat media cetak dan elektronik (radio).

Dari hasil analisis peran setiap stakeholder dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati diperoleh bahwa peran tiap pelaku pembangunan (stakeholder) masih didominasi oleh peran pemerintah, sedangkan peran masyarakat dan swasta relatif tidak terlalu besar. Hal ini terbukti dari tingkat partisipasi masyarakat baru mencapai tingkat konsultasi belum mampu mencapai derajat kekuatan masyarakat (*degree of citizen power*), dan juga sifat pelibatan masyarakat dan swasta masih atas inisiatif pemerintah bukan atas inisiatif masyarakat sendiri. Dengan melihat keadaan ini maka tujuan partisipasi untuk mensinergikan seluruh sumberdaya guna mendukung proses perencanaan tidak tercapai. Dengan kata lain tujuan untuk menentukan kesepakatan bersama guna memutuskan tindakan di masa

yang akan datang juga tidak optimal karena dominasi peran pemerintah. Rendahnya peran masyarakat dan swasta akan berakibat pada rendahnya dukungan dan komitmen, serta akan mempengaruhi pemanfaatan rencana tata ruang yang telah dihasilkan, atau bisa berakibat inkonsistensi pada pemanfaatan rencana.

Sementara itu hasil analisis kaitan tingkat partisipasi dengan hasil pembangunan mengungkapkan bahwa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang hanya sampai pada tingkat konsultasi, akan berpengaruh pada rencana tata ruang yang dihasilkan. Pada tingkat dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Akibatnya rencana tata ruang yang telah dihasilkan, tidak sepenuhnya dipakai sebagai acuan pembangunan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Terbukti masih adanya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta, serta masih adanya pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah yang tidak sesuai arahan dalam rencana tata ruang. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah juga disebabkan karena produk rencana tata ruang yang tidak *user friendly*. Menurut Kiprah (2001:22), bahwa rencana tata ruang hendaknya bersifat *user friendly* yaitu mudah dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Sosialisasi perlu dilakukan terus menerus, sehingga masyarakat mudah memahami rencana dan perkembangan yang terjadi. Berkaitan dengan RUTRK Pati, sosialisasi secara formal oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagai Tim yang bertanggung jawab untuk sosialisasi memang belum pernah dilakukan, tetapi materi RUTRK telah disampaikan dalam berbagai forum yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Dengan demikian salah satu fungsi rencana tata ruang sebagai alat kontrol pembangunan sebagaimana pendapat Cadman dan Crowe (1991:143) tidak terwujud. Seharusnya peran serta masyarakat termasuk juga swasta dalam penataan ruang didayagunakan untuk menjalankan peran kontrol sehingga dapat mencegah penyimpangan tata ruang (Santosa dan Heroepoetri, 2005:10). Akan tetapi dalam penataan ruang di Kota Pati, peran kontrol ini tidak berjalan dengan baik karena prasyarat untuk menjalankan peran kontrol yang efektif tidak terpenuhi yaitu: (1) akses masyarakat yang luas terhadap informasi tata ruang; (2) kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya berperan serta; dan (3) kemampuan memahami obyek permasalahan. Sebagaimana pendapat Budihardjo dan Sujarto (2005:208), bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang seharusnya mekanisme *development control* yang ketat agar ditegakkan, lengkap dengan sanksi (dis-insentif) buat yang melanggar dan bonus (insentif) bagi mereka yang taat pada peraturan.

Dari hasil kajian tingkat partisipasi masyarakat seperti diuraikan diatas, ternyata telah ada kesesuaian dengan teori Moughtin (1992:17) tentang Skala Analisis Partisipasi Masyarakat, yaitu:

- Bahwa di wilayah studi unit spasial yang digunakan adalah spasial kota kecil.
- Tingkat partisipasinya adalah masuk dalam kategori derajat penghargaan (*degree of tokenism*), yang meliputi tingkat *informing*, *consultation*, dan *placation*. Khususnya dalam kajian penelitian ini tingkat partisipasi termasuk dalam *consultation*.
- Teknik partisipasinya adalah pertemuan masyarakat.
- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan demokrasi perwakilan, yaitu dengan perwakilan masyarakat.

- o Bentuk perencanaannya berupa rencana struktur.

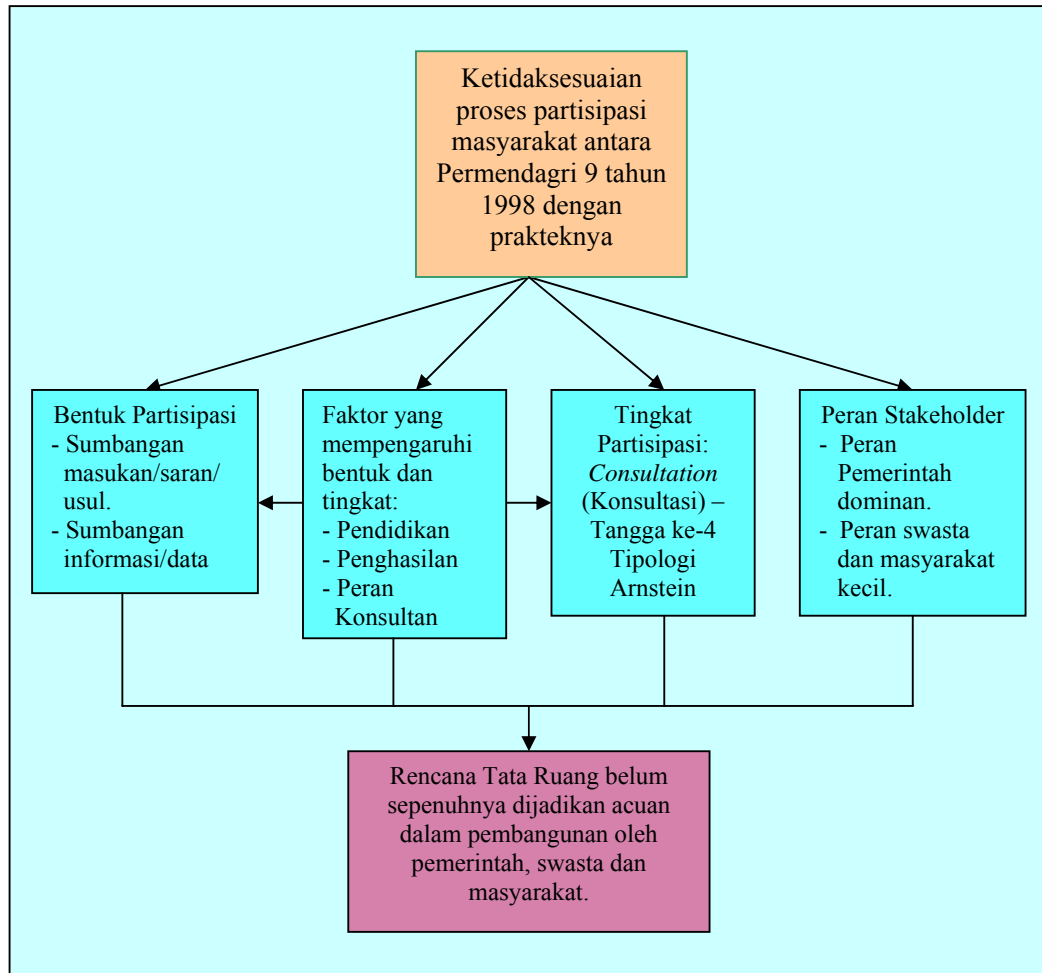
Untuk melihat kesesuaian dengan Skala Analisis Partisipasi Masyarakat menurut Moughtin sebagaimana terlihat pada Tabel IV.16 berikut ini.

TABEL IV.16
SKALA ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT

TEKNIK PARTISIPASI	TINGKAT PARTISIPASI		PENGAMBILAN KEPUTUSAN	UNIT SPASIAL	BENTUK PERENCANAAN
<i>Pertemuan Masyarakat:</i> Dilaksanakan dalam forum pertemuan dengan melibatkan masyarakat pada tahap penjangkaran aspirasi masyarakat I, II, dan seminar.	<i>Konsultasi:</i> Pemerintah mengundang opini masyarakat dengan dilibatkan dalam perencanaan. Telah terjadi dialog dua arah meskipun tingkat keberhasilannya rendah.	<i>Derajat Penghargaan (Degree of Tokenism):</i> Masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat tetapi tidak ada jaminan bahwa pandangannya akan dipertimbangkan	<i>Demokrasi Perwakilan:</i> Yaitu dengan perwakilan masyarakat desa/kelurahan wilayah perencanaan yang memperoleh undangan untuk terlibat berpartisipasi dalam proses perencanaan.	<i>Kota Kecil:</i> Kota Pati termasuk dalam kategori kota kecil	<i>Rencana Struktur:</i> Meliputi pengaturan struktur pemanfaatan ruang dan pengaturan pola pemanfaatan ruang, dengan prosentase sama besarnya.

Sumber: Hasil analisis, 2006 adaptasi dari Moughtin (1992:17)

Dari hasil kajian secara komprehensif sebagaimana telah diuraikan diatas, maka diperoleh suatu hubungan antara kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati dengan bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, faktor-faktor yang berpengaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi, dan peran stakeholder dalam perencanaan, serta kaitannya dengan hasil pembangunan, dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut ini.



Sumber: Hasil analisis, 2006

GAMBAR 4.7
DIAGRAM HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG DENGAN BENTUK, TINGKAT, FAKTOR
PENGARUH, PERAN STAKEHOLDER DAN HASIL PEMBANGUNAN

Kesimpulannya dari gambar 4.7 diatas adalah menjelaskan bahwa karena adanya ketidaksesuaian proses partisipasi masyarakat antara Permendagri dan dalam prakteknya, dapat diartikan sebagai proses partisipasinya kurang ideal, sebab proses penyusunan secara normatif menurut Permendagri dianggap sebagai proses partisipasi yang ideal, dan bisa juga dikatakan prosesnya kurang transparan. Karena kurang idealnya proses ini mempengaruhi bentuk partisipasinya hanya didominasi berupa bentuk sumbangan masukan/saran/usul dan sumbangan informasi/data, tidak

terdapat bentuk lain yang lebih memerlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah seperti bentuk kerjasama dalam penyusunan dan bantuan tenaga ahli dari masyarakat. Karena kurang idealnya proses ini juga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat hanya sampai tingkat *consultation* (konsultasi) yaitu pemerintah mengundang opini masyarakat dengan cara dilibatkan dalam proses perencanaan dan tingkat ini bisa digolongkan kedalam derajat penghargaan (*degree of tokenism*), dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat tetapi tidak ada jaminan bahwa pandangannya akan dipertimbangkan. Bentuk partisipasi yang ada ini sangat dipengaruhi oleh faktor penghasilan dan faktor peran konsultan, sedangkan tingkat partisipasi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, penghasilan dan peran konsultan perencana. Karena kurang idealnya proses partisipasi yang terjadi berpengaruh pada peran stakeholder masih didominasi oleh peran pemerintah, sedangkan peran swasta dan masyarakat relatif lebih kecil. Akibat dari pengaruh-pengaruh tersebut, maka menjadikan rencana tata ruang belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan pembangunan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang hanya mencapai tingkat *Consultation*, peran pemerintah yang masih mendominasi dalam proses perencanaan, dan dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan yang tidak sepenuhnya menggunakan acuan rencana tata ruang, bila hal ini berlangsung terus menerus dan tidak ada upaya pemerintah untuk mencegahnya, maka di masa yang akan datang dapat diprediksikan terjadinya masalah pemanfaatan ruang yang tidak konsisten, sehingga dikhawatirkan bisa berakibat pada: pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak efisien dan terjadi kemerosotan kualitas lingkungan hidup; laju pertumbuhan antar daerah yang tidak seimbang; penggunaan tanah yang tidak tertib; dan interaksi sosial ekonomi antar pelaku dalam pemanfaatan ruang yang tidak harmonis.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisisnya, serta rekomendasi-rekomendasi yang berupa usulan bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati khususnya pada masa mendatang.

5.1 Kesimpulan

Proses penyusunan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati Tahun 2005–2014 telah dilaksanakan pada tahun 2004 yang lalu, dan untuk pertama kalinya telah dilaksanakan dengan menyertakan metode partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan seminar rancangan rencana bersama masyarakat. Walaupun begitu, pada kenyataannya masih ditemui adanya penyimpangan pemanfaatan ruang, dan hal ini mengindikasikan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang.

Kebijakan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, pada prakteknya ternyata terdapat beberapa perbedaan dengan normatifnya. Perbedaan terletak pada sifat pelibatan masyarakat bukan atas dasar inisiatif masyarakat tetapi atas dasar inisiatif pemerintah, media yang digunakan untuk pemberian informasi tidak melalui media cetak dan elektronik, dan sedikitnya jangka waktu pemberian masukan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bentuk partisipasi masyarakat

dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati adalah bentuk sumbangan masukan/saran/usul dan sumbangan informasi/data. Tingkat partisipasi masyarakat menurut tipologi Arnstein masuk dalam kategori *Consultation* (konsultasi), yang termasuk dalam derajat tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*. Bentuk partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor penghasilan dan faktor peran konsultan perencana, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor penghasilan, dan faktor peran konsultan perencana. Peran stakeholder sangat didominasi oleh peran pemerintah, sedangkan peran swasta dan masyarakat relatif lebih kecil. Bila dikaitkan dengan pembangunan, rencana tata ruang yang dihasilkan belum sepenuhnya dipakai sebagai acuan dalam pembangunan.

Pada saat proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati tidak dilaksanakan sebagaimana konsep ideal, menjadikan prinsip transparansi dan demokratisasi tidak tercapai. Karena prosesnya kurang transparan dan tidak tersosialisasi dengan baik, masyarakat kurang antusias untuk berpartisipasi, dan akibatnya masukan/saran/usul/pendapat dari masyarakat masih banyak yang tidak terakomodasi. Dengan demikian tujuan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, dan demokratis tidak tercapai, karena inisiatif partisipasi bukan berasal dari masyarakat sendiri.

Disamping itu tujuan pemberdayaan yang diharapkan dari hasil pelibatan masyarakat tidak dapat tercapai karena tidak mampu menghasilkan keadilan, dimana didalamnya terdapat pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan. Hal ini terjadi karena proses komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan stakeholder lain tidak berjalan dengan baik, akibat kurang transparansinya proses yang terjadi.

Karena adanya ketidaksesuaian proses partisipasi masyarakat antara Permendagri dan dalam prakteknya, memiliki hubungan pada bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, faktor pengaruh, dan peran stakeholder, yang keseluruhannya mengakibatkan rencana tata ruang belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan pembangunan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati beberapa waktu lalu, baru merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah karena tuntutan desentralisasi dalam otonomi daerah yang menghendaki pemerintah berperan bersama-sama stakeholder lain dalam perencanaan pembangunan termasuk perencanaan tata ruang. Sedangkan tujuan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai dengan partisipasi itu sendiri belum dapat tercapai. Maka agar tujuan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat tercapai dan rencana tata ruang yang dihasilkan dapat digunakan secara penuh sebagai acuan dalam pembangunan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, maka perlu diadakan perbaikan pada proses pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penyusunan rencana tata ruang di Pati, sebagaimana konsep ideal sesuai peraturan yang berlaku secara normatif.

5.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disampaikan rekomendasi yang berupa usulan bagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati selanjutnya, yaitu:

- Dalam rangka penerapan prinsip transparansi diperlukan keterbukaan dalam setiap aspek dan tahap perencanaan untuk menciptakan kepercayaan antara

pemerintah dan masyarakat. Untuk itu dalam proses penyusunan rencana tata ruang, pemberian informasi pengumuman kepada masyarakat tentang rencana penyusunan tata ruang dan rancangan rencana tata ruang, hendaknya dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik disamping lewat forum pertemuan sampai ke wilayah perencanaan.

- Dengan cara melakukan pengumuman melalui media cetak, elektronik, dan forum pertemuan, hendaknya sifat pelibatan masyarakat bukan lagi atas dasar inisiatif pemerintah semata tetapi ditingkatkan lagi menjadi partisipasi dengan inisiatif dari masyarakat sendiri.
- Jangka waktu untuk memberikan masukan/saran/usul/pertimbangan hendaknya diberikan jangka waktu yang mencukupi, agar dapat mengakomodasi masukan masyarakat dan stakeholder lain lebih banyak lagi dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dan komitmen yang lebih banyak pula.
- Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan rencana tata ruang, dapat dilakukan lewat peningkatan pembinaan melalui penyuluhan atau sosialisasi, dan pemerintah perlu berinisiatif untuk meningkatkan kualitas seluruh stakeholder dalam perencanaan, termasuk unsur pemerintah sendiri, karena dengan kualitas yang setara diantara para stakeholder akan menghindari konflik karena kepentingan individu maupun golongan.

Sedangkan bagi pengembangan studi lanjutan yang berkaitan dengan hasil penelitian, maka perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam, mengenai seberapa besar kontribusi hasil dari proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, diakomodasi kedalam produk rencana tata ruang yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Branch, M. C. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan*. Terjemahan Bambang Hari Wibisono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bryant, Coralie and Louise G.White. 1987. *Managemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Terjemahan Rusyanto. Jakarta: LP3ES
- Budihardjo, Eko. 1999. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Andi.
- 2005. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alumni.
- dan Djoko Sujarto. 2005. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni.
- Burke, E.M. 2004. *Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota*. Terjemahan Puji Lestari, Dewi Mayangsari, dan Sely Martini. Bandung: Penerbit Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Cadman, David and Leslie Austin-Crowe. 1991. *Development Property*. Third Edition. London: E and FN Spon
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Terjemahan Susetawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadi, S. P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi
- Hasan, M.I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Imparato, Ivo and Jeff Ruster. 2003. *Slum Upgrading and Participation: Lesson from Latin America*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Jayadinata, J.T. 1986. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB Bandung.

- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Terjemahan Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metoda-Metoda Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit UI Press
- Moughtin, J.C. 1992. *Urban Design Street and Square*. Oxford: Butterworth Heinemann Ltd.
- Narbuko, C dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sanoff, Henry. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. Toronto: John Wiley & Sons. Inc.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Schubeler, Peter. 1996. *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Sevilla, C. G. et al. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Terjemahan Alimuddin Tuwu. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Singarimbun, M dan Sofian Effendi. 1995 (eds.). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soefaat, et al. 1998. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.

- Soegijoko, B.Tj et al. 2005 (eds.). *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21: Buku 2 Pengalaman Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiarto, et al. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: Gramedia.
- Sujarto, Joko. 1989. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Sumaryadi, I.N. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Tjokrowinoto, Moeljarto.1999. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yeung, Y.M and T.G. Mc Gee. 1986 (eds.). *Community Participation in Delivering Urban Services in Asia*. Ottawa: IDRC
- Yunus, H. S. 2005. *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

- Arnstein, Sherry. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Planning Association, Volume 35, No. 4, Juli 1969.
- Kiprah, 2001. *Kiprah Rencana Tata Ruang dalam Pembangunan Perkotaan*. Kiprah No. 2 Tahun I, November 2001.
- Rukmana, Deden. 2005. *Urbanisasi dan Perubahan Perilaku Penduduk*. Jurnal Info URDI Volume 19, Mei-September 2005.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok*. Jurnal Tata Loka Volume 5, No. 1, Januari 2003.
- Zulkaidi, Denny dan Nasrina Kumala Sari. 2004. *Penilaian Tingkat Transparansi Dalam Proses Penyusunan RTRW Kota. Studi Kasus Proses Penyusunan Naskah RTRW Kota Bandung*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB Volume 15, No. 1 Tahun 2004. Halaman 48-68.

MAKALAH/INTERNET

- Briassoulis, Helen. 1997. *How the Others Plan: Exploring the Shape and Forms of Informal Planning*. Journal of Planning Education and Research, Volume 17, No.2, 105-117. Available from <http://www.jpe.sagepub.com>; INTERNET
- Haeruman, Herman. 2004. *Penataan Ruang dalam Era Otonomi Daerah yang Diperluas*. Available from <http://www.bktrn.org>; INTERNET
- Ibrahim, Syahrul. 2004. *Paradigma Baru Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang*. Available from <http://www.bktrn.org>; INTERNET
- Kimpraswil, 2002. *Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang*. Makalah dalam Pelatihan Penyusunan Rencana Tata Ruang Propinsi se-Sumbagsel di Palembang 30 September 2002. Available from <http://www.kimpraswil.go.id>; INTERNET.
- Pasaribu, M. M dan Eko Y. Suprpto. 2004. *Pendekatan Keterpaduan Sebagai Jawaban Terhadap Permasalahan Penataan Ruang Perkotaan di Masa Mendatang*. Available from <http://www.bktrn.org>; INTERNET
- Santosa, M. A dan Arimbi Heroepoetri. 2005. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Available from <http://www.pacific.net.id>; INTERNET.
- Siahaan, E. I. 2002. *Filosofi Perencanaan Pembangunan Kota Sesuai Paradigma Baru di Indonesia: Hakikat Ilmu Untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat*. Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana/S3 Institut Pertanian Bogor Agustus 2002. Available from <http://www.rudycr.tripod.com>; INTERNET.
- Wiranto, Tatag. 2001. *Perspektif Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Ruang*. Prosiding Seminar Penataan Ruang dalam Rangka Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah (Studi Kasus: Provinsi Banten). Available from <http://www.bktrn.org>; INTERNET

TESIS

- Yulianti, Rina. 2000. "Efektivitas Metode Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Limbah Perkotaan di Perumnas Mojosongo Surakarta." Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 *tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota*.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tanggal 12 Agustus 2002 *tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, Lampiran VI Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 *tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 *tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 *tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 *tentang Penataan Ruang*.

BUKU DATA/LAPORAN

Kabupaten Pati dalam Angka Tahun 2004. BAPPEDA dan BPS Kabupaten Pati, 2005.

Kecamatan Pati dalam Angka Tahun 2004. BAPPEDA dan BPS Kabupaten Pati, 2005.

Neraca Sumberdaya Alam Daerah Kabupaten Pati Tahun 2000. BAPPEDA Kabupaten Pati, 2000.

Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati Tahun 2005-2014. BAPPEDA Kabupaten Pati, 2004.

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara
Di
Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang,

Nama : Suciati
NIM : L4D005063
Alamat : Jl. Hayam Wuruk 5-7 lantai III Semarang

Dalam rangka penyusunan Tesis, kami bermaksud mengadakan penelitian berjudul **Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pati**, dengan lokasi di Kecamatan Pati dan Margorejo.

Untuk itu kami mohon kesediaan dan kerelaan Bapak/Ibu/Saudara memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan (kuesioner) yang kami ajukan sebagaimana terlampir.

Perlu kami sampaikan bahwa Bapak/Ibu/Saudara kami pilih sebagai sampel, karena keterlibatan Bapak/Ibu/Saudara dalam penyusunan RUTRK Pati beberapa waktu yang lalu.

Kuesioner ini dipergunakan hanya untuk kepentingan penelitian akademis semata, dan tidak ada maksud-maksud lainnya. Oleh karena itu semua jawaban yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya. Selain itu tanpa bantuan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, penelitian ini tidak dapat dilaksanakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, khususnya instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana tata ruang di daerah, dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk berkenan mengisi kuesioner ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

S u c i a t i

KUESIONER UNTUK MASYARAKAT

A. DATA RESPONDEN

Petunjuk Pengisian

1. Daftar isian yang berbentuk pilihan, jawaban dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Untuk pernyataan yang tidak tersedia pilihan jawaban, jawaban dapat diisikan dengan menuliskan pada tempat yang telah tersedia.

1. Nama :
2. Alamat : Desa/Kelurahan:
RT RW
3. Jenis Kelamin :
 - a. Pria
 - b. Wanita
4. Usia Bapak/Ibu :
 - a. 20-30 tahun
 - b. 31-40 tahun
 - c. 41-50 tahun
 - d. Lebih dari 50 tahun
5. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu :
 - a. Sarjana
 - b. Sarjana Muda/Diploma
 - c. Lulus SMA atau yang sederajat
 - d. Lulus SMP atau yang sederajat
 - e. Lulus SD atau yang sederajat
6. Pekerjaan Bapak/Ibu saat ini :
 - a. PNS/TNI
 - b. Pensiunan
 - c. Kepala Desa/Kelurahan
 - d. Pegawai Swasta
 - e. Wiraswasta
 - f. Lain-Lain, sebutkan.....
7. Rata-rata penghasilan yang diterima Bapak/Ibu tiap bulan :
 - a. Kurang dari Rp. 500.000,-
 - b. Rp. 500.000,- s/d Rp. 799.000,-
 - c. Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.099.000,-
 - d. Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.400.000,-
 - e. Lebih dari Rp. 1.400.000,-

B. FAKTOR EKSTERNAL

1. Dalam melaksanakan penyusunan RUTRK Pati, bagaimanakah pembinaan dan pemberian informasi *Pemerintah Daerah* kepada masyarakat?
 - a. Sangat sering (>66%).
 - b. Cukup sering (34%-66%).
 - c. Kurang (1%-33%).
 - d. Tidak ada (0%).
2. Dalam melaksanakan penyusunan RUTRK Pati, bagaimanakah peranan *Konsultan Perencana* dalam kegiatan tersebut?
 - a. Sangat memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat (>66%).
 - b. Cukup memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat (34%-66%).
 - c. Kurang memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat (1%-33%).
 - d. Tidak memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat (0%).
3. Dalam melaksanakan penyusunan RUTRK Pati, bagaimanakah keterlibatan *pihak swasta* (LSM, Pengembang) dalam kegiatan tersebut?
 - a. Sangat terlibat (>66%).
 - b. Cukup terlibat (34%-66%).
 - c. Kurang terlibat (1%-33%).
 - d. Tidak terlibat (0%).

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) PATI

Petunjuk Pengisian

1. Jawaban pertanyaan mohon dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf di depan jawaban.
2. Apabila memilih jawaban (e), selain diberikan tanda silang (X), mohon juga dituliskan/disebutkan pada tempat yang telah tersedia.

1. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Penjaringan Aspirasi Masyarakat I* pada penyusunan RUTRK Pati?
 - a. Hanya mendengarkan saja.
 - b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul.
 - c. Memberikan sumbangan informasi/data.
 - d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang.
 - e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban
Sebutkan
2. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan *Penjaringan Aspirasi Masyarakat II* pada penyusunan RUTRK Pati?
 - a. Hanya mendengarkan saja.
 - b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul.
 - c. Memberikan sumbangan informasi/data.
 - d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang.
 - e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban
Sebutkan
3. Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam *seminar rancangan rencana* pada penyusunan RUTRK Pati?

- a. Hanya mendengarkan saja.
- b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul.
- c. Memberikan sumbangan informasi/data.
- d. Memberikan bantuan memperjelas hak atas ruang.
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana.
- f. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban

Sebutkan

D. TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) PATI

Petunjuk Pengisian

Jawaban pertanyaan mohon dipilih salah satu dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf di depan jawaban.

1. Pada kegiatan penyusunan RUTRK Pati, bagaimana partisipasi *kehadiran* Bapak/Ibu dalam rapat/pertemuan yang diadakan?
 - a. Hadir hanya sebagai pendengar saja.
 - b. Hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.
 - c. Hadir dan mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - d. Hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah.
 - e. Hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan.
 - f. Hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah.
 - g. Hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
 - h. Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
2. Pada kegiatan penyusunan RUTRK Pati, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *mengemukakan masukan/saran/usul*?
 - a. Tidak memberikan masukan/saran/usul.
 - b. Memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah saja.
 - c. Memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat.
 - d. Memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah.
 - e. Memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
 - g. Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
 - h. Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
3. Pada kegiatan penyusunan RUTRK Pati, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *menetapkan konsep rencana*?
 - a. Tidak ikut menetapkan konsep rencana.

- b. Ikut menetapkan konsep rencana tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
 - c. Ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat.
 - d. Ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana.
 - e. Ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep rencana.
 - f. Ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah.
 - g. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
 - h. Ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
4. Dalam penyusunan RUTRK Pati, bagaimana partisipasi Bapak/Ibu dalam *memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana*?
- a. Tidak memberikan persetujuan.
 - b. Memberikan persetujuan tetapi untuk kepentingan pemerintah saja.
 - c. Memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat.
 - d. Memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah.
 - e. Memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat diperhatikan.
 - f. Memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah.
 - g. Memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.
 - h. Memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

E. USULAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Petunjuk Pengisian

Jawaban pertanyaan mohon dituliskan pada tempat yang telah disediakan, sesuai pendapat Bapak/Ibu.

1. Usulan Bapak/Ibu tentang *bentuk partisipasi masyarakat* dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa-masa mendatang.
.....
.....
.....
.....
2. Usulan Bapak/Ibu tentang *tingkat partisipasi masyarakat* dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa-masa mendatang.
.....

.....
.....
.....

3. Usulan Bapak/Ibu tentang berapa kali seharusnya *frekuensi yang ideal* partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa-masa mendatang (selama ini dilaksanakan 3 kali).

.....
.....
.....
.....

4. Apakah *metode pelibatan/partisipasi masyarakat yang telah dilakukan* oleh Pemerintah Daerah, dalam penyusunan rencana tata ruang beberapa waktu lalu telah memadai dan sesuai harapan Bapak/Ibu? Mengapa?

.....
.....
.....
.....

5. Dengan otonomi daerah sekarang ini, *harapan-harapan* apa saja yang Bapak/Ibu inginkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa-masa mendatang?

.....
.....
.....
.....

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Instansi Pemerintah (BAPPEDA)

1. Bagaimanakah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang di Pati?
2. Apakah masyarakat telah cukup dilibatkan/berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati?
3. Apakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati selama ini telah sesuai harapan? Mengapa?
4. Apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati selama ini telah sesuai harapan? Mengapa?
5. Cukup memadaikah informasi yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati? Apakah pengumuman telah dilakukan lewat media cetak dan elektronik?
6. Bagaimanakah pembinaan Pemerintah Daerah dalam pelibatan masyarakat pada penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
7. Bagaimanakah akses masyarakat dan stakeholder lain untuk menyampaikan pendapat/saran/pertimbangan/usul kepada Pemerintah Daerah?
8. Apakah stakeholder lain selain perwakilan masyarakat telah dilibatkan dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
9. Menurut Bapak, apakah peranan konsultan dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati telah sesuai harapan? Mengapa?
10. Apakah masukan/saran/usul masyarakat pada saat penjangkaran aspirasi masyarakat dan semiloka telah cukup diakomodasi oleh Pemerintah dan Konsultan?
11. Menurut Bapak, apakah peranan dinas/instansi dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati telah sesuai harapan? Mengapa?
12. Hambatan-hambatan apa yang menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
13. Saran-saran apa untuk perbaikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa datang?

Untuk Instansi Pemerintah (Diskimpras, Dinas Pertanahan)

1. Menurut Bapak, bagaimanakah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang di Pati?
2. Bagaimanakah peranan instansi Bapak dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
3. Menurut pendapat Bapak, apakah masyarakat telah cukup dilibatkan/berpartisipasi dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
4. Apakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang ada selama ini telah cukup memadai? Mengapa?
5. Cukup memadaikah informasi yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
6. Bagaimanakah akses untuk menyampaikan pendapat/saran/pertimbangan kepada Pemerintah Daerah?
7. Hambatan-hambatan apa yang menjadi kendala partisipasi selama ini?

8. Saran-saran apa untuk perbaikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa datang?

Untuk Swasta (Pengembang Perumahan)

1. Menurut pendapat Bapak apakah lembaga Bapak telah cukup berpartisipasi dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
2. Menurut pendapat Bapak, apakah masyarakat telah cukup berpartisipasi dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
3. Apakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang selama ini ada telah cukup memadai? Mengapa?
4. Cukup memadaikah informasi yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
5. Bagaimanakah akses untuk menyampaikan pendapat/saran/pertimbangan kepada Pemerintah Daerah?
6. Hambatan-hambatan apa yang menjadi kendala partisipasi selama ini?
7. Saran-saran apa untuk perbaikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa datang?

Untuk Swasta (Konsultan)

1. Menurut pendapat Bapak apakah lembaga Bapak telah mengakomodasi usulan masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
2. Menurut pendapat Bapak, apakah masyarakat telah cukup berpartisipasi dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
3. Apakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang selama ini ada telah cukup memadai? Mengapa?
4. Cukup memadaikah informasi yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
5. Bagaimanakah akses untuk menyampaikan pendapat/saran/pertimbangan kepada Pemerintah Daerah?
6. Hambatan-hambatan apa yang menjadi kendala partisipasi selama ini?
7. Saran-saran apa untuk perbaikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa datang?

LAMPIRAN B

TABULASI DATA HASIL KUESIONER

NO RESP	FAKTOR INTERNAL					KTOR EKSTERN			BENTUK			TINGKAT				USULAN				
	JK	USIA	DIK	PEK	HSL	PEM	KSL	STK	P I	P II	SMR	HDR	SRN	KSP	STJ	UB	UT	UF	ML	HR
1	1	3	1	3	5	2	2	3	3	5	3	3	4	3	3	5	1	2	3	3
2	1	4	3	2	3	3	1	3	5	5	6	5	6	5	6	3	5	3	4	5
3	1	4	2	2	4	3	1	3	5	5	4	5	6	6	6	2	5	4	7	9
4	1	3	3	4	3	2	1	3	2	2	3	3	3	4	4	4	2	2	2	1
5	1	4	1	3	5	3	2	3	3	5	6	4	5	4	4	4	5	3	3	5
6	1	2	3	5	2	3	1	3	5	3	2	3	3	5	5	5	3	3	5	3
7	1	4	2	2	5	3	1	3	5	5	2	3	4	6	5	3	4	3	6	2
8	1	4	2	3	5	2	1	3	5	5	2	4	6	5	6	6	4	4	5	5
9	1	4	1	1	5	3	1	3	2	2	2	3	4	3	4	4	4	2	3	1
10	1	4	3	3	5	3	2	2	2	5	3	3	3	3	4	1	2	1	4	5
11	1	4	3	6	4	3	1	3	5	2	2	4	3	3	4	4	3	2	1	8
12	1	3	3	5	3	3	1	3	2	5	5	5	3	3	3	1	1	3	5	2
13	1	3	2	1	5	3	2	3	2	2	2	3	3	3	5	2	2	1	3	11
14	1	4	3	2	5	3	2	3	3	3	6	3	3	4	3	2	3	1	2	1
15	1	2	3	3	3	2	1	3	3	5	3	5	4	4	5	5	4	4	4	5
16	1	2	3	6	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	5
17	1	3	4	3	5	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	2	3	5	9
18	1	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	4	2	2	6	1
19	1	3	3	3	5	2	1	3	5	5	3	3	3	3	3	5	1	2	5	4
20	1	3	1	1	5	3	1	3	2	2	6	4	5	6	5	5	1	1	3	5
21	1	3	1	3	5	3	1	3	5	5	3	3	3	3	5	4	2	3	4	4
22	1	4	2	2	4	2	2	3	2	2	2	3	4	4	4	1	3	3	2	1
23	1	3	3	3	4	3	1	2	3	2	2	4	5	3	5	5	5	4	5	3
24	1	4	3	2	4	3	2	3	2	2	2	3	4	4	4	4	2	3	5	5
25	1	2	1	3	5	3	1	3	2	5	2	3	5	4	4	5	3	3	4	2
26	2	2	3	5	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	4	1	1	1	5
27	1	4	3	3	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	3	5
28	1	3	3	5	3	3	2	3	2	2	2	3	3	4	3	4	3	2	8	2
29	1	3	3	6	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	5
30	2	3	2	3	4	3	1	3	2	3	3	3	4	4	4	3	4	1	5	6
31	1	4	4	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	4	4	1	3	4	7
32	1	3	3	6	4	2	1	3	2	2	2	4	3	4	3	1	2	2	6	8
33	1	3	1	3	5	2	1	3	3	3	6	5	5	4	5	2	5	3	5	10
34	1	3	3	4	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	1	3	3	3	5
35	1	3	3	3	4	3	1	3	5	5	6	5	6	5	6	5	5	3	4	12
36	1	3	3	5	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	1	1	2	1
37	1	3	3	3	5	2	2	3	2	2	3	3	5	4	4	2	4	2	4	4
38	1	4	3	2	4	3	1	3	2	2	2	3	4	3	3	4	2	3	5	4
39	1	4	3	3	4	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	5	3	2	6	9
40	1	4	3	6	4	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	4	2	1	1	5
41	1	4	1	2	5	3	1	3	3	3	6	4	5	5	5	3	5	4	5	12
42	1	2	3	3	4	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	4	8
43	1	3	3	3	5	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	5	4	2	2	1
44	1	4	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	1	4	2	3	5
45	1	3	1	3	4	2	2	3	3	3	2	4	6	5	6	2	5	3	5	5
46	1	4	3	5	3	3	1	3	2	2	2	3	3	3	4	4	1	1	5	1
47	1	3	1	3	4	3	2	3	2	2	3	3	4	4	5	4	3	3	5	3
48	1	4	3	5	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	4	1	1	1	2	5
49	1	3	1	3	4	3	1	3	5	2	6	4	4	4	5	4	2	2	3	3
50	1	4	3	4	5	3	1	3	3	5	3	3	5	4	5	2	4	3	4	12
51	1	4	3	5	4	2	2	2	2	3	2	4	3	3	3	4	3	3	5	4
52	1	4	4	3	5	2	1	3	3	3	2	3	4	4	4	4	2	4	4	5
53	1	3	2	6	4	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	5	1	4	5	5
54	1	2	1	3	4	2	2	3	3	3	2	4	4	3	4	2	2	3	5	4

KETERANGAN

JK	: Jenis kelamin
USIA	: Usia responden
DIK	: Pendidikan
PEK	: Pekerjaan
HSL	: Penghasilan
PEM	: Peranan Pemerintah dalam melakukan pembinaan
KSL	: Peranan Konsultan Perencana
STK	: Keterlibatan Pihak Swasta
P I	: Penjaringan Aspirasi Masyarakat I
P II	: Penjaringan Aspirasi Masyarakat II
SMR	: Seminar Rancangan Rencana
HDR	: Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan
SRN	: Keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul
KSP	: Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana
STJ	: Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana
UB	: Usulan bentuk partisipasi
UT	: Usulan tingkat partisipasi
UF	: Usulan frekuensi partisipasi
ML	: Persepsi tentang metode partisipasi yang telah dilakukan
HR	: Harapan-harapan untuk peningkatan partisipasi

REKAPITULASI JAWABAN TERBUKA KUESIONER

TABEL USULAN BENTUK-BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

No.	Bentuk Partisipasi	Frekuensi	%
1	Tidak mengusulkan karena sudah cukup lengkap	9	16,7
2	Bekerjasama dalam penyusunan	9	16,7
3	Bantuan tenaga ahli dari masyarakat	4	7,4
4	Identifikasi kebutuhan masyarakat	20	37,0
5	Sumbangan pertimbangan	11	20,4
6	Pengajuan kritikan dan solusinya	1	1,9
	Jumlah	54	100

Sumber: Hasil Analisis, 2006

TABEL USULAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

No.	Tingkat Partisipasi	Frekuensi	%
1	Dialog antara pemerintah dan masyarakat lebih diintensifkan	12	22,2
2	Masukan/saran/usul dari masyarakat agar lebih memberi pengaruh pada rencana	14	25,9
3	Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan keputusan	11	20,4
4	Berbagi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat	9	16,7
5	Masyarakat diberi kewenangan membuat keputusan pada rencana	8	14,8
	Jumlah	54	100

Sumber: Hasil Analisis, 2006

TABEL USULAN FREKUENSI PARTISIPASI MASYARAKAT

No.	Frekuensi Partisipasi	Frekuensi	%
1	3 kali	11	20,4
2	4 kali	14	25,9
3	5 kali	22	40,7
4	Lebih dari 5 kali	7	13,0
	Jumlah	54	100

Sumber: Hasil Analisis, 2006

**TABEL PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP METODE PARTISIPASI
YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH**

No.	Persepsi Masyarakat	Frekuensi	%
1	Cukup memadai mengingat baru pertama kali dilaksanakan	3	5,6
2	Kurang memadai karena pemberian informasi kepada masyarakat terlalu sedikit	6	11,1
3	Kurang memadai karena jumlah masyarakat yang terlibat masih sedikit	11	20,4
4	Kurang memadai karena masyarakat dan stakeholder yang terlibat jumlahnya sedikit	11	20,4
5	Kurang memadai karena pemberian informasi, serta masyarakat dan stakeholder yang terlibat jumlahnya sedikit	17	31,5
6	Kurang memadai karena belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan masyarakat dan stakeholder	4	7,4
7	Kurang memadai karena materi pembahasan tidak diserahkan masyarakat beberapa hari sebelumnya	1	1,9
8	Kurang memadai karena keterbatasan waktu penyusunan	1	1,9
	Jumlah	54	100

Sumber: Hasil Analisis, 2006

TABEL HARAPAN MASYARAKAT DI MASA-MASA MENDATANG

No.	Harapan Masyarakat	Frekuensi	%
1	Penyebarluasan informasi melalui pengumuman di media cetak, elektronik dan papan pengumuman	8	14,8
2	Peningkatan pembinaan pemerintah kepada masyarakat lewat penyuluhan dan sosialisasi	4	7,4
3	Adanya Forum Warga yang bisa menampung aspirasi masyarakat setiap saat	5	9,3
4	Peran stakeholder lebih ditingkatkan lagi	6	11,1
5	Peningkatan penyebarluasan informasi, serta peningkatan jumlah masyarakat dan stakeholder yang terlibat dalam penyusunan rencana	18	33,3
6	Penyusunan rencana tata ruang dengan tidak meninggalkan ciri lokal dan berwawasan lingkungan	1	1,9
7	Penyusunan rencana tata ruang yang memberi kepastian pada investasi daerah	1	1,9
8	Prosedur untuk berpartisipasi lebih dipermudah dan disediakan fasilitasnya	3	5,6
9	Rencana harus lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan stakeholder	3	5,6

Lanjutan

10	Prosedur partisipasi berjenjang mulai dari desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten	1	1,9
11	Peran DPRD lebih ditingkatkan lagi	1	1,9
12	Diperlukan sanksi tegas bagi yang melanggar rencana tata ruang.	3	5,6
	Jumlah	54	100

Sumber: Hasil Analisis, 2006

**FOTO-FOTO KEGIATAN PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI
TAHAP PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT**



**FOTO-FOTO KEGIATAN PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI
TAHAP SEMINAR/SEMILOKA RANCANGAN RENCANA**



FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Gambar perumahan yang berada di lokasi kawasan industri



Gambar bangunan PDAM yang merupakan konversi lahan pertanian teknis untuk kegiatan perkotaan

Gambar perparkiran dalam Kota Pati yang memanfaatkan bahu jalan sehingga mengurangi volume lalu lintas



Gambar lokasi stadion dan Alun-Alun Kota Pati sebagai satu-satunya Ruang Publik di Kota Pati untuk kegiatan masyarakat



Gambar kegiatan wawancara dengan responden masyarakat

Frequencies

Statistics

	Jenis Kelamin	Usia Responden	Pendidikan Responden	Pekerjaan Responden	Penghasilan Responden
N	Valid	54	54	54	54
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid pria	52	96.3	96.3	96.3
wanita	2	3.7	3.7	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Usia Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 31-40 tahun	7	13.0	13.0	13.0
41-50 tahun	23	42.6	42.6	55.6
lebih dari 50 tahun	24	44.4	44.4	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Pendidikan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sarjana	12	22.2	22.2	22.2
Sarjana Muda/Diploma	8	14.8	14.8	37.0
SMA	31	57.4	57.4	94.4
SMP	3	5.6	5.6	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Pekerjaan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS/TNI	3	5.6	5.6	5.6
Pensiunan	10	18.5	18.5	24.1
Kades/Kalur	24	44.4	44.4	68.5
Pegawai Swasta	3	5.6	5.6	74.1
Wiraswasta	8	14.8	14.8	88.9
Lain-lain	6	11.1	11.1	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Penghasilan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rp.500.000,- s/d Rp.799.000,-	3	5.6	5.6	5.6
	Rp.800.000,- s/d Rp.1.099.000,-	13	24.1	24.1	29.6
	Rp.1.100.000,- s/d Rp.1.400.000,-	19	35.2	35.2	64.8
	Lebih dari Rp. 1.400.000,-	19	35.2	35.2	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

		Peran Pemda	Peran Konsultan	Peran Swasta
N	Valid	54	54	54
	Missing	0	0	0

Frequency Table

Peran Pemda

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Sering	19	35.2	35.2	35.2
	Kurang	35	64.8	64.8	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Peran Konsultan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Memperhatikan	25	46.3	46.3	46.3
	Cukup Memperhatikan	27	50.0	50.0	96.3
	Kurang Memperhatikan	2	3.7	3.7	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Peran Swasta

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup Terlibat	7	13.0	13.0	13.0
	Kurang Terlibat	47	87.0	87.0	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

		Penjaringan Aspirasi Masyarakat1	Penjaringan Aspirasi Masyarakat2	Seminar Rancangan Rencana
N	Valid	54	54	54
	Missing	0	0	0

Frequency Table

Penjaringan Aspirasi Masyarakat1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pendengar	2	3.7	3.7	3.7
	Sumbangan masukan/saran/usul	31	57.4	57.4	61.1
	Sumbangan informasi/data	11	20.4	20.4	81.5
	Bentuk lain	10	18.5	18.5	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Penjaringan Aspirasi Masyarakat2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pendengar	2	3.7	3.7	3.7
	Sumbangan masukan/saran/usul	29	53.7	53.7	57.4
	Sumbangan informasi/data	9	16.7	16.7	74.1
	Bentuk lain	14	25.9	25.9	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Seminar Rancangan Rencana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pendengar	2	3.7	3.7	3.7
	Sumbangan masukan/saran/usul	31	57.4	57.4	61.1
	Sumbangan informasi/data	11	20.4	20.4	81.5
	Bantuan memperjelas hak atas ruang	1	1.9	1.9	83.3
	Pengajuan keberatan	1	1.9	1.9	85.2
	Bentuk lain	8	14.8	14.8	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

		Tingkat Kehadiran	Keaktifan Memberi Saran	Keterlibatan Menetapkan Konsep	Keterlibatan Memberi Persetujuan
N	Valid	54	54	54	54
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table

Tingkat Kehadiran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	3.7	3.7	3.7
	3	35	64.8	64.8	68.5
	4	11	20.4	20.4	88.9
	5	6	11.1	11.1	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Keaktifan Memberi Saran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	3.7	3.7	3.7
	3	27	50.0	50.0	53.7
	4	12	22.2	22.2	75.9
	5	8	14.8	14.8	90.7
	6	5	9.3	9.3	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Keterlibatan Menetapkan Konsep

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	3.7	3.7	3.7
	3	26	48.1	48.1	51.9
	4	17	31.5	31.5	83.3
	5	6	11.1	11.1	94.4
	6	3	5.6	5.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Keterlibatan Memberi Persetujuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	20	37.0	37.0	37.0
	4	17	31.5	31.5	68.5
	5	12	22.2	22.2	90.7
	6	5	9.3	9.3	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

	Usulan Bentuk Partisipasi	Usulan Tingkat Partisipasi	Usulan Frekuensi Partisipasi	Persepsi Metode yang Dilaksanakan	Harapan Responden Masa Datang
N Valid	54	54	54	54	54
Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Usulan Bentuk Partisipasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	9	16.7	16.7	16.7
2	9	16.7	16.7	33.3
3	4	7.4	7.4	40.7
4	20	37.0	37.0	77.8
5	11	20.4	20.4	98.1
6	1	1.9	1.9	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Usulan Tingkat Partisipasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	12	22.2	22.2	22.2
2	14	25.9	25.9	48.1
3	11	20.4	20.4	68.5
4	9	16.7	16.7	85.2
5	8	14.8	14.8	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Usulan Frekuensi Partisipasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	11	20.4	20.4	20.4
2	14	25.9	25.9	46.3
3	22	40.7	40.7	87.0
4	7	13.0	13.0	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Persepsi Metode yang Dilaksanakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	5.6	5.6	5.6
	2	6	11.1	11.1	16.7
	3	11	20.4	20.4	37.0
	4	11	20.4	20.4	57.4
	5	17	31.5	31.5	88.9
	6	4	7.4	7.4	96.3
	7	1	1.9	1.9	98.1
	8	1	1.9	1.9	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Harapan Responden Masa Datang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	14.8	14.8	14.8
	2	4	7.4	7.4	22.2
	3	5	9.3	9.3	31.5
	4	6	11.1	11.1	42.6
	5	18	33.3	33.3	75.9
	6	1	1.9	1.9	77.8
	7	1	1.9	1.9	79.6
	8	3	5.6	5.6	85.2
	9	3	5.6	5.6	90.7
	10	1	1.9	1.9	92.6
	11	1	1.9	1.9	94.4
	12	3	5.6	5.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Suciati dilahirkan di Pati pada tanggal 6 bulan November tahun 1966, dari orang tua bernama Bapak Ashari dan Ibu Sutijah, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan Sekolah dasar dilalui di SD Negeri Jimbaran Margorejo lulus pada tahun 1979, SMP Negeri IV Pati lulus pada tahun 1982, SMA Negeri I Pati lulus pada tahun 1985, S1 diselesaikan pada tahun 1991 dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada bulan Agustus tahun 2005 penulis tugas belajar di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang dan lulus pada bulan November 2006.

Penulis belum menikah. Setelah lulus dari S1, penulis mulai bekerja di Kantor BAPPEDA Kabupaten Pati sejak tahun 1993 sampai sekarang.